



1.88%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 24 JUL 2024, 6:18 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

IDENTICAL 0.04% **CHANGED TEXT** 1.83% **QUOTES** 4.46%

Report #22148071

16 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pesta demokrasi atau Pemilihan umum di tahun 2024 semakin ramai diperbincangkan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia, terutama Generasi Z dan Milenial. Pada bulan Oktober 2023, terdapat suatu kejadian yang dinilai cukup kontroversial dalam dunia politik oleh berbagai macam kalangan. Kejadian tersebut bermula ketika salah satu calon Presiden Indonesia, yaitu Prabowo Subianto memutuskan untuk memilih sosok Generasi muda Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Rakha sebagai calon Wakil Presiden pilihan Prabowo Subianto. Hal tersebut menjadi problematika dalam segi aktivitas politik di Indonesia, dikarenakan yaitu Gibran Rakabuming selaku calon wakil presiden pilihan Prabowo Subianto dinilai belum cukup umur dan melanggar syarat batasan usia minimal Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024, hal ini ucapkan langsung oleh Gibran pada saat diwawancarai oleh CNBC Indonesia pada 10 Agustus 2023 di Puro Mangkunegaranm Solo, Jawa Tengah. Awal dari kejadian tersebut yaitu ketika Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada tanggal 9 Maret 2023 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait permintaannya dalam hal mengurangi usia minimal Capres dan Cawapres, dari usia 40 tahun diubah menjadi 35 tahun (Soleh Putu Inddah, 2023). Akan tetapi, pihak dari Mahkamah Konstitusi merespon dengan menolak uji materi yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan alasan melanggar

REPORT #22148071

peraturan perundang-undang. Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 7 agustus Mahasiswa asal Surakarta yang bernama Almas Tsaqbbirru Re mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan ketentuan usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi minimal 40 tahun atau telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah pada ketetapan surat salinan nomor 100/PUU-XXI/2023 yang diterima dan ditampilkan di website Mahkamah Konstitusi. 1 Pada tanggal 9 Oktober 2023, Kelompok relawan pendukung Joko Widodo atau lebih dikenal Projo mengusung Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, hal itu diakui oleh Budi Arie Setiadi, selaku ketua dari Projo, Budi mengatakan bahwa itu merupakan aspirasi yang turun langsung dari daera dan tidak direkayasa. Puncak dari perjalanan kasus tersebut yaitu pada tanggal 16 Oktober 2023, jam 11.00 WIB. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Mahasiswa asal Surakarta, yaitu Almas Tsaqbirru, dalam putusannya yang menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun masih dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden selama pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Syarat tersebut dinilai menjadi sesuatu yang dapat membuat Capres atau cawapres yang masih dibawah usia 40 Tahun bisa maju, asal mempunyai atau berpengalaman memimpin suatu

daerah di Indonesia. Hal ini dikutip dari webiste Okezone.com pada artikel yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan judul artikel berita "Putusan MK, Kepala Daerah Bisa Jadi Capres dan Cawapres Meski Belum 40 Tahun. Dalam konteks perkara ini, dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. **14** Ketentuan tersebut menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemilu, baik sebagai anggota DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota tidak dapat mencalonkan diri sebelum mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi, pada saat penunjukan Gibran Rakhabuming Rakha sebagai Cawapres Prabowo Subianto, dirinya masih berumur 36 Tahun. Hal itu dinilai melanggar peraturan Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 mengenai batasan usia Capres dan Cawapres. Singkatnya, masyarakat tambah dihebohkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tiba- tiba mengubah kebijakan peraturan Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Mahkamah Konstitusi mengabulkan keputusan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Keputusan tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden meskipun belum mencapai usia 40 tahun, asalkan memiliki rekam jejak atau pengalaman memimpin sebagai kepala daerah di 2 Indonesia. Sontak hal tersebut menimbulkan berbagai macam kontroversial di Indonesia. Terutama disusulnya putusan dari Prabowo Subianto yang langsung menunjuk Gibran Rakabuming sebagai Calon wakil Presidennya. Dalam konteks isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, teori jurnalisme online sangat relevan. Jurnalisme online merupakan bentuk jurnalisme yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi berita. Viralitas dalam jurnalisme online mengacu pada bagaimana informasi menyebar dengan cepat dan luas melalui jaringan sosial digital. Konten yang menarik perhatian dan mengundang partisipasi emosional cenderung menjadi viral. Unggahan yang

kritis terhadap putusan MK yang menjadi viral menunjukkan bagaimana informasi dan opini dapat dengan cepat mendapatkan perhatian luas dan memengaruhi opini publik. Dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia, hal ini juga dirasa sangat heboh. Sebagian besar warga Indonesia berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia minimal bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu strategi untuk memuluskan Gibran Rakabuming sebagai Calon Wakil Presiden yang didukung oleh Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju. Pada 16 Oktober 2024, akun Instagram @yanuarjak mengunggah pandangan pribadinya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Seperti banyak warga lainnya, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut, berikut adalah kutipan dari komentar dengan nama akun @yanuarjak "Keputusan MK untuk mengubah batas usia capres dan cawapres menjadi minimal 40 tahun adalah langkah mundur bagi demokrasi kita. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal prinsip keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Kita tidak bisa membiarkan dinasti politik terus berkembang dengan aturan yang diskriminatif seperti ini". Tulis akun @yanuarjak di kolom Instagram Kompas.com yang berisikan konten mengenai pengumuman resmi sidang putusan MK. Sebelum Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan atau meresmikan mengubah peraturan terkait batasan usia Capres dan Cawapres. Prabowo dan Koalisi Indonesia Muda memilih Gibran Rakabuming sebagai pendamping Prabowo Subianto untuk menjadi Calon wakil Presiden bersama dirinya. Hal ini dinilai seakan-akan menjadi cara untuk memuluskan Gibran Rakabuming yang belum berusia 40 tahun akan tetapi dirinya pernah menjabat sebagai Walikota Solo, untuk meneruskan kiprah dari sang Ayah, yaitu Joko Widodo untuk berada di Istana menjadi Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Gambar 1.1 Berita reaksi demo masyarakat dan mahasiswa (Kompas.com) Dalam mengkaji sudut pandang pro dan kontra dalam pemberitaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan usia minimal calon presiden

(capres) dan calon wakil presiden (cawapres), terdapat konsep jurnalisme online dalam pemberitaan ini, yaitu contohnya adalah dalam point Interaktivitas dan Partisipasi Publik. **43** Jurnalisme online memungkinkan interaksi langsung antara media dan audiensnya melalui komentar, share, dan feedback. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang putusan MK, baik yang pro maupun yang kontra. Namun, interaktivitas ini juga dapat menjadi arena bagi penyebaran informasi yang salah (misinformasi) dan opini yang belum terverifikasi, yang dapat memperkeruh pemahaman publik tentang isu tersebut. Hal ini dapat menjadi contoh banyaknya masyarakat dalam menanggapi isu berita ini di realitas sosial dalam mengkonsumsi berita. Tidak hanya dalam ruang lingkup masyarakat di Indonesia, akan tetapi juga banyak pendapat pro dan kontra terkait kasus tersebut, terutama dalam sudut 4 pandang pemberitaan di media berita digital, ditambah lagi banyaknya pemilik media berita Nasional yang ikut berkecimpung di dunia politik dan saling berkoalisi, membuat bentuk pembingkai pemberitaan terkait kasus putusan batasan usia Mahkamah Konstitusi di berbagai macam media dipertanyakan dan menuai pro dan kontra dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, Teori Agenda Setting dirasa punya peranan penting dalam penulisan suatu berita di suatu media berita. Perihal ini. **41** Melalui teori agenda setting, media memiliki kekuatan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan memberikan perhatian yang signifikan pada putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres, media seperti Kompas.com dan Okezone.com bisa membentuk persepsi publik tentang urgensi dan relevansi isu ini. Peneliti ingin mencari tahu dan menemukan apakah dari media yang sudah dipilih oleh Peneliti, di masing-masing pemberitaan mempunyai tujuan dalam menulis berita terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah peraturan tentang batasan minimal usia Capres dan Cawapres, dikarenakan kejadian tersebut melahirkan banyak tanggapan pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Gambar 1.2 Berita reaksi demo masyarakat dan mahasiswa (Okezone.com)

Dalam mencari tahu terkait perbedaan pembedaan pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah peraturan batasan usia minimal untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Peneliti memilih media Okezone.com dan Kompas.com untuk mencari tahu apakah dalam penyajian dan penulisan pemberitaan kasus putusan MK dalam perubahan batas usia Calon Presiden dan Calon wakil Presiden sudah objektif sesuai realitas yang ada atau malah sebaliknya. Peneliti memilih media Okezone.com dan Kompas.com awalnya didasari atas penelitian terdahulu yang dinilai menarik untuk diteliti oleh peneliti. Penelitian tersebut ditulis dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 di Media Online Kompas.com dan Okezone.com” yang diterbitkan di laman Jurnal Kaganga, Vol 5 No 1, April 2021. Dari penelitian tersebut, menggambarkan isi tentang penelitian yang menghasilkan pertanyaan terkait analisis penulisan pemberitaan di media Okezone.com dan Kompas.com mengenai presiden Indonesia yaitu Joko Widodo tentang banyaknya pemberitaan yang menduga bahwa Jokowi melakukan politik dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diadakan pada tahun 2020. Peneliti menilai bahwa penelitian terdahulu tersebut bisa dijadikan acuan untuk memilih media mana yang efektif untuk diteliti dalam penelitian terkait Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batasan Usia Cawapres pada Pemilu 2024. Ada beberapa faktor yang dirasa sangat sesuai pada kedua penelitian tersebut. Yang pertama adalah, penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 di Media Online Kompas.com dan Okezone.com” masih berada di dalam kekuasaan presiden Joko Widodo, dan penelitian sekarang ini yang berjudul “Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perubahan peraturan Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres” pada pemilu 2024 dinilai masih sama, dalam kekuasaan rezim Joko Widodo. Hal ini bisa dinilai menjadi keterkaitan yang sangat erat dalam dunia politik. Faktor selanjutnya

dikarenakan bahwa hasil dari penelitian terdahulu yang berjudul judul “Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 di Media Online Kompas.com dan Okezone.com” dijadikan oleh peneliti dalam pemilihan media dikarenakan hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa media Okezone.com tidak memperlakukan Joko Widodo dalam berpolitik dinasti, berbeda sudut pandang dengan Kompas.com yang selalu mengkritik Presiden Joko Widodo dalam 6 penulisan pemberitaan pada agenda Pemilu Serentak pada tahun 2020. Hal itu menjadi perhatian tersendiri kepada peneliti, dikarenakan disatu sisi peneliti ingin mencari tahu kebenaran terkait sudut pandang pemberitaan pada media Okezone.com dan Kompas.com jika di gunakan dalam penelitian ini. Faktor selanjutnya, yaitu masuk kedalam faktor internal dalam sudut pandang masyarakat Indonesia. Kompas.com dinilai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi media nasional terbesar di Indonesia dan media yang paling kritis pada tahun 2023. Hal itu dibuktikan dalam survei yang dibuat oleh Iping Wahid Strategik (IPWS) pada tahun 2023. Kompas.com meraih angka persenan sebesar 39.02% menjadi urutan pertama dari berbagai media yang ada di Indonesia, disusul dengan Detik.com mencapai angka 14,60% dan Tempo.co di urutan ketiga dengan raihan persenan sebesar 10,85%. Dalam periode berita yang ditargetkan oleh peneliti yaitu peneliti memilih periode berita pada tanggal 16 Oktober 2023 hingga 14 Februari 2024 dikarenakan bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2023 merupakan hari dimana Mahkamah Konstitusi memberikan 'Putusan Final' dalam kasus perubahan kebijakan terkait batasan usia Capres dan Cawapres dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Tidak hanya itu, peneliti memilih batas periode di tanggal 14 Februari 2024 dengan alasan yaitu bahwa di hari tersebut merupakan hari dimana Pemilihan Umum berlangsung, setelah hari tersebut merupakan hari 'tenang' dan tidak boleh ada kampanye lagi. Gambar 1.3 Hasil survei survei IPWS terkait media yang paling banyak dibaca yaitu Kompas.com, survei

tahun 2023 (Kompas.com) 7 Faktor pendukung lainnya kenapa peneliti memilih Kompas.com sebagai pengumpulan berita untuk dianalisis dikarenakan bahwa Kompas.com merupakan media yang paling banyak dibaca oleh para pembaca, terkhusus dalam ruang lingkup mengenai berita politik. Hal ini menjadi daya Tarik tersendiri bagi peneliti dikarenakan Kompas.com banyak dilihat dan dibaca oleh para pembaca berita yang notabene media Kompas.com tidak sembarangan dalam menulis berita. Selanjutnya, dalam kondisi dunia Politik pada Pemilu 2024 ini, Okezone.com dinilai menjadi media yang bisa dibilang kontra terhadap segala macam pemberitaan terkait rezim Joko Widodo, terutama pada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang notabene kedua Capres dan Cawapres tersebut berada di pihak Joko Widodo. Faktor kepemilikan media berita Okezone.com juga dinilai sangat berpengaruh terhadap penulisan redaksi yang dinilai selalu mempunyai kepentingan atau agenda tersendiri dalam berpolitik. Harry Tanoesoedibjo yang merupakan pemilik dari Okezone.com dan MNC Group pada kondisi politik pada pemilu 2024 sebagai Ketua partai Perindo, posisinya sebagai lawan terhadap Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming (MNC Sekuritas, 2020). Palsunya, Partai Perindo masuk ke dalam koalisi Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi bersama partai PDI Perjuangan. Perihal itu semua, alasan penelitian yang berjudul "Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perubahan Peraturan Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres" ini dikaitkan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ingin mencari tahu apakah aktor politik dinasti pada penelitian terdahulu dirasa masih ada atau tidak dalam pemberitaan penelitian sekarang, dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan peraturan batas usia Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Pemahaman ini menjelaskan bawah media massa yang peneliti pilih yaitu Okezone.com diduga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk cara berpikir masyarakat yang mengkonsumsi berita dari media tersebut

menghasilkan membuat masyarakat mempunyai sudut pandang yang berbeda, setelah membaca berita di Okezone.com terkait pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan peraturan batasan usia minimal Calon 8 wakil Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Hal ini bisa didasari terkait teori yang dikenalkan oleh McCombs dan Shaw, yang menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk membuat masyarakat yang mengkonsumsinya bisa menilai sesuatu yang penting berdasarkan yang dikatakan oleh media. Peneliti memilih Kompas.com dalam penelitian yang berjudul "Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perubahan Peraturan Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres" dikarenakan Konsep pemberitaan dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana media massa, khususnya platform online seperti Kompas.com dan Okezone.com, menyampaikan informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan peraturan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Konsep pemberitaan ini mencakup bagaimana Kompas.com dan Okezone.com mbingkai suatu isu, menentukan agenda, menyajikan pandangan pro dan kontra hingga menggunakan penulisan Bahasa dan retorika sesuai tujuan dalam penulisan kedua media, hal ini masuk kedalam konsep suatu pemberitaan dalam penelitian Framing. Kompas.com merupakan situs berita terkemuka di Indonesia dengan reputasi yang kuat, peneliti juga percaya bahwa dengan menggunakan sumber media yang terpercaya akan meningkatkan kredibilitas penelitian yang akan peneliti tulis. Kompas.com juga dirasa menyediakan arsip berita yang luas dan mudah diakses secara daring, hal ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang amat relevan untuk penelitian ini. Tidak hanya itu, Kompas juga memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi opini publik, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana isu tersebut di-frame dalam pemberitaan Kompas.com untuk memahami narasi dan persepsi yang akan disampaikan kepada para pembaca. Yang terpenting menurut peneliti adalah banyaknya ketersediaan Analisis Framing yang tersedia didalam penulisan setiap berita di Kompas.com. Media ini

sering kali menggunakan berbagai kerangka framing dalam pemberitaannya, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana isu tentang pemberitaan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia minimal Capres dan Cawapres tersebut di-frame dalam pemberitaan Kompas.com, notabennya adalah Kompas merupakan salah satu media terbesar di Indonesia, memahami narasi dan persepsi yang disampaikan oleh Kompas.com kepada pembaca merupakan salah satu faktor ketertarikan peneliti 9 memilih Kompas.com sebagai sandingan media dari Okezone.com. Dengan memilih Kompas.com sebagai sumber data, peneliti mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana pemberitaan media memengaruhi cara masyarakat memahami keputusan penting dari institusi seperti Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, peneliti dalam memilih media kedua untuk melakukan komparasi dengan Okezone.com, yaitu peneliti memilih media Kompas.com, Alasan peneliti memilih media tersebut yaitu dikarenakan Peneliti ingin mengetahui terkait pembingkaihan penulisan berita putusan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan batasan usia Calon Presiden dan Calon wakil Presiden, apakah Kompas.com menulis kata-kata dalam pemberitaan sesuai dengan realitas atau kejadian yang ada dan sesuai fakta atau malah sebaliknya. Tidak hanya itu, Okezone.com dan Kompas.com juga dinilai memiliki perbedaan yang mencerminkan identitas masing-masing media dalam gaya penulisan. Kompas.com cenderung menggunakan bahasa yang formal, terstruktur dan berfokus pada kejelasan dan ketepatan informasi, artikel berita cenderung menggunakan bahasa baku dan memiliki gaya penulisan yang lebih serius. Okezone.com dikenal cenderung menggunakan bahasa yang santai ekspresif dan bersemangat. Artikelnya juga dikenal memiliki tone yang lebih beragam, dari pemberitaan penulisan yang serius hingga yang humoris, tergantung kepada topik yang dibicarakan. Dalam segi penulisan panjang dan kedalaman artikel berita, kedua media ini juga terdapat beberapa perbedaan. Okezone.com cenderung memberikan liputan yang lebih singkat dan ringkas yang bertujuan untuk penulisan yang padat dan langsung ke inti informasi, tanpa terlalu banyak penjelasan atau analisis yang mendalam,

berbeda dengan kompas.com yang cenderung menulis dengan gaya lebih mendalam dan terperinci tentang topik-topik berita yang ditulis. Artikel beritanya lebih panjang dan mencakup lebih banyak detail serta analisis. Objektivitas berita merupakan suatu nilai dan juga moral yang dipegang oleh wartawan dalam menulis suatu berita dan tidak menimbulkan gangguan kepada pola pikir dan emosi yang berbeda, yang tidak sesuai dengan realitas atau peristiwa yang sudah terjadi. Berita adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai berita yang dianut oleh jurnalis dan organisasi media (Herbert J. Gans, 2017). Ini adalah produk dari pilihan-pilihan yang dibuat dalam proses pengumpulan dan penyebaran informasi. Dalam penyampaian tersebut memunculkan arti bahwa diharapkan kedua media yang dipilih dalam penelitian ini, bisa membingkai berita dalam penulisannya sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam kejadian terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan batasan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sehingga para pembaca atau pengkonsumsi kedua media tersebut tidak menghasilkan opini-opini liar dan tidak bertanya-tanya terkait hasil

1.4.1 Manfaat Akademis Peneliti berharap dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai pentingnya media untuk melakukan Framing yang faktual dan memperkaya penelitian, khususnya dalam konteks Framing tokoh antara media online dan media pemberitaan umum. Tidak hanya itu, ada manfaat akademis 11 dari penulisan pemberitaan dalam media terkait pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan aturan batasan usia Calon Presiden dan Calon wakil Presiden pada Pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah, bagaimana pembedaan berita Okezone.com dan Kompas.com pada kasus Pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia Capres dan Cawapres pada Peraturan Undang-Undang no 7 Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian Mengetahui hasil pembedaan media Okezone.com dan Kompas.com dalam kasus pemberitaan yang kontroversial, yaitu perihal kasus Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia Capres dan

Cawapres pada Peraturan Undang-Undang no 7 Tahun 2017. 1.4 Manfaat Penelitian yang bisa dirasakan oleh peneliti adalah mengenai pembelajaran redaksi penulisan berita dalam pembelajaran berprofesi sebagai seorang redaksi dalam perusahaan media berita. 1.4.2 Manfaat Praktis Secara praktis, temuan ini diharap mampu menambah edukasi kepada 12 para masyarakat mengenai penilaian dan analisa dalam mengkonsumsi media berita dan juga peneliti berharap masyarakat dapat mengambil kesimpulan yang tidak merugikan dan merusak nilai sumber informasi yang ada di media berita, sehingga tidak terjadinya persebaran informasi yang tidak benar. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori framing dan jurnalisme online, memberikan dasar untuk studi lebih lanjut. Peneliti lain dapat menggunakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi untuk studi mereka sendiri. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi interdisipliner yang komunikasi, ilmu politik, dan sosiologi.

6 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu No Judul | Penulis | Tahun Afiliasi Universitas
Metode Penelitian Kesimpulan Saran Perbedaan dengan Skripsi ini 1
Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi
Bansos Juliari Batubara Di Kompas 6 Com Dan BBC Indonesia Com | Intan
Leliana, Panji Suratradi, Edward Enrieco | 2021 Universitas Bina

Sarana Dan Informatika Pendekatan Kualitatif dengan metode fra ming, Robert N Entman Setelah melalui beberapa analisa pada pemberitaan tersebut, maka berdasarkan hasil analisa. framing dalam penelitian ini, maka sangat jelas terlihat bahwa peran media tidak sebatas sebagai penyampai informasi, perkembangan zaman menuntut media menjalankan peran 'watch dog' atau anjing penjaga serta mengontrol bagi pemerintah dan Lembaga terkait atas dalam merumuskan setiap kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media Kompas.com dan BBCIndonesia.co m memberikan ruang informasi dan klarifikasi bagi pemerintah dan Lembaga KPK untuk melakukan segala

REPORT #22148071

upaya penertiban dan pengangulangan masalah korupsi dana bansos covid 19 Melalui temuan penelitian ini, peneliti menyarankan media mampu membantu pemerintah sebagai perpanjangan tangan bukan saja menyampaikan pesan pesan yang kontroversial tetapi juga konten berita yang positif sehingga mam pu berjalan searah dengan pemerintah dalam upaya menghentikan, meringankan dan menanggulangi kasus Covid 19. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai segi kasus yang akan diteliti akan tetapi memiliki kesamaan jenis pemberitaan politik. Peneliti terhadap meneliti kasus mengenai Korupsi bansos Juliari Batubara dengan framing dua media berita, yaitu Kompas.com dan BBC Indonesia.com. 2

ANALISIS FRAMING MODEL ROBERT ENTMAN MENGENAI MEDIA ONLINE KOMPAS.CO M DAN LIPUTAN6.C OM DALAM MENAMPILK AN TAYANGAN PEMBERITA AN TENGGELAM NYA JAKARTA TAHUN 2023- 2050 | Gusti Bagus Rian Setiawan, Mayasari, Eka Yusup| 2023 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Penelitian ini mengguakan pendekatan penelitian Kualitatif dengan metode Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberitaan Jakarta Tenggelam dalam 10 Tahun ke Depan di Kompas.com dan Liputan6.com menggunakan analisis framing model Robert Entman, maka dapat disimpulkan framing di kedua media tersebut dengan elemen framing sebagai berikut 1) Define Problem yaitu pendefinian masalah oleh Kompas.com memaknai pidato Joe Biden mengenai tenggelamnya Jakarta sebagai tantangan bersama untuk seluruh dunia, sedangkan Liputan6.com memaknai pidato Joe Biden sebagai seruan untuk Pemprov Jakarta untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. 2) Diagnose Cause yaitu Kompas.com menjadikan pidato Joe Biden tentang tenggelamnya Jakarta dalam kurun waktu 10 tahun kedepan akibat pemanasan global sebagi penyebab masalah. 3) Make Moral Judgement yaitu penilaian moral yang terdapat Pada penelitian ini, ditemukan adanya sejumlah perbedaan sudut pandang antara Kompas.com dan Liputan6.com dal am memberitakan Jakarta tenggelam dalam kurun waktu 10 tahun kedepan. Perbedaan ini dapat terjadi karena setiap media mempunyai pandangan masing masing dalam melihat suatu

REPORT #22148071

peristiwa Peneliti menyarankan bahwa Pandangan yang dihasilkan itu yang akan menentukan bagaimana media membingkai berita sebelum disampaikan masyarakat luas/. Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini yaitu jenis berita atau kasus yang diangkat bukan jenis berita Politik, akan tetapi isu lingkungan. Media berita yang dipakai menggunakan 2 media berita, yaitu Kompas.com dan Liputan6.com, berbeda dengan skripsi ini. dalam Kompas.com adalah bahwa Jakarta tidak akan tenggelam seluruhnya namun hanya beberapa wilayah yang berpotensi saja seperti wilayah pesisir Jakarta. 3 FRAMING MEDIA ONLINE LIPUTAN6.COM TERHADAP PEMBERITAAN CAPRES MUHAIMIN ISKANDAR PADA PILPRES 2024 | Dzika Fajar Alfian Ramadhani, Dwi Wahyu | 2022. Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis framing yang dikenalkan Menurut Pan dan Kosicki. Dalam penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bagaimana media online Liputan6.com memberikan framing kepada masyarakat terkait Muhaimin Iskandar yang mendapat dukungan dari tokoh agama, terutama di daerah Jawa Tengah seperti dukungan dari para kyai NU yang ada di kabupaten Wonosobo dengan pertemuan antar tokoh agama NU, selain itu Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari Rois Syuriah PCNU kabupaten Kudus yaitu KH.M Ulil Albab Arwani. Peneliti menyarankan kepada Liputan6.com bahwa Framing yang disampaikan Liputan6.com pada saat ini, terhadap Muhaimin belum bisa dibuktikan secara faktual yang artinya belum tentu Muhaimin Iskandar akan menjadi calon Presiden 2024. Hal tersebut dikarenakan jangka waktu pilpres yang masih panjang dan belum berjalanya mekanisme terkait pendaftaran calon presiden. Yang paling penting Framing yang ditujukan kepada Muhaimin Iskandar adalah pemberitaan yang mewarnai pesta demokrasi negara Penelitian terdahulu ini menggunakan metode Analisis Framing Pan & Kosicki, berbeda dengan Skripsi peneliti yang menggunakan metode yang sama. Walaupun jenis kasus peneliti terdahulu ini sama dengan skripsi peneliti, yaitu dalam konteks Berita Politik cawapres untuk Pemilu 2024.



13 Dalam penelitian terdahulu, penelitian pertama yang berjudul “Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.com dan BBCIndonesia.com” Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara dalam program Bansos pada dua media yang berbeda, yaitu media daring Kompas.com dan BBCIndonesia.com. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis framing Robert N. Entman. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dukungan analisis dan sebagai acuan agar Peneliti dapat memahami serta menjawab beberapa fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini. Teori dan konsep yang akan diterapkan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 15 Selanjutnya, pada penelitian kedua dalam tabel penelitian terdahulu, yang berjudul “Analisis Framing Model Robert N Enmant Mengenai Media Online Kompas.com Dan Liputan6.com Dalam Menampilkan Tayangan Pemberitaan Tenggelamnya Jakarta Tahun 2023-2050” dalam penelitian ini, peneliti memilih objek yang diteliti yaitu terkait pemberitaan isu lingkungan tentang tenggelamnya jakarta. 6 21 25 26 Peneliti menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis framing model Robert N. Entman. Pada penelitian yang terakhir dalam tabel penelitian terdahulu, dengan judul “Framing Media Online Liputan6.com Terhadap Pemberitaan Capres Muhaimin Iskandar Pada Pilpres 2024” Dalam penelitian ini, objek yang diteliti yaitu mengenai tentang sudut pandang pemneritaan di Liputan6.com terkait Calon presiden Muhaimin Iskandar Pada Pilpres 2024 nanti. 16 21 24 25 26 33 37 Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis framing menggunakan teori Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. 2.2 Teori dan Konsep Peneliti akan menerapkan berbagai teori dan konsep yang diambil dari penelitian sebelumnya untuk menganalisis Framing dalam pemberitaan media. 2.2.1 Jurnalisme Online Saat ini, Informasi tersebar tidak hanya melalui media cetak saja, seperti koran, majalah, surat edar atau pun media cetak

lainnya seperti media elektronik konvensional saja. Informasi penyebaran dapat digunakan dengan jenis media baru yang dapat memudahkan untuk mendapatkan suatu informasi yang ingin dicari. Media online merupakan jenis media yang banyak dikonsumsi pada era sekarang ini. Media online menggunakan internet sebagai wadah penyambung kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang bersifat online. Media online memungkinkan penyampaian berita secara real-time, memberikan pembaruan segera kepada audiens tentang peristiwa yang sedang berlangsung, hal ini dapat diartikan bahwa media online mempunyai banyak manfaat dan kemudahan dalam mengkonsumsinya, mulai dari dapat diakses dan didapatkan, mudah untuk dibaca dimanapun dan kapanpun, mudah dikonsumsi berulang-ulang kali, tidak kenal batas waktu dan usia (Howard Tumber dan Barbie Zelizer, 2017). 30 Dalam pembentukan pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas, jurnalisme online memiliki beberapa ciri khusus. Banyak jenis media online yang sudah tersedia, mulai dari berbagai jenis berita politik, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan hingga sosial. Proses pembuatan jurnalisme online pun sangat cepat. Dalam penulisannya, berita online tidak memakan waktu seharian seperti layaknya surat kabar yaitu koran. Penulisan untuk beritanya pun berbeda dengan media konvensional seperti koran. Jurnalisme online memiliki penulisan yang serba padat, tidak memakan banyak halaman seperti halnya media konvensional yaitu koran. Kelebihan secara visual dalam jurnalisme online pun sangat banyak, salah satunya adalah bisa memberikan bukti video yang diberitakan, tidak hanya gambar saja seperti layaknya media konvensional yaitu koran. Kekurangan yang ada di media konvensional yaitu koran, bisa segera ditutupi dengan media jurnalisme online. Teori Viralitas dalam jurnalisme online menjelaskan bagaimana informasi atau konten menyebar dengan cepat dan luas melalui platform digital, terutama media sosial. Informasi yang viral biasanya memiliki elemen yang menarik perhatian, memicu emosi, atau mengundang partisipasi aktif dari audiens. Dalam konteks penelitian ini, teori viralitas dapat

menjelaskan bagaimana berita terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimal calon presiden dan 16 wakil presiden menyebar dan memengaruhi opini publik. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu dalam segi faktor penyebaran informasi yang cepat, pemicu emosi dalam kasus yang ada sesuai dengan realitas politik yang ada di Indonesia. Tidak hanya Teori Viralitas dalam konsep Jurnalisme Online, akan tetapi ada beberapa point teori juga yang masuk kedalam penelitian ini (Paul Bradshaw, 2017), yaitu adalah: 1. Kecepatan dan Aktualitas Jurnalisme online memiliki keunggulan dalam kecepatan penyampaian informasi. Media online dapat memperbarui berita secara real-time, yang memungkinkan pembaca mendapatkan informasi terkini tentang putusan MK dengan segera. Relevansinya adalah Kecepatan ini memungkinkan media untuk memberikan liputan yang cepat tentang putusan MK, protes yang terjadi, dan reaksi dari berbagai pihak. 2. Interaktivitas Interaktivitas adalah salah satu ciri khas jurnalisme online, di mana pembaca dapat berpartisipasi dalam diskusi melalui komentar, like, share, dan feedback. Relevansinya adalah pembaca dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang putusan MK, baik yang pro maupun yang kontra, di platform media sosial terkait berita tersebut. Ini juga memungkinkan pengumpulan data tentang opini publik secara real-time. 3. Multimedia Jurnalisme online sering memanfaatkan berbagai format multimedia, seperti teks, gambar, video, dan infografis untuk menyampaikan berita. Relevansinya adalah media online dapat menggunakan video protes, infografis tentang perubahan aturan, dan wawancara dengan pakar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu tersebut. 4. Personalisasi Media online dapat menargetkan konten sesuai dengan preferensi dan perilaku pembaca menggunakan algoritma dan analisis data. Relevansinya adalah berita tentang putusan MK dapat disesuaikan dengan minat pembaca, misalnya dengan menampilkan lebih banyak konten terkait politik atau hukum jika itu adalah preferensi mereka. 17 Jurnalisme online adalah bentuk jurnalisme yang menggunakan

internet sebagai media utama untuk menyampaikan berita. Teori ini mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan distribusi berita, interaktivitas, multimodalitas (penggunaan teks, gambar, video), serta potensi viralitas konten. Teori jurnalisme online memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana Okezone.com dan Kompas.com membongkai berita terkait putusan MK. Dengan menganalisis kecepatan, interaktivitas, multimodalitas, dan viralitas, penelitian ini dapat mengungkap strategi dan dampak framing dalam konteks media digital dalam berita yang mengenai tentang putusan MK dalam perubahan peraturan batasan usia minimal capes dan cawapres pada pemilu 2024.

2.2.2 Berita Berita merupakan suatu informasi baru atau lama, sesuatu informasi yang sedang terjadi yang menceritakan informasi mengenai peristiwa ataupun kejadian, yang secara penuh disampaikan kepada orang lain atau masyarakat luas, dalam bentuk tertulis, suara maupun visual. Berita adalah suatu informasi yang sangat penting yang dapat menggugah rasa ingin tahu dan memperdalam pemahaman seseorang. Menurut Kamus Internasional The New Glorier Webster, istilah berita merujuk pada data yang samar terkait dengan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui.

Sebaliknya, pengertian jurnalisme menurut definisi jurnalis dan reporter adalah, jurnalisme merupakan pelaporan faktual dari suatu kisah atau kejadian yang signifikan dan memberikan informasi bagi banyak pembaca serta menyoroti pentingnya topik yang dibahas, hal ini sesuai dengan dasar referensi dari Mitchel V. Charnley. Dapat diartikan juga yaitu berita merupakan suatu informasi tentang fenomena atau insiden yang benar-benar berlangsung dan akan berlangsung maupun telah berlangsung. Dibungkus dalam bentuk suatu informasi sehingga seseorang bisa mencerna informasi tersebut dan bisa diinformasikan lagi dari mulut ke mulut oleh orang lain.

18 2.2.2.1 Jenis Berita Ada banyak jenis pemberitaan yang bisa dibuat dan dikonsumsi oleh para masyarakat. Berita yang pertama yaitu yang ditulis secara lugas dan mencakup rincian tentang subjek, tanggal, lokasi, dan rincian apa pun yang



relevan. Hard news adalah berita yang melaporkan peristiwa aktual, signifikan, dan berdampak langsung, seperti berita politik, ekonomi, kriminal, dan bencana (Wilson Lowrey final, yang sering juga disebut berita investigatif, adalah informasi yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan analisis atau penyelidikan dari berbagai sumber. Hal ini terkadang disebut sebagai "kerja kolaboratif" karena karyawan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, bahkan terkadang melakukan penelitian mendalam di lapangan, dimulai dari data atau artikel berita yang tidak dipublikasikan. 19 dan Peter J. Gade, 2017). Hard news berfokus pada penyampaian fakta yang akurat dan segera dengan tujuan memberikan informasi penting yang relevan dengan kebutuhan publik untuk membuat keputusan. Dapat diartikan bahwa berita ditulis dengan gaya yang menekankan penekanan pada cerita dengan cara apa pun yang memungkinkan, tanpa terjebak dalam penjelasan atau interpretasi. 15 24 Ada dua jenis berita yang masing-masing tergolong soft news dan hard news yaitu lembut atau ringan dan keras atau hangat. Yang kedua adalah jurnalisme opini, atau berita tentang opini, kepercayaan, atau pengalaman masyarakat. Terakhir, Mendalam berita, yang sering disebut dengan "berita mendalam", adalah informasi yang sudah muncul ke permukaan dan didasarkan pada fakta-fakta yang berada di bawah permukaan tertentu. Mulailah dengan cerita yang belum selesai penulisannya dan bisa dilanjutkan nanti (sistem tindak lanjut). 15 Pendalaman dilakukan dengan mencari informasi yang relevan dari artikel berita atau sumber. Berita Penjelasan, kadang-kadang disebut "berita penjelasan", adalah jenis berita yang pada hakekatnya mengklarifikasi sesuatu dengan menyajikan analisis fakta tertentu yang panjang dan komprehensif. Fakta dijelaskan secara gamblang dengan sedikit argumentasi atau bukti dari penulis. Jenis informasi ini biasanya sensitif, oleh karena itu harus ditangani dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. 17 Dan yang dimaksud dengan Berita Penyelidikan Informasi juga dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu Hard News dan Soft News. Hard News adalah berita yang

berfokus pada peristiwa atau kejadian yang penting, serius, dan terkini. Subjeknya biasanya terakut kepada politik, ekonomi, hukum, kejahatan, bencana alam, atau peristiwa internasional. Berita jenis ini juga disajikan secara langsung, objektif dan singkat. Tujuan utamanya yaitu adalah menyampaikan fakta atau kebenaran terkini dan relevan dengan jelas dan cepat. Berita tersebut juga biasanya memiliki penulisan piramida terbalik, dimana informasi terpenting ditempatkan dibagian awal pemberitaan dan diikuti dengan informasi tambahan yang lebih mendetail. Berita Soft News merupakan berita yang berfokus pada topik-topik yang lebih ringan, menghibur atau mudah menarik perhatian para pembacanya (Vina Karlameta Suhadi, 2023). Subjeknya dapat meliputi budaya pop, hiburan, gaya hidup, kisah inspiratif, atau kejadian-kejadian unik yang tidak terlalu serius yang bersifat menghibur dan memberikan edukasi kepada para pembaca berita. Berita ini biasanya disajikan dengan gaya naratif atau feature yang lebih menarik. Tujuannya adalah untuk menghibur, menginspirasi atau memancing perasaan empati atau simpati para pembaca berita. Tidak hanya itu, berita Soft News memiliki karakteristik yang cenderung memiliki banyak ruang untuk penjelasan, wawancara, dan pendekatan yang lebih subjektif. Dalam penelitian mengenai framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan usia minimal capres dan cawapres, analisis jenis berita yang digunakan oleh Okezone.com dan Kompas.com sangat relevan. Pemahaman tentang jenis berita membantu mengungkap bagaimana media membingkai informasi dan mempengaruhi persepsi publik. Dalam penelitian mengenai framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan usia minimal capres dan cawapres, analisis jenis berita yang digunakan oleh Okezone.com dan Kompas.com sangat relevan. Pemahaman tentang jenis berita membantu mengungkap bagaimana media membingkai informasi dan mempengaruhi persepsi publik. Teori jenis berita sangat penting dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana Okezone.com dan Kompas.com membingkai berita terkait putusan MK. Dengan

menganalisis jenis berita yang digunakan, peneliti dapat mengungkap gaya penulisan, fokus pemberitaan, dan pengaruh framing terhadap persepsi publik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana media dapat menggunakan berbagai jenis berita untuk membentuk narasi dan opini publik mengenai isu-isu penting.

2.2.2.2 Nilai Berita

Suatu berita pasti mempunyai nilai berita, nilai berita merupakan suatu bukti konteks yang memadai dan menyelidiki isu secara lebih mendalam. Berita yang hanya menyajikan informasi secara permukaan tanpa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang dan implikasi suatu peristiwa memiliki nilai berita yang rendah.

- Relevansi. Berita yang relevan adalah berita yang penting atau bermanfaat bagi pembaca. Nilai berita dapat meningkat jika informasi tersebut mengandung informasi yang benar, informasi yang dapat dikonsumsi oleh khalayak ramai. Berita bisa dinilai bahwa berita tersebut merupakan berita yang bagus dan tidak hoaks yaitu dari kriteria nilai beritanya tersebut.

Nilai berita terbagi menjadi 4 point (Khoirul Muslimin, 2019), yaitu:

- Aktualitas, merupakan peristiwa atau berita terbaru, sedang hangat-hangatnya atau tidak ketinggalan zaman.
- Faktual, yaitu berita harus memuat informasi yang sebenar-benarnya terjadi, bukan dalam bentuk fiksi ataupun karangan, khayalan atau rekaan. Berita tersebut harus benar-benar muncul dari peristiwa yang ada, dan bukan dari khayalan seseorang, berita bisa dikatakan faktual yaitu dengan adanya kejadian nyata, pendapat seseorang saksi kejadian, atau pernyataan dari seseorang di dalam kejadian atau peristiwa tersebut. Nilai berita selanjutnya yaitu adalah Objektivitas. Berita yang objektif dapat menyajikan informasi tanpa bias atau dengan sudut pandang yang terlalu condong ke arah tertentu. Keseimbangan dalam penyajian fakta dan sudut pandang yang beragam dirasa dapat meningkatkan nilai berita. Konteks dan Kedalaman. Berita yang bernilai dapat memberikan yang disajikan dalam berita tersebut memiliki implikasi langsung atau relevan dengan kehidupan sehari-hari atau isu yang sedang terjadi. Penelitian mengenai

framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan usia minimal capres dan cawapres melibatkan analisis terhadap dua media online, yaitu Okezone.com dan Kompas.com. Dalam konteks ini, teori nilai berita sangat relevan untuk memahami faktor-faktor yang peristiwa politik, khususnya di tanah air, Indonesia. Berita politik itu sendiri mempunyai banyak berbagai macam cara penulisan. Salah satunya yaitu bagaimana suatu media menuliskan pemberitaan politik dalam asas keadilan dan tidak memihak kepada siapapun. Banyak konsep atau tema yang bisa diangkat dalam sudut pandang politik untuk dijadikan berita atau sumber informasi. Biasanya, isi dalam pemberitaan berita politik terbagi ke banyak hal, yaitu yang pertama adalah mulai dari berita 22 membuat suatu berita dianggap penting dan menarik bagi media serta audiens. Teori nilai berita sangat relevan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana Okezone.com dan Kompas.com membingkai berita terkait putusan MK. Dengan menganalisis faktor-faktor nilai berita seperti signifikansi, prominensi, konflik, dan human interest, penelitian ini dapat mengungkap strategi editorial dan fokus pemberitaan kedua media. Penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai berita dapat mempengaruhi cara media menyajikan informasi dan membentuk persepsi publik mengenai isu-isu penting.

2.2.2.3 Berita Politik Dalam penulisan berita, banyak tema berita yang bisa ditulis oleh para jurnalis media online. Mulai dari yang bertemakan olahraga, agama, pendidikan, kesehatan, hiburan hingga sosial. Akan tetapi tidak lupa dengan berita politik. Berita politik adalah laporan tentang dinamika kekuasaan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan (Daniel C. Hallin, 2022). berita politik tidak hanya meliput peristiwa resmi, tetapi juga menganalisis konteks dan implikasi dari peristiwa tersebut. Berita politik merupakan suatu pemberitaan yang bertuliskan mengenai berbagai macam tentang peristiwa atau kegiatan dalam berpolitik. Peristiwa atau kegiatan berpolitik banyak disorot oleh media berita dan dijadikan sebagai bahan pemberitaan untuk informasi masyarakat luas, contohnya

adalah kejadian atau peristiwa pemilu, pergantian presiden, sidang rapat paripurna dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah dalam sudut pandang lembaga politik. Politik terdiri dari berbagai macam lembaga dan elemen didalamnya. Biasanya, media juga membuat berita tentang lembaga-lembaga yang ada di politik, contohnya adalah ketika salah satu lembaga yang ada di lingkaran politik yaitu KPK. Ketika KPK sedang mempunyai banyak agenda dan kasus yang sedang dikelarkan, maka banyak media yang ikut meliput dan membuat berita tentang lembaga tersebut. Selanjutnya, media bisa menulis berita politik dalam sudut pandang kasus. Banyak kasus-kasus yang terjadi di politik, salah satu kasus terbanyak yang terjadi dalam sudut pandang atau unsur politik yaitu adalah kasus korupsi, biasanya media akan menyorot kasus korupsi tersebut dan dijadikan bahan berita, mulai dari awal muula terjadinya korupsi, hingga pelaku kasus korupsi, akan bisa dijadikan sumber informasi kepada para masyarakat. Terakhir, unsur berita politik yang banyak ditulis oleh rekan-rekan redaksi yaitu adalah dalam hal individu atau tokoh yang berperan di dalam politik Indonesia, salah satu contohnya adalah Puan Maharani. Tokoh politik tersebut merupakan tokoh yang sering dijadikan bahan pemberitaan oleh banyak media khususnya dalam tema politik. Dalam pemberitaan tokoh politik, biasanya media mempunyai gaya penulisannya masing- masing. Ada media yang menitikberatkan kepada pemberitaan prestasi hingga kasusnya, ada juga media yang lebih menitikberatkan penulisan berita lebih kepada latar belakang atau informasi asal usul tokoh politik tersebut, biasanya media tersebut menuliskannya lebih ke sepaik terjang dalam dunia perpolitikannya. Penelitian mengenai framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan usia minimal capres dan cawapres memerlukan pemahaman mendalam tentang teori berita politik. Teori ini membantu menganalisis bagaimana isu-isu politik disajikan oleh media dan bagaimana framing tersebut mempengaruhi opini publik. Teori berita politik sangat relevan dalam penelitian ini untuk menganalisis

bagaimana Okezone.com dan Kompas.com 23 membingkai berita terkait putusan MK. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti framing, agenda setting, priming, dan bias media, penelitian ini dapat mengungkap strategi pemberitaan kedua media dan bagaimana mereka mempengaruhi persepsi publik mengenai isu-isu politik penting. Penelitian ini menunjukkan bagaimana media memainkan peran kunci dalam membentuk narasi politik dan opini publik. mempunyai agendanya masing-masing untuk memberikan prioritas kepada siapa mereka menentukan tujuan informasi yang dibuat oleh kedua media tersebut dalam laporan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024.

b. Agenda Publik, yaitu media massa menulis berita pada saat itu. Dengan demikian, mereka akan mempengaruhi publik, sehingga akan

2.2.3 Agenda Setting Teori Penentuan agenda, didasarkan atas tujuan tertentu atau yang sering lebih disebut sebagai teori Agenda Setting didefinisikan suatu teori yang menyatakan bahwa media umum, khususnya berita, adalah hana kebenaran. Dengan kemampuan media massa yang sangat besar dan berpengaruh kepada para khalayak masyarakat luas untuk mentransfer dua elemen yaitu informasi dan kesadaran ke dalam agenda publik yang telah direncanakan oleh suatu kalangan tertentu dengan mengabdikan publik terhadap perhatiannya kepada lampro pemberitaan yang akan dipublikasi, tiap media mempunyai agendanya sendiri sesuai dengan tujuan media massa tersebut. Terdapat pengembangan tiga tahap proses Dalam Agenda Setting, yang mencakup Agenda Media, Agenda Publik, dan Agenda Kebijakan (Eriyanto, 2018), berikut terlampir penjelasannya: a. agenda, yaitu merupakan penentuan prioritas oleh media atau menentukan apa yang dianggap penting oleh media. ada penelitian ini, bagaimana media online Tvnews dan BBC Indonesia menghasilkannya pengaruh dalam pikiran publik dan diakhiri dengan keberhasilan agenda publik yang sudah

direncanakan. Penelitian ini menganalisis agenda setting dan framing pemberitaan publik dalam berita tentang Putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres adalah pelaksanaannya Pemilu 2024 yang berlangsung pada Februari tahun 2024. Agenda Kebijakan, merupakan agenda publik yang berorientasi pada era demokrasi dengan adanya pengambilan kebijakan, yang dipengaruhi oleh pengambilan kebijakan, yaitu pemerintah. Dengan adanya proses interaksi tersebut, akan menghasilkan agenda kebijakan. Penelitian ini merupakan reaksi dari instansi hukum yaitu Mahkamah Konstitusi dan Partai Politik di Indonesia dengan keterkaitannya berupa putusan perubahan peraturan oleh Mahkamah Konstitusi menguji peraturan mengenai pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks pemilu 2024. Dampak penetapan agenda terdiri dari dampak langsung dan jangka panjang (efek selanjutnya). Dampak penelitian ini dapat digambarkan berkaitan dengan isu politik yang sedang dihadapi. Di sisi lain, efek akhir adalah persepsi atau pemahaman tentang subjek yang dipelajari secara metodis sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, efek lanjutan dalam Agenda Setting yaitu adanya sudut pandang yang berbeda kepada masyarakat yang mengkonsumsi berita yang akan diteliti, yaitu berita tentang Pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan peraturan batas usia minimal Capres dan Cawapres. Penelitian mengenai framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan usia minimal capres dan cawapres melibatkan analisis bagaimana dua media online, Okezone.com dan Kompas.com, menyajikan isu tersebut. Teori agenda setting sangat relevan dalam konteks ini karena membantu memahami bagaimana media dapat mempengaruhi prioritas isu dalam pikiran publik. Teori agenda setting sangat relevan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Okezone.com dan Kompas.com membingkai berita terkait putusan MK. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti penentuan prioritas isu dan pembingkai

atribut isu, penelitian ini dapat mengungkap strategi pemberitaan kedua media dan bagaimana mereka mempengaruhi persepsi publik mengenai isu-isu politik penting. Penelitian ini menunjukkan bagaimana media memainkan peran 25 kunci dalam menentukan agenda publik dan membentuk opini publik melalui prioritas dan fokus liputan mereka. 2.2 **3** **4** Media Massa

Media massa merupakan sebuah sistem komunikasi yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak secara meluas melalui berbagai platform seperti cetak (surat kabar, majalah), elektronik (televisi, radio), dan digital (internet). **17** **27** Berita juga dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Hard News dan Soft News. **3** **18** Media massa merupakan alat komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak secara luas melalui berbagai platform seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan internet. Tanggung jawab utama media massa terletak pada penyajian informasi yang tepat, obyektif, dan mengikuti prinsip etika, khususnya dalam konteks pemberitaan. Media Massa berita adalah salah satu bentuk dari media massa yang secara khusus menyajikan informasi aktual, berita, dan liputan terhadap peristiwa atau kejadian terkini yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Media massa yang dipilih oleh peneliti seperti Okezone.com dan Kompas.com mempunyai kepemilikan yang berbeda yang menghasilkan karakteristik tersendiri dalam menyusun atau membuat berita. Dalam informasi yang diambil dari situs Wikipedia, Kompas.com adalah kepunyaan dari PT Kompas Media Nusantara, sebuah badan hukum yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group, sebuah konglomerasi media ternama di Indonesia yang didirikan oleh P.K. Ojong dan Jakoeb Oetama pada tahun 1963. Sebagai perusahaan media terkemuka di Indonesia, Kompas Gramedia Group dikenal dengan kualitas dan integritas dalam penyajian berita, informasi dan konten lainnya kepada masyarakat Indonesia. Berdasarkan laman utama Okezone.com, media ini merupakan bagian dari MNC media, grup media besar di Indonesia. MNC media dimiliki oleh MNC Group. Individu yang memiliki kepemilikan saham dan kendali atas berbagai perusahaan di

sektor media, properti, keuangan, dan hiburan di Indonesia adalah Hary Tanoesoedibjo, yang dikenal sebagai seorang konglomerat. Okezone.com menjadi salah satu dari banyak platform media digital yang dimiliki dan 26 dioperasikan oleh MNC Media. Kepemilikan Okezone.com secara langsung terhubung dengan struktur perusahaan MNC Media dan MNC Group. Penelitian mengenai framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan usia minimal capres dan cawapres melibatkan analisis terhadap dua media online, yaitu Okezone.com dan Kompas.com. Teori media massa sangat relevan untuk memahami peran dan dampak media dalam membingkai isu-isu politik yang penting seperti ini. Teori media massa sangat 27 relevan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Okezone.com dan Kompas.com membingkai berita terkait putusan MK. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti framing, agenda setting, spiral of silence, uses and gratifications, dan konstruktivisme sosial, penelitian ini dapat mengungkap strategi pemberitaan kedua media dan bagaimana mereka mempengaruhi persepsi dan opini publik mengenai isu-isu politik penting. Penelitian ini menunjukkan bagaimana media memainkan peran kunci dalam membentuk narasi politik dan realitas sosial. 2.3

Kerangka Berpikir Dalam kerangka berfikir dalam penelitian yang berjudul “Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perubahan Peraturan Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres ini dapat dijelaskan secara deskriptif, yaitu 28 seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan kebijakan pembatasan usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden yang tengah menjadi perbincangan hangat dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum politik di Indonesia pada tahun 2024. Kasus tersebut banyak yang memberitakan di berbagai macam media berita di Indonesia, terutama dalam media berita Kompas.com dan Okezone.com. Permasalahan tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang membahas 29 “Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perubahan Peraturan Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres dengan menggunakan dua platform media sebagai obyek penelitiannya, yakni Kompas.com

danOkezone.com. Studi ini menerapkan pendekatan analisis framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki, yang terdiri dari empat elemen analisis: Sintaksis, Struktur Skrip, Struktur Tematik, dan Struktur Retoris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pola-pola yang digunakan dalam penyajian informasi mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembatasan usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dalam laporan berita yang ditemukan di Okezone.com dan Kompas.com. BAB III

METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan Penelitian suatu fenomena dengan menggunakan deskripsi secara grafis dan verbal berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu pbingkaian berita yang menghasilkan pemikiran pemikiran yang sesuai dengan realitas yang ada, Dengan merujuk kepada laporan dari dua platform berita, yaitu Okezone.com dan Kompas.com, topik yang akan 30

3.1.1 Kualitatif Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. 9 Prof. Dr. Burhan Bungin (2020) dalam buku yang berjudul "Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya" yang mengatakan Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mencoba memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan yang terlibat. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan data numerik, tetapi juga narasi dan interpretasi mendalam dari subjek penelitian. Dapat diartikan bahwa pendekatan dalam penelitian ini mengenai kebijakan peraturan yang berubah dalam peraturan batasanusia Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024 juga mengandalkan narasi yang dibuat atau dibangun oleh beberapa media berita, yang dipilih oleh penleiti yaitu Kompas.com dan Okezone.com Di sisi lain menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna yang tidak diperoleh melalui pengukuran atau penghitungan numerik, tetapi melalui pemahaman mendalam terhadap interaksi sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat (Sugiono, 2020). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu

pendekatan yang lebih efisien dalam mengilustrasikan atau mempresentasikan dianalisis adalah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. 3.1 23 2

Paradigma Konstruktivisme Paradigma merujuk pada sudut pandang terhadap cara memahami kompleksitas dunia nyata. Penelitian ini mengadopsi Paradigma Konstruktivisme. Paradigma Konstruktivisme merupakan sudut pandang yang menganggap observasi objektivitas dalam pembentukan berita dan pengembangan pengetahuan sebagai suatu kerangka kerja yang mendasari penciptaan realitas. Peneliti menggunakan pendekatan Paradigma ini untuk mengamati berita-berita yang dibingkai dari kedua media, yaitu media Okezone.com dan Kompas.com terkait pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus perubahan batasan usia minimal Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Prinsip-prinsip evolusi dan konstruktivisme dapat digabungkan untuk memahami proses pembelajaran dan pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa paradigma adalah suatu konsep yang dapat dipertahankan yang digunakan untuk menggambarkan cara kerja dalam suatu penelitian, terutama penelitian yang bertajuk “Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Peraturan Batas usia Minimal Capres dan Cawapres dan ditulis oleh peneliti (David C. Geary, 2017). Paradigma Konstruktivisme adalah perspektif dominan dalam konteks sosiokultural. Paradigma ini menegaskan bahwa identitas dapat terbentuk melalui interpretasi bahasa dan teks yang digunakan untuk memahami konsep dan tujuan dalam penyaluran informasi. Penggunaan simbol dan bahasa memegang peranan krusial dalam proses pembentukan realitas. Melalui interaksi dengan individu yang berbeda-beda dalam hal identitas, makna, kepentingan, dan pengalaman, individu dapat menggali identitasnya sendiri serta memberikan dukungan dalam menciptakan realitas simbolik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dekonstruksi paradigma konstruktivis. Peneliti menunjukkan Paradigma Konstruktivisme sebagaimana, adalah paradigma dimana pembelajaran dalam realitas sosial dapat ditambalkan sebagai konstruksi sosial dan pembelajaran sosial yang

bersifat relatif. Realitas sosial 31 yang dipersepsikan oleh masyarakat tidak dapat secara umum diterapkan pada individu atau kelompok orang. Bagaimana narasi pribadi dan sosial berperan dalam membentuk identitas dan pemahaman individu, sejalan dengan prinsip konstruktivis bahwa pengetahuan dibangun melalui narasi dan pengalaman (Jill Bradbury, 2018). Tujuan penelitian yang menggunakan paradigma konstruktivis ini adalah agar peneliti dapat mendasarkan temuannya sebanyak mungkin pada probabilitas sebagian data atau pokok bahasan. Dengan menggunakan paradigma ini, peneliti mencari pola-pola pada data yang dimiliki oleh subjek atau artikel yang berkaitan dengan lingkungan sosial yang masih berkembang atau sudah terjadi, artinya data yang dihasilkan secara non-semantik berasal dari laporan individu subjek. Peneliti mengadopsi paradigma konstruktivisme karena ingin menginvestigasi dan membandingkan informasi apakah sejalan atau tidak dengan realitas sosial yang ada.

Metode Penelitian Metode penelitian adalah pendekatan yang sistematis dan terencana untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis (John W. Creswell dan J. David Cre ll, 2017). atunya metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis Framing dimana metode ini menjadi salah satu yang berguna untuk dua sumber media berbeda yaitu Okezone.com dan Kompas.com dengan menganalisis pemberitaan media dari masing-masing media.

3.1.1 Framing

Framing adalah proses dimana media mengatur dan menyajikan informasi untuk membentuk interpretasi dan persepsi audiens terhadap isu tertentu. Cara pandang dan perspektif ini bisa menentukan fakta apa yang akan diambil dalam penulisan sebuah berita, apa yang akan ditonjolkan dan dihilangkan serta digaris bawahi dalam menulis suatu pemberitaan, setahundibawa kemana tujuan dari 32 berita tersebut (Dietram A. Scheufele, 2018). Hal ini dapat diartikan bahwa Framing dalam pemberitaan merupakan suatu cara untuk wartawan atau redaksi dalam langkah awal menulis sebuah berita, wartawan harus

bisa menentukan aspek apa yang akan digaris bawahi dan aspek apa yang tidak akan ditulis dalam pemberitaan tersebut, tidak hanya itu, dalam Framing, wartawan juga harus bisa menentukan tujuan dari adanya berita yang akan ditulis, dan juga harus mengetahui efek sudut pandang dari pembaca yang mengkonsumsi berita yang sudah ditulis nantinya. Framing adalah proses komunikasi yang memilih dan menekankan beberapa aspek dari suatu peristiwa atau isu, sehingga membuat aspek tersebut lebih menonjol dalam cara yang menguntungkan bagi penafsir tertentu (Gerald M. Kosicki, 2017). Disini dapat diartikan bahwa Framing merupakan suatu cara seorang wartawan dalam menulis berita yang akan ditulis, dengan cara membuat sudut pandang baru dengan cara halus dengan tidak sesuai realita yang terjadi atau fakta yang ada. Tujuan ini yaitu supaya membuat para pengkonsumsi berita mendapatkan sudut pandang dan pola pikir baru terhadap apa yang sudah mereka konsumsi dalam pemberitaan tersebut. Nantinya, peneliti ingin mencari tahu terkait batasan usia minimal Capres dan Cawapres dalam ajang Pemilu 2024.

3.1.2 Framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki

Dalam hal ini peneliti menggunakan Analisis Framing Gerald M. Kosicki Okezone.com dan Kompas.com, dan berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang strategi penyebaran berita dan pandangan penulis dari masing-masing sumber tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti akan lebih terlayani dengan menggunakan metode analisis Framing yang dikembangkan oleh Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Sebab, dari sini peneliti berharap dapat memahami bagaimana informasi yang dimasukkan dalam cerita terbatas akan diinterpretasikan. Peneliti bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang mempersepsikan suatu objek tertentu dalam penelitian observasional yang didasarkan pada garis tanda kemunculan pada teks tersebut di atas, tidak hanya itu, peneliti memilih metode framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki karena ingin melihat keberpihakan diantar kedua media yang sudah dipilih oleh peneliti, yaitu Okezone.com dan Kompas.com. Lebih jauh lagi, model

khusus ini mempunyai struktur kemasan atau penulisan dalam memahami suatu cerita atau kejadian dan rincian pendukung apa pun yang terdapat dalam sebuah artikel berita. Setiap cerita mempunyai bingkai yang berfungsi sebagai lambang organisasi gagasan (Gerald M. Kosicki dan Model Zhongdang Pan 2017). Dalam hal ini digunakan suatu metodologi yang dapat dikonsepsikan pada unsur-unsur tertentu dalam suatu wawancara. Kemudian, hal tersebut dapat diabaikan dan diabaikan oleh jurnalis dan dikomunikasikan dalam krisis komunikasi. Pola ini dapat digunakan pada delapan tipe struktur besar: retorik, sintaksis, skrip, dan tematik. (Ahdi, 2021) Penelitian ini menggunakan model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Metode framing Pan dan Kosicki sangat berguna untuk menganalisis bagaimana media membingkai isu tertentu melalui struktur berita. Dengan mengkaji sintaksis, skrip, tematik, dan retorik, peneliti dapat mengungkap bagaimana pesan disusun dan makna dibentuk, informasi yang dikutip dari tulisan Prof. Dr. R. Bambang Waluyo dalam tulisannya pada tahun 2022 yang berjudul “Metodologi Penelitian Media dan Komunikasi. Hal itu dapat dijabarkan oleh peneliti menjadi beberapa bagian, adalah: 1. Struktur Sintaksi, struktur ini berkaitan dengan bagaimana seorang penulis berita atau wartawan dalam menyusun sebuah opini, peristiwa dan juga perihal observasi pengamatannya atas sesuatu kejadian atau isi yang terjadi. Susunan ini dapat dilakukan dengan cara mengamati dari keseluruhan penulisan berita yang sudah dibuat, dalam jenis pembagian penulisan yaitu Lead, Kutipan, Headline, Pernyataan tokoh maupun penutup. 2. Struktur Skrip, pada bagian ini memperlihatkan bagaimana pola seorang redaksi atau penulis berita menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. 29 40 Dalam susunan ini, bentuk yang akan dibuat masuk ke dalam pola 5W+1H, yaitu adalah What, Where, When, Who, Why dan How. Bagian ini menjadi salah satu cara atau strategi seorang penulis berita untuk mengkonstruksikan berita. Peristiwa kejadian dapat dimengerti dengan berbagai cara

tertentu, menyusun menjadi bagian-bagian yang sangat teratur, skrip dalam berita menunjukkan tekanan mana yang diutamakan dan bagian struktur apa yang akan bisa dijadikan strategi dalam menyembunyikan dan menonjolkan informasi penting, 3. Struktur Tematik merujuk pada cara seorang penulis berita mengungkapkan sudut pandanginya terhadap suatu kejadian Melalui proposisi dan hubungan Peristiwa maupun informasi yang dialami untuk membuat suatu realitas yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Dalam sebuah media, Framing dapat digunakan sebagai alat yang bertujuan untuk memberitakan suatu isu yang menonjol, dibandingkan dengan isu-isu lainnya dengan cara membuat suatu kode dalam elemen-elemen penulisan. Kemudian, hasil informasi atau penulisan berita yang sudah dibuat dapat disebarluaskan dan banyak dimaknai oleh khalayak luas. 35 antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan, bagian ini menginvestigasi proses transformasi dari pemahaman konseptual menjadi ekspresi yang lebih terperinci dan terstruktur. 4. Struktur Retoris, Struktur ini mengacu kepada para penulis berita yang akan menekankan makna tertentu dalam sebuah penulisan berita. Bagian ini melibatkan penggunaan kosakata, idiom, grafik, dan gambar dalam penyampaiannya. Tidak hanya dalam penulisan, akan tetapi juga untuk membantu membuat makna tertentu dalam sebuah penulisan berita yang bertujuan menonjol bagi para pembaca. Penekanan ini tidak dapat dikenali dari pilihan kata, tetapi juga dengan penggunaan elemen grafis dan grafik. Biasanya hal ini muncul dalam teks penulisan berita. Penggunaan elemen format visual seperti bold, italic, garis bawah, ukuran font yang lebih besar, serta penggunaan caption, grafik, tabel, gambar, dan elemen visual lainnya, memiliki potensi untuk menciptakan efek kognitif yang efektif dalam mengarahkan perhatian, dan menyoroti informasi yang dianggap penting untuk disampaikan. Kehadiran elemen-elemen ini tidak hanya memperjelas informasi yang esensial tetapi juga menekankan kepentingan dari konten yang disajikan. Pada penelitian ini, penelitian mengenai model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana suatu media berita dalam sudut pandang keberpihakan dalam isu atau peristiwa yang terjadi, terutama peristiwa politik di Indonesia, dengan menggunakan struktur model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan juga struktur retorik dalam dua media berita yang berbeda, yaitu media Okezone.com dan Kompas.com. Gambar 3.1 Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M Kosicki. beberapa penulisan tahapan pemberitaan, yaitu judul, lead, tubuh berita, penutup berita, foto dan gambar yang dilihat. Selanjutnya, unit observasi dalam penelitian ini adalah situs berita yang membeberitakan tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batasan usia Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Peneliti memilih Okezone.com dan Kompas.com sebagai unit analisis. Penelitian akan mengambil beberapa berita yang fokus terhadap pemberitaan tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batasan usia Capres dan Cawapres pada 36 3.3 Unit Analisis Memiliki kaitannya terhadap pemberitaan perubahan aturan batasan usia Capres dan Cawapres pada periode 16 Oktober 2023 saat hasil sidang ditetapkan hingga 17 Februari 2024 pada saat proses Pemilu 2024 berlangsung. Analisis pemberitaan tersebut nantinya akan mencakup dalam pemilu 2024 yang bersifat Straight News dalam mengambil data keperluan penelitian ini. Tidak hanya itu, peneliti juga menyeleksi berita berdasarkan berita yang dimuat pada hari yang sama, serta mempunyai judul, topik dan headline yang relevan antara Okezone.com dan Kompas.com. Berdasarkan pembatasan tersebut, adapun berita-berita yang diambil sebagai sampel penelitian dari Okezone.com dan Kompas.com adalah sebagai berikut: Gambar 3.2 Berita dari Okezone.com & Kompas.com terkait batasan usia minimal Capres dan Cawapres yang sudah diputuskan oleh MK.

49 3.4 Teknik Pengumpulan Data 1. Data Premier Perihal d.ata premier dalam penelitian yang berjudul “Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perubahan peraturan Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres dapat merujuk dari data yang akan 37 Peneliti mendapatkan total berita yang ada dalam media Okezone.com yaitu adalah 7 berita dan Kompas.com 8 berita dengan total berita yaitu 15 berita. Faktor utama dalam pemilihan berita yang dipilih oleh peneliti yaitu adalah yang menekankan informasi utama terkait hasil dari Putusan MK mengenai perubahan kebijakan tentang batasan usia Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024, tidak hanya itu, peneliti juga memilih berita atas dasar penilaian factor pendukung yang dirasa bisa menambah informasi terkait pemberitaan Putusan MK ini, dan yang terakhir adalah peneliti juga memilih berita terkait efek dari kejadian atau efek dari Putusan MK kepada Masyarakat publik, seperti demo Mahasiswa dan Pendapat para Ahli politik yang ada sangkut pautnya dengan kasus perubahan kebijakan dikumpulkan dan diobservasi secara langsung oleh peneliti, yang berasal dari sumber asli atau melalui proses metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Framing langsung terhadap berita-berita yang dipublikasikan oleh media yang dipilih oleh peneliti, yaitu Okezone.com dan Kompas.com yaitu dalam konten penulisan berita, termasuk penggunaan kata, bahasa, judul, gambar dan fokus penulisan pemberitaan, untuk mengidentifikasi pola Framing dan tujuan dalam 3.5 Metode Pengujian Data Dalam penelitian yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif, pengumpulan data seringkali menjadi hal yang penting untuk memperoleh hasil akhir penelitian yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, setiap peneliti perlu melakukan pemeriksaan Valid.itas dan Relia.bilitas. 20 Teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, metode, 38 penulisan berita yang ditulis oleh wartawan. 2. Data Sekunder Dala artian yaitu adalah penulisan artikel berita di Media Online yang akan diobservasi dan diteliti, media yang dipilih yaitu adalah

Okezone.com dan Kompas.com. Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan temuan dari penelitian terdahulu tentang Framing berita terkait politik dinasti pada tahun 2019 dalam dua berita online yang berbeda, yaitu Okezone.com dan Kompas.com. Disini, peneliti ingin mengetahui apakah kedua media tersebut masih sama dalam hasil penulisan Framing yang sudah dilakukan dalam penelitian terdahulu. Peneliti akan mengumpulkan dokumentasi liputan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Kandidat Presiden dan Kandidat Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2024 dari kedua sumber informasi yang telah dipilih, yaitu Okezone.com dan Kompas.com. Peneliti juga akan melakukan proses observasi dengan mengamati seluruh isi pemberitaan tersebut dengan metode, teori dan konsep yang sudah dipilih oleh peneliti. dan waktu yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan menyeluruh (Dr. Sugiyono, 2021). Dalam artian di penelitian ini, salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai keandalan dan konsistensi data adalah penggunaan kesesuaian, atau bias konfirmasi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan pihak lain terkait dengan data yang diperiksa akan terpenuhi. Sumber pengumpulan data yang akan dianalisis yaitu merupakan berita dengan dua media yang sudah dipilih oleh peneliti, yaitu Okezone.com dan subjek penelitian yang ada. Pembingkai model Robert N. Entman melibatkan identifikasi masalah, penafsiran biasa, penilaian moral, identifikasi penyebab masalah, dan menawarkan solusi (usulan pengobatan) terhadap masalah yang ada. Dalam identifikasi kasus, peneliti akan mengidentifikasi tindakan yang diambil berdasarkan penyebab masalah dalam studi kasus, karena pekerja yang berbeda akan memiliki reaksi berbeda terhadap masalah atau observasi yang sama. Karena skema individu 39 Kompas.com.

3.6 Metode Analisis Data

mengalokasikan data yang dibagi menjadi dua bagian: 1. Proses pendataan sebagaimana dirinci pada paragraf berikut ini didasarkan pada penelaahan terhadap informasi yang disajikan situs Okezone.com dan Kompas.com tentang putusan Mahkamah

Konstitusi terkait perubahan undang-undang Capres dan Cawapres tahun 2024. Selanjutnya, peneliti akan mengklasifikasikan data-data yang dapat digolongkan sebagai data yang berkaitan dengan kasus yang disebutkan.

2. li data yang telah ai dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi analisis Framing Robert N. Entman yang telah dievaluasi oleh peneliti. Saat melakukan penelitian, delapan konsep teks berikut akan diperiksa sebagai sudut pembingkai: n p yang paling menda adalah bagaimana memberikan defi , penjela n, penilaian, dan rekomenda dalam tu karya, dan dimaksudkan unt.uk mendorong pemikiran kritis dalam penelitian mengenai yang berbeda-beda, hal ini juga terjadi dalam bidang penulisan berita; Artinya, setiap individu mempunyai cara pandang yang unik. 2) Identifikasi penyebab masalah merupakan langkah dimana peneliti akan menganalisis penelitian yang akan dilakukan, melihat siapa atau apa penyebabnya. Dari bagian ini terlihat ada sebagian yang berperilaku sebagai pemain dan ada pula yang berperilaku sebagai penjahat. 3) Untuk menciptakan prinsip-prinsip moral, dapat dikatakan pada tahap ini dua media berita yang berbeda, yaitu Okezone.com dan Kompas.com. Keterbatasan data dapat menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti hanya dapat mengandalkan data yang tersedia di Kompas.com dan Okezone.com. Peneliti juga mengambil berita yang notabene penulisannya menginformasikan, memberitakan dan merespon terkait pemberitaan Putusan MK dalam kasus batasan usia minimal capres dan cawapres. 40 peneliti akan menganalisis dan mengevaluasi penyebab masalah, dan akan muncul akibat yang ditimbulkan dari masalah yang dimaksud. Ada argumen penguatan dalam soal definisi. Oleh karena itu, ada faktor lain yang menonjolkan sentimen yang akan disampaikan oleh media umum sebagai reporter berita. 4) Tahapan terakhir yaitu mengenai solusi atas masalah. Pada tahap ini, peneliti mungkin sedang mencari apa yang dapat disajikan kepada jurnalis sebagai solusi terhadap permasalahan yang teridentifikasi, sejalan dengan yang terdapat dalam proses identifikasi masalah. Langkah yang dapat diambil untuk

menanggulangi situasi ini adalah dengan merujuk pada pendekatan wartawan atau kerangka penulisan yang telah tersedia. 3.7 Keterbatasan Penelitian Penelitian ini terbatas, hanya tersedia dalam periode yang sudah ditentukan oleh peneliti, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2023 pada saat hari putusan hasil akhir Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batasan usia Capres dan Cawapres, hingga pada tanggal 14 Februari 2024, dengan momen kejadian berlangsungnya Pemilu 2024. Media yang akan dipilih untuk dijadikan observasi terbagi kedalam BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian Kantor pusat Okezone.com terletak di SINDO Building, Jalan KH.Wahid Hasyim No.38, Jakarta Pusat, Indonesia. Tagline yang sering dikaitkan dengan Okezone.com adalah “Bersama 24 Jam”, yang menekankan bahwa komitmen mereka untuk menyediakan berita terbaru dan akses informasi yang cepas kepada pembaca sepanjang 24 jam sehari. Okezone mempunyai visi dan misi yaitu berkomitmen untuk menyediakan berita yang akurat, berimbang, dan relevan bagi pembaca mereka, serta menjadi salah satu sumber berita terpercaya di Indonesia. 4.1.1 Gambaran Umum Okezone.com Gambar 4.1 Logo Profile Okezone.com Okezone.com merupakan sebuah platform berita digital yang terkemuka di Indonesia yang menghadirkan informasi terkini dari berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, hiburan, olahraga, gaya hidup, dan teknologi. 10 Berdasarkan informasi yang diambil dari website Okezone.com, media berita ini didirikan pada tahun 2007, Okezone.com adalah bagian dari PT Media Nusantara Citra Tbk, entitas yang juga mengelola beberapa media lainnya seperti televisi, media cetak, dan jaringan radio. Konten yang disajikan oleh Okezone.com mendapat beberapa cakupan, seperti artikel berita, liputan langsung, video, galeri foto, dan opini dari penulis dan pakar di berbagai bidang. Okezone.com aktif di dalam berbagai platform media social seperti Facebook, Twitter dan Instagram, yang Dimana mereka berbagi berita terbaru dan berinteraksi oleh pengguna. Gambar 4.2 Logo Profile Kompas.com Berdasarkan informasi yang diambil dari hasil survei IPWS pada tahun 2023 yaitu Kompas.com

adalah salah satu portal berita yang paling banyak dibaca di Indonesia yang merupakan bagian integral dari Kompas Gramedia Group, sebuah konglomerasi media yang menonjol di Indonesia. Sebagaimana yang ditulis di laman website Kompas.id, awal mula media ini bernama Kompas Online, yang diluncurkan pada tahun 1995 sebagai salah satu situs berita pertama di Indonesia. Sejak saat itu, platform ini telah evolusi menjadi salah satu pusat informasi utama bagi penduduk Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Kompas Online mengalami perkembangan pesat dalam hal cakupan berita, teknologi dan penggunaan media.

Okezone.com mencakup berita dari berbagai bidang, baik skala nasional maupun internasional. Mereka mempunyai rubrik khusus untuk topik-topik tertentu, seperti kesehatan, otomotif dan traveling. Okezone.com telah membangun reputasi sebagai salah satu portal berita terkemuka di Indonesia. Mereka dikenal karena cakupan berita yang luas, format konten yang beragam dan komitmennya terhadap standar jurnalisme yang tinggi.

4.1.2 Gambaran Umum Kompas.com daring.

Mereka mulai menyajikan berita dari berbagai bidang, termasuk berita nasional, internasional, politik, ekonomi, olahraga hiburan dan teknologi. Pada permulaan tahun 1995, Kompas Online menjalani perubahan menjadi www.kompas.com untuk menyajikan layanan yang efisien. Dengan identitas baru tersebut, Kompas Online semakin diminati oleh pembaca setianya. Mengantisipasi potensi yang besar dalam domain digital, www.kompas.com kemudian dijadikan 42 Gedung Kompas Gramedia, di jalan Palmerah Selatan No.22 – 28, Jakarta, Indonesia.

. Kompas.com memiliki tagline atau slogan yaitu “Jernih Melihat Dunia” dengan makna dan artian yaitu mencerminkan Kompas.com untuk menyediakan berita yang jelas, objektif dan terpercaya kepada pembaca mereka, serta membantu pembaca untuk memahami dunia dengan lebih baik melalui informasi yang diberikan dan disajikan oleh Kompas.com.

4.2 Hasil Dan Analisis Peneliti

4.2.1 Framing Pemberitaan Putusan MK Terkait Perubahan Batasan Usia Minimal Capres & Cawapres di Okezone.com & Kompas.com

Analisis dilakukan pada pemberitaan yang diterbitkan oleh

Okezone.com dengan topik Putusan MK terkait perubahan Batasan usia minimal Capres dan Cawapres di Okezone.com pada periode 16 Oktober 2023 – 14 Februari 2024.

4 Pemberitaan yang akan dipilih dan dianalisis dianggap memenuhi aspek-aspek yang ada dalam analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki berdasarkan analisis Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retorika. Pemberitaan tersebut juga difokuskan pada pembahasan mengenai perubahan peraturan Batasan Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Berdasarkan penjelasan sebuah entitas bisnis mandiri di bawah naungan PT.

28 Kompas Cyber Media pada tanggal 6 Agustus 1998. Pada tanggal 29 Mei 2008, situs berita ini melakukan pembaharuan identitas diri dengan mengubah namanya menjadi Kompas.com, mengacu pada merek dagang Kompas yang selama ini terkenal karena menyajikan jurnalisme yang bermakna. Hingga saat ini, nama Kompas.com masih bertahan dan eksis di kalangan media berita nasional. Pusat operasional Kompas.com berlokasi di tersebut, pemberitaan yang dianalisis dengan jumlah 7 berita terpilih, dengan judul: 1. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan gugatan terkait batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang ditetapkan pada usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Artikel ini dipublikasikan oleh situs Okezone.com pada tanggal 16 Oktober 2023. 43 2. Mahasiswa di Palu melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mereka pandang kontroversial, dengan tujuan menghindari terbentuknya dinasti politik. Aksi demonstrasi tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2023. 25 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Batas Usia Calon Presiden - Calon Wakil Presiden dianggap tidak mendesak. Dipublikasikan oleh situs web Okezone.com pada tanggal 22 Oktober 2023. 4. Aliansi Mahasiswa Jambi menggelar aksi demonstrasi menyerbu Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Artikel yang dipublikasikan pada situs web Okezone.com pada tanggal 24 Oktober 2023 mencatat peristiwa tersebut. 5. Anwar Usman menyatakan kesadaran atas

penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang kuat dalam muatan politiknya. Pernyataan tersebut dicatat di situs web Okezone.com pada tanggal 8 November 2023. 6. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dapat dikenai sanksi moril. Mahfud meminta kepada rakyat untuk menunjukkan pendapat mereka pada tanggal 14 Februari. Terdokumentasikan pada situs web Okezone.com pada tanggal 8 Desember 2023.

26 7. Disebutkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengomentari pernyataan Prabowo: 48 "Kita bukan anak kecil, Mas Anies, Anda juga memahami hal tersebut Tertera dalam laman web Okezone.com pada 12 Desember 2023. Dari seluruh judul berita yang disajikan, peneliti berusaha menganalisis calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2024 dengan memanfaatkan analisis framing yang diajukan oleh Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Analisis ini dilakukan dengan metode analisis sebuah berita melalui empat konsep, yakni Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retorika. Berikut adalah uraian analisis dari tiap berita yang telah dipilih oleh peneliti dari portal Okezone.com. 44 A. Analisis Artikel Berita 1 Judul : "Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan gugatan terkait batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang ditetapkan pada usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Sumber : Okezone.com Tanggal : 16 Oktober 2023 Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan terkait pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan, yaitu 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Lead Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengonfirmasi keabsahan gugatan terkait syarat usia untuk calon presiden dan wakil presiden yang direvisi menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Latar Informasi Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai klaim terkait batasan usia untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Kutipan Sumber Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman,

menyatakan bahwa permohonan pemohon telah dikabulkan sebagian, sementara beliau menyimpulkan bahwa pokok permohonan para pemohon tidak beralasan secara hukum secara menyeluruh. Pernyataan "Mengembalikan Permohonan Pemohon untuk sebagian, ujar Ketua MK, Anwar Usman. "Argumentasi pemohon didasarkan pada prinsip hukum sebagian, ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. "Inti dari permohonan para pemohon tidak dapat disanggah secara hukum dalam keseluruhan, tambah 45 pernyataan Ketua MK, Anwar Usman. Struktur Skrip What Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk menerima sebagian dari permohonan Almas Tsaqibbirru Re A yang berkaitan dengan batasan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres), sementara menolak permohonan yang diajukan oleh beberapa pihak lainnya. Where Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat When 16 Oktober 2023 Who Almas Tsaqibbirru Re A, pelaksana permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Why Meminta perubahan terhadap syarat usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala eksekutif daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Alasan di balik permohonan tersebut adalah untuk memberikan peluang kepada calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan dalam tingkat daerah yang signifikan atau memiliki usia yang lebih muda tetapi telah membuktikan kemampuannya dalam membangun ekonomi daerah. How Proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai petisi untuk mengubah ambang batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) melibatkan tahapan sidang, pengumuman putusan, serta kajian hukum yang dilakukan oleh majelis hakim MK. Dalam konteks ini, MK mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, dengan menetapkan modifikasi terhadap batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden 46 menjadi 40 tahun, atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan

Antar Kalimat (isi paragraph) (menceritakan tentang apa, setiap paragraph) Paragraf: 1. Menginformasikan mengenai pengkabulam permohonan materii pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang Batasan usia caln presidne dan wakil presiden yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A 2. Menjelaskan isi permohonan dari Almas Tsaqibbirru Re A. 3. Menyebutkan ketua MK mengabulkan permohonan tersebut Sebagian. 4. Menyatakan bahwa MK berwenang mengadili permohonan. 5. Mengutip Anwar Usman mengenai pengesahan siding. 6. Menjelaskan peranan awal, wewenang hukum pemohon menyanjung pejabat pemerintahan muda yang sukses dalam mengembangkan ekonomi daerah. 7. Pemohon memberikan data terakit kepala daerah terilih. 8. Meyampaikan isi petitium pemohon. 9. Menutup dengan menguraikan daftar gugatan batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diumumkan. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis (penekanan berita) (gambar berita) Laporan ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan batas usia minimal bagi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, serta penolakan terhadap gugatan- gugatan lain yang tidak beralasan menurut hukum menurut MK. Analisis : 47 1. Struktur Sintaksis (Bagaimana berita disusun, Headline Judul, Informasi yg ditekankan) Berita tersebut disusun dengan struktur yang informatif dan kronologis, serta menekankan beberapa poin kunci terkait putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia yang diharuskan bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dalam penyusunan berita terdapat pembukaan, detail Keputusan, konteks hukum, latar belakang dan dukungan, isi Petium, Gugatan lain yang ditolak, detail siding dan putusan dan daftar gugatan. Infformasi yang ditekankan dalam berita ini yaitu mengenai Keputusan MK mengabulkan gugatan, penolakan gugatan lain, konteks legal dan alasan Keputusan, latar belakang pemohonm daftar gugatan terkait Batasan usia. 2. Struktrur Skrip (Urutan kronologisnya gmn, untuk pembaca memahami

alur) Berita ini dimulai dengan memberikan konteks mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan materiil terkait Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyangkut batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru RE A. Dilanjut dengan adanya kalimat pernyataan putusan resmi dari Ketua MK, Anwar Usman, yang mengumumkan pengabulan Sebagian permohonan Almas Tsaqibbiru Re A Penulisan berita juga terdapat argument dari pihak terakit, seperti kuasa hukum Almas Tsaqibbiru Re A, yang menjelaskan mengapa mereka mengajukan permohonan tersebut. Di berita tersebut juga menyajikan daftar gugatan terkait batas usia Capres Cawapres beserta statusnya, untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca tentang perkembangan kasus terkait. Penulsian berita ditutup dengan menyebutkan bahwa masih ada sejumlah perkara yang masih dalam tahap persidangan, serta menyatakan bahwa 7 dari 11 gugatan akan diputuskan pada tanggal tertentu, membeirkan gambaran tentang perkembangan selanjutnya dalam masalah ini. Tidak hanya itu, untuk keseluruhan dalam penulisan berita tersebut terdapat unsur 5W+1H dalam penulisan berita ini dengan berbagai jenis penjelasannya. 48 3. Struktur Tematik (Tema yang diangkat dan bagaimana tema itu ditulis) Tema utama yang diangkat dalam artikel berita tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Artikel ini fokus pada perubahan batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, serta penolakan terhadap gugatan lain yang mengusulkan perubahan batas usia berbeda. 4. Struktu Retoris (Perangkat Bahasa yang digunakan, metafora, analogi/ pilihan kata) Perangkat bahasa dalam artikel ini cenderung formal, teknis, dan objektif. Tidak ada penggunaan metafora karena tujuannya adalah menyampaikan informasi hukum secara jelas dan langsung. Pilihan kata yang digunakan mencerminkan formalitas dan keakuratan yang diperlukan

dalam pelaporan keputusan pengadilan. B. Analisis Artikel Berita Judul : Mahasiswa di Palu Demo Tolak Putusan MK, Tak Ingin Ada Dinasti Politik. Sumber : Okezone.com Tanggal : 21 Oktober 2023 Ringkasan : Mahasiswa di Palu menggelar demonstrasi untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka khawatir putusan tersebut akan membuka jalan bagi praktik politik dinasti. Demonstrasi ini menyoroti kekhawatiran bahwa keputusan MK bisa digunakan untuk memperkuat kekuasaan keluarga dalam politik, yang dinilai merugikan demokrasi. Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Mahasiswa di Palu Demo Tolak Putusan MK, Tak Ingin Ada Dinasti Politik Lead Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng, Kota Palu. Aksi tersebut merupakan penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengenai pembatasan usiacalon presiden dan calon wakil presiden. Mereka khawatir putusan tersebut membuka jalan 49 bagi politik dinasti di Indonesia, yang dinilai merugikan sistem demokrasi. Latar Informasi Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tengah melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pembatasan Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Kutipan Sumber 1. Koordinator Aliansi Mahasiswa Palu, Resaldy. 2. Perwakilan mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD), Izmail. Keduanya memberikan pendapat dan penjelasan terkait alasan penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta tuntutan mereka dalam aksi demonstrasi tersebut.. Pernyataan Pernyataan dari Koordinator Aliansi Mahasiswa Palu, Resaldy, yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai langkah mundur bagi sistem demokrasi di Indonesia dan bahwa para mahasiswa menentang keberadaan dinasti politik dalam tatanan pemerintahan negara. Pernyataan dari Izmail, selaku perwakilan mahasiswa Universitas Tadulako

(UNTAD), yang menganggap dikabulkannya gugatan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai upaya membentuk dinasti politik, dengan memuluskan salah satu kandidat yang masih muda dan memiliki hubungan kekeluargaan dalam politik. Izmail menegaskan penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut. 50 Struktur Skrip What Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 mengenai Batas Usia Kandidat Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) memperoleh persetujuan terhadap sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 sub-bab q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Where depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu. When 21 Oktober 2023 Who Aliansi Mahasiswa Palu Why Penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia kandidat presiden dan wakil presiden. Khawatir akan kemungkinan terbentuknya dinasti politik. Penolakan terhadap kemungkinan bagi calon presiden dan wakil presiden yang berumur minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman di dalam jabatan yang terpilih melalui proses pemilihan umum untuk mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. How Aksi demonstrasi dilakukan dengan cara berkumpul di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu, sambil membawa spanduk penolakan dan menyampaikan pendapat secara lisan. Para peserta demonstrasi mungkin juga telah mengatur pertemuan dan merencanakan strategi aksi sebelumnya.

Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat

Paragraf pertama: Menggambarkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Palu di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu. Mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pembatasan Usia 51 Kandidat Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres). Paragraf kedua: Menyajikan pandangan Koordinator Aliansi Mahasiswa Palu, Resaldy, terhadap putusan MK. Menjelaskan bahwa putusan tersebut dianggap sebagai langkah kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia dan dianggap membuka peluang bagi terbentuknya dinasti politik. Paragraf ketiga: Mengulas

lebih lanjut tentang dampak dari putusan MK tersebut. Menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang bagi individu yang berusia minimum 40 tahun atau yang memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum (pemilu) untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Paragraf keempat: Menampilkan pernyataan Izmail, perwakilan mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD). Izmail menilai bahwa gugatan usia calon presiden dan wakil presiden yang dikabulkan MK adalah upaya untuk membentuk dinasti politik, khususnya dengan merujuk pada salah satu kandidat yang masih muda dan memiliki hubungan kekeluargaan dalam politik. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Fokus dalam laporan ini adalah pada penolakan yang tegas terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden 52 (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Mahasiswa dari berbagai kampus di Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Aliansi Mahasiswa Palu dan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD), melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap putusan tersebut. Mereka menegaskan bahwa putusan MK ini dianggap sebagai langkah kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia dan membukapeluang bagi terbentuknya dinasti politik. Gambar yang dipakai dalam cover penulisan berita tersebut yaitu foto Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Para mahasiswa terlihat melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Palu sambil membawa spanduk yang berhubungan dengan penolakan keputusan siding MK. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun untuk mengulas penolakan mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pembatasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini diperlihatkan melalui, Pemimpin Berita, yang memberikan ringkasan tentang protes mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Kota Palu, menentang putusan MK. Pendalaman Berita yaitu Menguraikan alasan-alasan di balik penolakan tersebut, termasuk pernyataan dari koordinator Aliansi Mahasiswa Palu

dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD). Juga menjelaskan implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni memberikan kesempatan bagi individu yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dengan usia minimum 40 tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan umum untuk mengikuti Pemilu 2024. Penekanan Informasi: Fokus utama berita adalah pada penolakan mahasiswa terhadap putusan MK, yang dipandang sebagai langkah kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia dan mendukung harapan untuk mencegah terbentuknya dinasti politik. 53

Penutup, Merangkum pokok-pokok penting yang telah disampaikan dalam berita dan mungkin memberikan pandangan tentang implikasi atau kelanjutan dari peristiwa tersebut.

2. Struktur Skrip Berita dimulai dengan pengenalan konteks, yaitu aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu. Kemudian, berita menguraikan perkembangan aksi demonstrasi tersebut dengan memberikan informasi tentang alasan di balik protes tersebut, termasuk pandangan dari koordinator Aliansi Mahasiswa Palu dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD). Puncak berita adalah penekanan pada penolakan mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kekhawatiran mereka terhadap potensi terbentuknya dinasti politik. Berita ditutup dengan merangkum pokok-pokok penting yang telah disampaikan dalam berita dan mungkin memberikan pandangan tentang implikasi atau kelanjutan dari peristiwa tersebut.

Alur ini memberikan pemahaman yang lengkap tentang aksi demonstrasi mahasiswa, termasuk alasan di baliknya dan implikasinya.

3. Struktur Tematik Subjek yang dibahas dalam laporan ini adalah penolakan yang ditunjukkan oleh mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia kandidat yang ingin menjadi presiden dan wakil presiden, serta keprihatinan mereka terhadap kemungkinan adanya pembentukan dinasti politik. Tema ini ditulis dalam berita dengan menyoroti pernyataan-pernyataan dan aksi mahasiswa yang menentang putusan MK tersebut. Berita memberikan penjelasan mengenai

alasan-alasan di balik penolakan tersebut, seperti pandangan dari koordinator Aliansi Mahasiswa Palu dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD), yang menyampaikan kekhawatiran akan potensi terbentuknya dinasti politik dan dampak negatifnya terhadap demokrasi Indonesia. 4. Stuktur Retoris Berita ini menggunakan deskripsi untuk menggambarkan tempat kejadian, yaitu aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu. Mengutip langsung 54 pernyataan-pernyataan dari koordinator Aliansi Mahasiswa Palu, Resaldy, dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Tadulako (UNTAD), Izmail, untuk memberikan sudut pandang mereka. Mahasiswa menyatakan pendapat dan penolakan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan dimensi subjektivitas dan emosi dalam berita. Berita memberikan penjelasan dan penegasan terhadap alasan-alasan di balik penolakan mahasiswa terhadap putusan MK, serta konsekuensi dari putusan tersebut. Berita ini memberikan informasi mengenai isi putusan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya, sehingga membantu pembaca memahami konteks lebih baik. Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini meliputi deskripsi, kutipan langsung, ekspresi pendapat, penjelasan dan penegasan, serta klarifikasi informasi. C. Analisis Artikel Berita Judul : Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Tak Ada Urgensinya. Sumber : Okezone.com Tanggal : 22 Oktober 2023 Ringkasan : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS kritik putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memungkinkan Capres- Cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat pengalaman sebagai kepala daerah. BEM menilai putusan tak mendesak, sementara publik ragu legal standing pemohon uji materiil. Diskusi terbuka diadakan untuk bahas lebih lanjut. Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (Capres- Cawapres) dinilai tidak memiliki urgensi yang memadai. Lead Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil

Presiden (Cawapres) disebut tidak memperlihatkan keperluan mendesak. Pendapat ini disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam dialog 55 terbuka mengenai tanggapan atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan Capres-Cawapres. Latar Informasi Kritik yang disampaikan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) dianggap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai kurang mendesak atau kurang mempunyai urgensi yang memadai. Kutipan Sumber "Menurut pandangan kami, dengan alasan penuntut yang menegaskan persyaratan calon presiden-wakil presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menurut kami tidak menunjukkan keperluan untuk diubah, namun pada akhirnya mendapat persetujuan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, ujar Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Muhammad Vagasty. Pernyataan Perspektif yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres- Cawapres) tidak memiliki signifikansi yang penting, yang diungkapkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS). Pendapat Presiden BEM FH UNS Muhammad Vagastya mengenai klaim terhadap persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 subbab q undang-undang Pemilihan Umum tidak mengindikasikan 56 kebutuhan perubahan yang mendesak. Pernyataan Prama AdityaGraha, Presiden BEM FISIP UNS 2023, bahwa putusan MK merusak reputasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Ungkapan keberatan terhadap permohonan uji materiil yang diajukan oleh AlmasTsaqibbirru Re A, mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA), dan

keraguan atas legal standing Almas. Pengundangan untuk menghadiri forum diskusi yang bertopik "Ruang Kolaborasi", yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS, serta BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNS pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 di kedai Bento Kopi UNS pukul 15.00 WIB.

Struktur Skrip What Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), serta tanggapan serta pandangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) terhadap keputusan tersebut. Where Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo When 22 Oktober 2023 Who Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) di 57 Universitas Sebelas Maret (UNS). Why Perbedaan pandangan mengenai urgensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak hanya didiskusikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai tanggapan terhadap putusan MK mengenai persyaratan Capres-Cawapres. How Pandangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dianggap tidak memerlukan tindakan segera, dan pandangan ini diungkapkan melalui diskusi terbuka serta siaran pers. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Pengantar tentang pandangan BEM Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA UNS yang menyatakan

bahwa putusan MK tentang batas usia Capres- Cawapres dianggap tidak urgensi. Pernyataan dari Presiden BEM FH UNS, Muhammad Vagastya, yang menegaskan bahwa putusan MK tidak mendesak untuk diubah. Pengantar tentang polemik dissenting opinion dari empat hakim MK dan keganjilandalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sorotan terhadap pernyataan hakim MK, Saldi Isra, yang menyampaikan pengalaman 58 aneh dalam proses pengambilan keputusan. Kritik dari Prama Aditya Graha, Presiden BEM FISIP UNS 2023, terhadap putusan MK dan keraguan publik terhadap integritas MK sebagai Guardian of Constitution. Penjelasan mengenai permohonan pemeriksaan substansi Pasal 169 Poin q yang diajukan oleh AlmasTsaqibbirru Re A, seorang mahasiswa di UNSA, namun kelayakan hukum Almas dipertanyakan oleh masyarakat. Analisis terhadap pandangan Khoirul Umam, Kepala Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret tahun 2023, mengenai ketidak konsistenan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengambilan keputusan, dan urgensi untuk mempertimbangkan alasan materiil yang diajukan oleh pihak yang mengajukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan. Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) UNS, BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNS, dan BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNS, mengenai topik "Ruang Kolaborasi", direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin, 23 Oktober 2023, di Bento Kopi UNS mulai pukul 15.00 WIB. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Fokus utama dalam laporan ini adalah pada penolakan dan kritik yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 59 Universitas Sebelas Maret (UNS) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Ilustrasi yang digunakan dalam sampul penerbitan berita tersebut adalah gambar bangunan Gedung Mahkamah

Konstitusi. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun dengan struktur yang mengikuti format berita pada umumnya, Berita dimulai dengan pengenalan masalah atau kejadian, yaitu penolakan dan kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Paragraf-paragraf selanjutnya menyajikan detail-detail terkait dengan sikap dan argumen yang disampaikan oleh BEM Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA UNS. Ini termasuk pernyataan langsung dari perwakilan BEM, sorotan terhadap dissenting opinion dari hakim MK, dan penjelasan mengenai legal standing pemohon uji materiil. Berita ditutup dengan memberikan informasi mengenai rencana diskusi yang akan dilakukan oleh BEM untuk membahas lebih lanjut masalah ini. Data yang terfokus dalam laporan ini adalah penolakan serta kritik yang diproklamasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA dari Universitas Sebelas Maret (UNS) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

2. Struktur Skrip Alur berita ini menggunakan alur kronologis, di mana informasi disusun berdasarkan urutan waktu atau kejadian. Berita dimulai dengan pengenalan masalah, yaitu penolakan dan kritik BEM UNS terhadap putusan MK, dan kemudian berlanjut dengan pemberian informasi secara bertahap tentang perkembangan dan argumen yang mendukung penolakan tersebut. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti perkembangan cerita secara terstruktur dari awal hingga akhir.

60 3. Struktur Tematik Tema yang ditekankan dalam laporan ini adalah penolakan dan kritik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Laporan tersebut menyoroti respons serta argumen yang dikemukakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) di Universitas Sebelas

Maret (UNS). Berita menyoroti pernyataan-pernyataan langsung dari perwakilan BEM, polemik dissenting opinion dari hakim MK, serta pandangan kritis terhadap integritas MK sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, berita juga menampilkan rencana diskusi yang diinisiasi oleh BEM untuk membahas lebih lanjut masalah ini. 4. Stkrutur Retoris Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini menggunakan bahasa formal dan akademik. Penyampaiannya jelas dan faktual, dengan penggunaan istilah-istilah hukum dan politik yang spesifik. Selain itu, berita ini juga mencakup pernyataan opini dari berbagai pihak yang terlibat, memberikan dimensi subjektivitas dalam penyampaian informasi. Penekanannya pada argumen dan pandangan yang beragam menunjukkan pendekatan yang cermat dan berimbang dalam pemberitaan. D. Analisis Artikel Berita Judul : Serbu Gedung DPRD, Aliansi Mahasiswa Jambi Demo Tolak Putusan MK. Sumber : Okezone.com Tanggal : 24 Oktober 2023 Ringkasan : Aliansi Mahasiswa Jambi melakukan unjuk rasa menolak keputusan MK tentang batas usia Capres- Cawapres di Gedung DPRD Jambi. Mereka menilai keputusan MK memuluskan dinasti politik dan merugikan demokrasi. Unjuk rasa dimulai dari Universitas Jambi menuju Gedung DPRD, dengan harapan keputusan MK dapat digagalkan. Meskipun tidak berhasil bertemu dengan pimpinan DPRD, mereka berencana menggelar aksi lanjutan. Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Aliansi Mahasiswa Jambi melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD sebagai respons 61 terhadap penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Lead Gelombang protes terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terus berlanjut, salah satunya dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi.

1 8 Latar Informasi Gelombang demonstrasi yang terus berlanjut menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Aksi protes tersebut diadakan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi di Gedung DPRD Jambi pada tanggal 23 Oktober 2023. Kutipan Sumber "Keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap merusak prinsip-prinsip demokrasi

di Indonesia. 27 Mahasiswa berpendapat bahwa dinasti politik berpotensi menciptakan kekuasaan otoriter jika tidak segera dicegah dan dihentikan. Pernyataan Para mahasiswa beranggapan bahwa dinasti politik memiliki potensi untuk menciptakan pemerintahan yang otoriter jika tidak dicegah dan dihentikan segera. Struktur Skrip What Demonstrasi yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Where Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi. When 23 Oktober 2023 62 Who Aliansi Mahasiswa Jambi. Why Mengekspresikan alasan atau tujuan di balik unjuk rasa tersebut. Para mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk menentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang mereka anggap merugikan demokrasi. 1 How Mahasiswa mengadakan demonstrasi dengan berjalan kaki dari Universitas Jambi (Unja) Telanaipura menuju persimpangan 4 BI Kota Jambi. Setelah itu, mereka berorasi di tempat tersebut sebelum akhirnya bergerak ke Gedung DPRD Jambi untuk menyampaikan tuntutan mereka. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Paragraf 1: Pengantar mengenai gelombang protes yang terus berlanjut, kali ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi dengan melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Jambi. 1 7 Paragraf 2: Pernyataan dari Koordinator Aliansi Mahasiswa Jambi, Reza Kurniawan, yang menyatakan tuntutan 63 untuk DPRD tidak mengesahkan atau menolak keputusan MK. Paragraf 3: Penjelasan sikap para mahasiswa menentang keputusan MK yang memungkinkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres dan harapan agar keputusan tersebut digagalkan. Paragraf 4: Penilaian bahwa putusan MK dinilai merusak demokrasi dan berpotensi menciptakan dinasti politik yang bertentangan dengan semangat reformasi. Paragraf 5: Penyemangatan semangat perjuangan oleh Reza Kurniawan dan penegasan bahwa mereka siap untuk berjuang dalam aksi protes. Paragraf 6: Menyatakan bahwa eksistensi dinasti politik berlawanan dengan semangat reformasi dan mencatat pencalonan

Gibran sebagai langkah 64 mundur dalam proses reformasi. Paragraf 7: Penjelasan tentang jalannya aksi protes, mulai dari Universitas Jambi hingga Gedung DPRD Jambi, serta rencana untuk menggelar aksi lanjutan yang lebih besar. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Penekanan utama dalam artikel berita ini adalah tentang protes dan penolakan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Berita menyoroti sikap keras dan determinasi para mahasiswa dalam menentang keputusan MK, serta menyampaikan pernyataan mereka yang menilai bahwa keputusan tersebut merusak demokrasi dan berpotensi menciptakan dinasti politik yang bertentangan dengan semangat reformasi Gambar yang dipakai dalam cover penulisan berita tersebut yaitu foto para Aliansi mahasiswa yang sedang unjuk rasa didepan halaman Gedung DPRD Jambi. 65 Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun dengan memberikan informasi mengenai protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Pengantar: Berita dimulai dengan pengenalan bahwa gelombang protes menentang keputusan MK terus berlanjut, kali ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi. 1 7 8 21 Tuntutan dan Alasan Protes: Koordinator Aliansi Mahasiswa Jambi, Reza Kurniawan, menuntut agar DPRD tidak mengesahkan atau menolak keputusan MK. Penjelasan mengenai alasan protes, yaitu pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres dan potensi terbentuknya dinasti politik. Penilaian Terhadap Keputusan MK: Menyoroti penilaian bahwa keputusan MK dinilai merusak demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi. Semangat Perjuangan Mahasiswa: Penegasan bahwa mahasiswa siap untuk terus berjuang melalui aksi protes, bahkan dengan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar jika diperlukan. Penjelasan Jalannya Aksi: Menyajikan informasi tentang jalannya aksi protes, mulai dari Universitas Jambi hingga Gedung DPRD Jambi, dan rencana untuk menggelar aksi lanjutan yang lebih besar. Informasi yang ditekankan dalam

REPORT #22148071

berita ini adalah penolakan dan kritik yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi terhadap keputusan MK, serta penekanan pada semangat perjuangan mahasiswa dalam menegakkan demokrasi dan mencegah terbentuknya dinasti politik.

2. Struktur Skrip Alur berita ini mengikuti kronologi peristiwa protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi, dari unjuk rasa di Gedung DPRD Jambi hingga rencana untuk menggelar aksi lanjutan. Penekanan pada tuntutan, alasan protes, dan semangat perjuangan mahasiswa memperkuat alur berita ini dalam menyampaikan pesan protes dan penolakan mereka terhadap keputusan MK.

3. Struktur Tematik Topik yang diangkat dalam berita ini adalah penolakan dan demonstrasi mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Topik ini disajikan dengan menyoroti aksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Jambi di Gedung DPRD Jambi. Artikel menyajikan tuntutan, alasan protes, dan semangat perjuangan mahasiswa dalam menentang keputusan MK. Penulisan tema ini menggambarkan aksi mahasiswa sebagai respons terhadap isu politik dan hukum yang signifikan, menekankan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam mendorong perubahan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

4. Struktur Retoris Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini cenderung formal. Meskipun beberapa elemen seperti kutipan langsung dan bahasa emosional dapat menambahkan dimensi personal, gaya penulisan secara keseluruhan tetap mengikuti standar formal dalam penyampaian informasi. Penekanan pada argumen, tuntutan, dan analisis mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi membuat berita ini terdengar serius dan mengikuti norma-norma penulisan jurnalisme. Penggunaan analogi "keberadaan dinasti politik bertentangan dengan semangat reformasi yang menghentikan" untuk menunjukkan kontradiksi antara nilai-nilai reformasi dan praktik politik saat ini.

E. Analisis Artikel Berita Judul : Anwar Usman: Saya Sadar Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Kuat Muatan Politiknnya Sumber : Okezone.com Tanggal : 8 November 2023 Ringkasan : Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar

REPORT #22148071

Usman mengakui bahwa perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres memiliki muatan politik yang kuat. Meskipun demikian, Anwar menyatakan bahwa sebagai hakim konstitusi, ia tetap berpegang pada asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku, serta memutuskan berdasarkan hati nurani. Anwar juga menegaskan bahwa ia tidak pernah takut terhadap tekanan atau fitnah, bahkan saat ada tuduhan bahwa MK menjadi "Mahkamah Keluarga".

Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan 67 Struktur Sintaksi Judul Anwar Usman: Saya Sadar Putusan Batas Usia Capres- Cawapres Kuat Muatan Politiknya Lead Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan bahwa ia menyadari bahwa perkara 90/PUU- XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden sangat kental dengan muatan politik. Latar Informasi Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengakui muatan politik kuat dari perkara 90/PUU- XXI/ 2023 mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Anwar juga menegaskan bahwa sebagai hakim konstitusi, dia memutuskan berdasarkan asas- asas dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa takut akan tekanan dari siapapun. Selain itu, Anwar juga membahas fitnah yang menyerang dirinya setelah memutuskan perkara tersebut, dengan tuduhan bahwa MK menjadi "Mahkamah Keluarga".

Kutipan Sumber "Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap merusak demokrasi di Indonesia. 27 Para mahasiswa berpendapat bahwa dinasti politik berpotensi menciptakan kekuasaan yang otoriter jika tidak segera dicegah dan dihentikan

Pernyataan "Saya menyadari sepenuhnya bahwa ketika menangani kasus terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (PUU) Pemilu, terutama yang berkaitan dengan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, kasus tersebut memiliki dimensi politik yang sangat signifikan. - Anwar Usman Struktur Skrip What

Pernyataan yang dibuat oleh Anwar Usman terkait perkara 90/PUU-XXI/ 2023 mengenai batas usia Capres dan Cawapres, serta tanggapannya terhadap fitnah yang dialamatkan kepadanya. Where Gedung Mahkamah KOnstitusi (MK) Jakarta. 68 When 8 November 2023 Who Anwar Usman,

eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengeluarkan pernyataan mengenai kasus 90/PUU- XXI/2023 mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, dan juga responsnya terhadap tuduhan fitnah yang ditujukan kepadanya. Why Pernyataan Anwar Usman yang mengetahui bahwa isu mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden memiliki implikasi politis yang signifikan dan dia memimpin sidang yang membahas hal tersebut. How Anwar Usman memutuskan sesuatu berdasarkan hati Nurani, prinsip-prinsip hukum, dan keyakinannya sebagai seorang hakim konstitusi. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Setiap paragraf dalam berita ini menceritakan tentang pernyataan dan pandangan Anwar Usman mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Paragraf 1: Anwar Usman menyatakan bahwa perkara tentang batas usia Capres dan Cawapres memiliki muatan politik yang sangat kuat, namun dia sebagai hakim konstitusi tetap menjunjung tinggi asas- asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Paragraf 2: Anwar Usman menegaskan bahwa dia tidak takut terhadap tekanan apapun dalam memutuskan suatu perkara dan selalu bertindak berdasarkan hati nurani serta keyakinannya sebagai seorang hakim yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Paragraf 3: Anwar Usman mengungkapkan bahwa dia telah menjadi korban fitnah 69 yang keji setelah memutuskan perkara tentang batas usia Capres dan Cawapres, di mana banyak pihak mengatakan bahwa MK telah menjadi Mahkamah Keluarga. Paragraf 4: Anwar Usman menegaskan bahwa keputusan MK tidak hanya berlaku untuk saat ini, tetapi juga berdampak untuk generasi mendatang, berbeda dengan keputusan politisi yang seringkali didasarkan pada kepentingan pemilu. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Dengan penekanan pada kesadaran akan muatan politik, kepatuhan pada prinsip hukum, penolakan terhadap fitnah, dan tanggapan terhadap kritik, berita ini memberikan gambaran komprehensif tentang pandangan dan sikap Anwar Usman terhadap kasus tersebut. Gambar yang dipakai dalam cover penulisan berita tersebut yaitu foto anwar usman didepan

halaman yang bertuliskan “Mahkamah Konstitusi dengan pose dua tangan diangkat keatas. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun secara berurutan, dimulai dengan pernyataan Anwar Usman mengenai muatan politik dalam perkara tentang batas usia Capres dan Cawapres. Kemudian, berita menjelaskan bahwa Anwar Usman tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan tidak takut terhadap tekanan politik dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi. Selanjutnya, berita menyoroti bahwa Anwar Usman menghadapi fitnah dan kritik terkait keputusan MK, namun dia menegaskan bahwa keputusan tersebut memiliki dampak jangka panjang yang penting bagi generasi mendatang. Informasi yang ditekankan dalam berita ini adalah pandangan dan sikap Anwar Usman terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan olehnya dan implikasi politik serta dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Berita menyoroti 70 kesadaran akan muatan politik dalam keputusan hukum, prinsip kepatuhan pada hukum, penolakan terhadap fitnah, dan tanggapan terhadap kritik yang dialamatkan padanya. 2. Struktur Skrip Aalur berita ini mengikuti urutan kronologis pernyataan dan tanggapan Anwar Usman terhadap isu yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Anwar Usman tentang Muatan Politi, Anwar Usman menyatakan kesadarannya akan muatan politik dalam perkara batas usia Capres dan Cawapres yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dia mengakui bahwa perkara tersebut memiliki implikasi politik yang kuat. Pernyataan Kepatuhan pada Prinsip Hukum, Anwar Usman menegaskan bahwa meskipun menyadari muatan politik dalam kasus tersebut, dia tetap mematuhi prinsip- prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menekankan pentingnya independensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugas mereka. Pemberitahuan tentang Fitnah yang Diterima, Anwar Usman mengungkapkan bahwa dia menjadi korban fitnah terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres dan Cawapres. Dia menunjukkan sikap teguh dalam menghadapi tuduhan dan kritik yang tidak beralasan. Tanggapan Terhadap Kritik, Anwar Usman memberikan tanggapannya

REPORT #22148071

terhadap kritik yang dialamatkan padanya, menegaskan bahwa keputusan MK memiliki dampak jangka panjang yang mempengaruhi generasi mendatang. Ini menunjukkan pentingnya pertimbangan jangka panjang dalam pembuatan keputusan hukum.

3. Struktur Tematik Tema yang diangkat dalam berita ini adalah kesadaran akan muatan politik dalam keputusan hukum, prinsip kepatuhan pada hukum, penolakan terhadap fitnah, dan tanggapan terhadap kritik. Tema ini ditulis dengan memberikan sorotan pada pernyataan dan sikap Anwar Usman sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan MK tentang batas usia Capres dan Cawapres. Secara keseluruhan, tema-tema ini ditulis dengan memberikan pernyataan langsung dari Anwar Usman serta menguraikan konteks dan implikasi dari pernyataan-pernyataan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap dan pandangan Anwar Usman terhadap isu yang diangkat.

71 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan pernyataan langsung dari Anwar Usman untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada pembaca. Berita ini menggunakan bahasa yang formal, yang sesuai dengan gaya penulisan berita dalam konteks jurnalisme. Hal ini tercermin dalam penggunaan struktur kalimat yang terorganisir dengan baik dan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan lugas kepada pembaca.

F. Analisis Artikel Berita Judul : Putusan MK Hanya Bisa Di Sanksi Moril, Mahfud Minta Rakyat Tunjukkan di 14 Februari.

Sumber : Okezone.com Tanggal : 8 Desember 2023 Ringkasan : Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menjawab pertanyaan mahasiswa terkait putusan MK yang dipandang melukai akal waras dan sarat akan dinasti politik. Mahfud menjelaskan bahwa meskipun Gibran sah sebagai Cawapres, pamannya, Anwar Usman, telah dicopot dari jabatannya sebagai sanksi etik. Namun, Mahfud menekankan bahwa tidak ada hukuman lain yang bisa diberikan, kecuali sanksi moral sosial di Masyarakat.

Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Putusan MK Hanya Bisa Di Sanksi Moril, Mahfud Minta

Rakyat Tunjukkan di 14 Februari Lead Dalam acara dialog kebangsaan bersama pelajar mahasiswa Indonesia se-Malaysia yang bertajuk 'Pemilu Demokratis Menuju Indonesia Emas' di World Trade Centre Kuala Lumpur pada Jumat, 8 Desember 2023, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, sekali lagi dimintai pandangan mengenai kontinuitas politik dalam konteks dinasti. Latar Informasi tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan seorang mahasiswa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap memiliki muatan politik dan melukai akal sehat, terutama terkait dengan dinasti 72 politik. Mahfud menjelaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, ada sanksi moral dan sosial yang bisa timbul, termasuk pemilihan pemimpin dalam Pemilu 14 Februari 2024 sebagai bentuk hukuman lanjutan dari masyarakat. Kutipan Sumber "Kehadiran keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mungkin dikenakan sanksi secara moral semata, dengan Mahfud MD mengajukan permintaan kepada warga untuk mengekspresikannya pada tanggal 14 Februari. Pernyataan Mahfud MD menekankan keterbatasan dalam sanksi yang dapat diberikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, terutama terkait dengan isu dinasti politik. Pernyataan tersebut menekankan bahwa sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi moral, seperti sanksi etik dan sanksi sosial di Masyarakat. Struktur Skrip What Tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan tentang putusan Mahkamah KONstitusi yang memengaruhi Keputusan politik dan isu dinasti politik terkait Cawapres dan Gbran Rakabuming Raka. Where World Trade Centre Kuala Lumpur, pada Jumat (8/12/2023). When Jumat, 8 Desember 2023. Who Mahfud MD, calon wakil presiden (Cawapres) Why Justifikasi di balik pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh Mahfud MD. Dia menjelaskan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah legal dan mengikat, isu dinasti politik yang muncul menjadi perhatian. How Mekanisme yang diajukan oleh Mahfud MD untuk memberikan hukuman lanjutan, baik melalui 73 sanksi sosial maupun melalui proses demokratis. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Pertanyaan Mahasiswa tentang Dinasti

Politik: Paragraf ini membahas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa Abdul Rahman dari Universiti Teknologi Mara kepada Mahfud MD mengenai tanggapannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap melukai akal waras dan berpotensi menciptakan dinasti politik. Tanggapan Mahfud MD tentang Putusan MK: Paragraf ini menjelaskan tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan mahasiswa, di mana dia menyatakan bahwa meskipun putusan MK sudah legal dan mengikat, hal itu tidak meniadakan isu politik dinasti. Dia menjelaskan bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai Cawapres, pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik dan tidak bisa lagi memimpin sidang yang berkaitan dengan Pemilu. Sanksi Moral dan Hukuman Lanjutan: Paragraf ini membahas sanksi moral dan hukuman lanjutan yang bisa diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menyebutkan bahwa selain sanksi etik, juga terdapat sanksi sosial di masyarakat, namun tidak ada lagi yang bisa dilakukan secara hukum terhadap pihak yang bersangkutan. Hukuman Lebih Lanjut melalui Pemilu: Paragraf ini mengungkapkan saran Mahfud MD kepada masyarakat untuk memberikan hukuman lebih lanjut kepada mereka yang terlibat dalam kasus tersebut melalui hak suara dalam Pemilu 14 Februari 2024. Dia menekankan bahwa pilihan masyarakat dalam pemilu dapat dianggap sebagai hukuman 74 lebih lanjut terhadap mereka yang terlibat dalam kasus tersebut. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Penekanan dalam artikel berita ini terutama pada tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan mahasiswa tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial terkait dinasti politik. Mahfud MD menegaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian. Dia menyoroti bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai calon wakil presiden (Cawapres), pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik. Mahfud MD juga menekankan bahwa masyarakat dapat memberikan sanksi moral melalui hak suara dalam

pemilihan umum yang akan datang. Gambar yang digunakan dalam artikel cover berita ini adalah yaitu foto Mahfud MD yang sedang menjadi pembicara. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun dengan memperkenalkan konteks dialog kebangsaan antara Mahfud MD dan seorang mahasiswa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dinasti politik. Informasi yang ditekankan adalah tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan mahasiswa tersebut, di mana dia menjelaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian. Mahfud MD menyoroti bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai calon wakil presiden (Cawapres), pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik. Mahfud MD juga menekankan bahwa masyarakat dapat memberikan sanksi moral melalui hak suara dalam pemilihan umum yang akan datang. Berita ini mencoba menekankan tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan mahasiswa tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial terkait dinasti politik. Mahfud MD menegaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian. 2. Struktur Skrip Berita ini dimulai dengan pemberian pertanyaan oleh seorang mahasiswa kepada Mahfud MD dalam sebuah dialog kebangsaan di World Trade Centre Kuala Lumpur. Mahasiswa tersebut menanyakan tanggapan Mahfud MD terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial terkait dinasti politik. Kemudian, Mahfud MD memberikan tanggapannya, menjelaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian. Dia juga menyoroti bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai calon wakil presiden (Cawapres), pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik. Mahfud MD menekankan bahwa masyarakat dapat memberikan sanksi moral melalui hak suara dalam pemilihan umum yang akan datang. Alur berita ini mengikuti urutan pertanyaan dari mahasiswa, tanggapan Mahfud MD, dan penjelasan lebih lanjut dari Mahfud MD tentang isu tersebut. 3. Struktur Tematik Tema yang diangkat dalam

berita ini adalah tanggapan Mahfud MD terhadap isu kontroversial tentang dinasti politik, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka. Tema ini ditulis dengan menyajikan dialog antara Mahfud MD dan seorang mahasiswa yang menanyakan pendapatnya tentang putusan MK terkait dinasti politik. Mahfud MD menjelaskan bahwa meskipun putusan MK mengikat secara hukum, isu politik dinasti tetap menjadi perhatian. Dia juga menyoroti bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka sah sebagai calon wakil presiden, pamannya yang terlibat dalam kasus tersebut telah dikenakan sanksi etik. Mahfud MD menekankan bahwa masyarakat dapat memberikan sanksi moral melalui hak suara dalam pemilihan umum yang akan datang. Dengan demikian, tema tentang dinasti politik dan putusan MK disampaikan melalui dialog dan tanggapan Mahfud MD dalam artikel ini.

7.6 4. Struktur Retoris Perangkat bahasa yang digunakan

terbilang formal karena berita ini mengutamakan penyampaian informasi yang jelas dan objektif mengenai suatu isu penting dalam konteks politik. Kutipan langsung dari Mahfud MD digunakan untuk menyampaikan pendapat langsung dari narasumber. Mahfud MD menggunakan argumentasi untuk menjelaskan pandangannya terkait dengan isu dinasti politik dan putusan MK. Penggunaan bahasa persuasif untuk mempengaruhi pemikiran pembaca, terutama dalam memberikan penjelasan dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

G. Analisis Artikel Berita

Judul : Disinggung Putusan MK, Prabowo: kita BUKAN Anak Kecil Mas Anies, Anda Juga Paham. Sumber : Okezone.com Tanggal : 12 Desember 2023 Ringkasan : Dalam debat calon presiden 2024, Anies Baswedan menyindir Prabowo Subianto tentang pelanggaran etika dalam putusan MK. Prabowo menegaskan bahwa keputusan MK sudah final dan harus dilaksanakan, menegaskan bahwa Anies juga seharusnya faham. Prabowo juga menyatakan bahwa semua pilihan ada di tangan rakyat, dan jika dinilai melanggar hukum, rakyat tidak perlu memilihnya. Dia juga menyatakan bahwa akan legowo jika tidak terpilih dan tidak takut

kehilangan jabatan. Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Disinggung Putusan MK, Prabowo: kita BUKAN Anak Kecil Mas Anies, Anda Juga Paham. Lead Anies Baswedan, calon presiden dengan nomor urut 1, mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden kepada Prabowo Subianto, yang merupakan calon presiden dengan nomor urut 2. Latar Informasi pertanyaan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto mengenai perasaannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres). Prabowo menegaskan bahwa keputusan 77 MK sudah final dan harus dilaksanakan, serta menekankan bahwa semua pilihan ada di tangan rakyat. Kutipan Sumber "Perbuatan melanggar kode etik telah ditindaklanjuti dan diputuskan, pada saat itu oleh pihak berwenang yang bersangkutan. Selanjutnya, langkah-langkah tersebut telah diambil dan masih menjadi subjek perdebatan, ujar Prabowo. Pernyataan Pernyataan dalam berita tersebut menunjukkan upaya Prabowo untuk menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) sudah final dan harus dijalankan. Dia juga menekankan pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam menentukan nasib pemimpin mereka. Hal ini mencerminkan dinamika politik terkait kewenangan hukum dan partisipasi demokratis dalam proses pemilihan presiden.. Struktur Skrip What Tanggapan Mahfud MD terhadap pertanyaan tentang putusan Mahkamah KONstitusi yang memengaruhi Keputusan politik dan isu dinasti politik terkait Cawapres dan Gbran Rakabuming Raka. Where Berita ini berkaitan dengan dialog dan debat antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang terjadi di KPU, Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2023. When 12 Desember 2023. Who Prabowo Subianto & Anies Baswedan Why Anies Baswedan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelanggaran etika berat yang dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perasaan Prabowo terkait dengan putusan tersebut How Anies Baswedan menyatakan perasaannya terkait

dengan putusan Mahkamah Konstitusi 78 (MK) tentang pelanggaran etika berat yang terkait dengan Prabowo Subianto. Prabowo merespons pertanyaan tersebut dalam konteks debat antar calon presiden. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Anies Baswedan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia untuk kandidat presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Anies bertanya kepada Prabowo Subianto tentang perasaannya terkait putusan MK tentang pelanggaran etika berat. Prabowo menekankan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia kandidat presiden dan wakil presiden bersifat definitif dan harus dijalankan, sambil menegaskan bahwa Anies seharusnya memperoleh pemahaman yang sama akan hal tersebut. Prabowo menyampaikan bahwa seluruh keputusan berada dalam wewenang masyarakat, dan bila tandem nomor dua (Prabowo dan Gibran) terlihat melanggar ketentuan hukum, maka masyarakat tidaklah diharuskan untuk memilihnya. Prabowo menyatakan bahwa dia akan menerima hasil pemilihan dengan legowo, tanpa takut kehilangan jabatan. Struktur Kata, idiom, gambar Penekanan dalam berita ini Retoris Foto, grafis terutama berfokus pada interaksi antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dalam debat calon presiden tahun 2024, khususnya mengenai pertanyaan Anies tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran etika berat yang terkait dengan Prabowo. Berita ini juga menyoroti tanggapan Prabowo terhadap pertanyaan tersebut, menekankan pentingnya 79 kepatuhan terhadap keputusan MK dan penekanan pada keputusan yang berada di tangan rakyat. Foto yang dipergunakan dalam sampul laporan ini menampilkan citra Prabowo Subianto ketika berlangsungnya perdebatan Pemilihan Umum, dengan sikap tubuh yang menyerupai sikap seorang yang menyampaikan permohonan maaf. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun dengan mengikuti percakapan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, yang bertanya dan menjawab mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran etika berat yang terkait dengan Prabowo. Informasi yang berusaha ditekankan adalah pandangan kedua

kandidat tentang putusan MK dan tanggapan mereka terhadap isu tersebut, serta penekanan pada kepatuhan terhadap hukum dan keputusan yang berada di tangan rakyat. Fokus berita ini adalah tanggapan Prabowo Subianto terhadap pertanyaan Anies Baswedan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan adanya pelanggaran etika serius yang terkait dengan Prabowo. Prabowo menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan MK dan menekankan bahwa keputusan itu harus dijalankan.

2. Struktur Skrip Alur penulisan dalam berita ini dimulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto mengenai perasaannya terkait putusan MK tentang pelanggaran etika. Kemudian, Prabowo memberikan tanggapannya dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan MK dan menyoroti bahwa semua pilihan ada di tangan rakyat. Dia juga menekankan bahwa dirinya akan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Alur penulisan ini mengikuti urutan pertanyaan, respons, dan penekanan pada poin-poin penting yang ingin disampaikan oleh Prabowo.

3. Struktur Tematik Topik yang diperbincangkan dalam laporan tersebut adalah tanggapan yang diberikan oleh Prabowo Subianto terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Anies Baswedan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelanggaran etika dan batas usia untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Tema ini ditulis dengan menyoroti interaksi antara kedua calon presiden tersebut dalam sebuah debat, di mana Prabowo memberikan responsnya secara tegas terhadap pertanyaan Anies dan menegaskan pandangannya terkait keputusan MK serta peran penting yang dimiliki oleh rakyat dalam proses pemilihan. Selain itu, tema ini juga menyoroti sikap lapang dada yang diungkapkan oleh Prabowo terkait hasil pemilihan dan keterbukaannya terhadap opsi jika tidak terpilih.

4. Struktur Retoris Dalam berita ini, digunakan beragam perangkat bahasa yang mencerminkan kesan formal dan resmi. Contohnya, dalam sesi debat pertama antara calon presiden 2024, Anies Baswedan mempertanyakan perasaan Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi

menyatakan adanya pelanggaran etik yang signifikan dalam putusannya. Terdapat pula penekanan dari Prabowo bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden sudah bersifat final dan harus dijalankan. Penulisan ini memperkuat kesan formal dan mempertegas argumen yang disampaikan dalam konteks wawancara atau dialog antar calon presiden.

4.2.2 Framing Pemberitaan Putusan MK Terkait Perubahan Batasan Usia Minimal Capres & Cawapres di Kompas.com

Analisis dilakukan pada pemberitaan yang diterbitkan oleh Kompas.com dengan topik Putusan MK terkait perubahan Batasan usia minimal Capres dan Cawapres di Okezone.com pada periode 16 Oktober 2023 – 14 Februari 2024. Pemberitaan yang akan dipilih dan dianalisis dianggap dapat memenuhi aspek- aspek yang ada dalam analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki atas dasar analisis Sintaksi, Skrip, Tematik dan Retoris, berfokus juga terhadap pembahasan tentang perubahan peraturan Batasan usia Capres dan Cawapres.

- 17 Oktober 2023 4. Babak Baru Polemik Putusan MK soal Batas Capres dan Cawapres, Polisi Kini Terlibat, pada 18 November 2023
5. Putusan MK soal Batas Usia Capres dan Cawapres Dianggap Mengacu ke Syarat Peminan KPK, pada 19 November 2023
6. MK: Anwar Usman Tak Ikut Putus “Gugatan Ulang” Usia Capres- awapres, pada 21 November 2023
7. Syarat Usia Digugat Lagi ke MK, Pemohon Minta Pilpres Tanpa Prabowo- Gibran, pada 19 November 2023
8. Pertimbangan MK Nyatakan Putusan Usia Cawapres Tak Cacat Formil walau Langgar Etik, pada 16 Januari 2024

Dari seluruh judul berita tersebut, peneliti berupaya untuk menganalisis bagaimana penyajian berita mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perubahan Batasan Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk Pemilihan Umum 2024 secara terperinci dan jelas menggunakan analisis framing yang diajukan oleh Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis sebuah berita dengan empat konsep, yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retorika. Berikut adalah rincian analisis dari setiap berita yang Berdasarkan

penjelasan tersebut, pemberitaan yang dianalisis dengan jumlah 7 berita terpilih, dengan judul: 1. Putusan MK: Kepala Daerah Belum Berusia 40 Tahun Bisa Maju Pilpres, Berlaku Mulai Pemilu 2024, pada 16 Oktober 2023 2. MK Dinilai Lampauio Kewenangan, Menyimpang dari Konstitusi sebab Ubah Syarat Capres- Cawapres, pada 17 Oktober 2023 3. Saat siaat Anwar Usman Ubah Putusan MK 180 Derajat Diungkap..., pada telah dipilih oleh peneliti dari situs Kompas.com. H. Analisis Artikel Berita Judul : Putusan MK: Kepala Daerah Belum Berusia 60 Tahun Bisa Maju Pilpres, Berlaku Mulai Pemilu 2024. Sumber : Kompas.com 82 Tanggal : 16 Oktober 2023 Ringkasan : Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). 5 6 11 Putusan ini memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Putusan tersebut mulai berlaku pada Pemilu 14 Februari 2024.

Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Putusan MK: Kepala Daerah Belum Berusia 60 Tahun Bisa Maju Pilpres, Berlaku Mulai Pemilu 2024. Lead Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan gugatan dalam perkara nomor 90/PUU- XXI/2023 yang berkaitan dengan batasan usia minimum bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Latar Informasi Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan gugatan terkait ketentuan mengenai batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, MK juga memutuskan bahwa individu yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. 6 19 Putusan ini dilatarbelakangi oleh permohonan gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum

Universitas Surakarta (Unsa). Kutipan Sumber Hingga seluruhnya norma yang dimaksudkan "berumur minimum 40 tahun atau pernah menjabat dalam suatu jabatan yang terpilih melalui proses pemilihan rakyat termasuk pemilihan kepala daerah tambahan lagi, regulasi Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana disebutkan 83 dalam keputusan yang bersangkutan berlaku mulai dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya " tutur Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah ketika membacakan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada hari Senin (16/10/2023). Pernyataan Mahkamah Konstitusi memungkinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mengajukan diri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai pemimpin di tingkat lokal atau jabatan lain yang diperoleh melalui proses pemilihan umum. Struktur Skrip What Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah persyaratan usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden(cawapres). Where Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. When 16 Oktober 2023. Who Mahkamah Konstitusi (MK) Why Mahkamah Konstitusi mengubah persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden? How Proses perubahan persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Paragraf 1 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membenarkan tuntutan yang berkaitan dengan batasan usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagaimana yang diatur dalam 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Paragraf 2: Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menguraikan ketentuan terbaru yang menyatakan bahwa individu harus memiliki usia minimum 40 tahun atau memiliki pengalaman sebelumnya dalam menjabat melalui proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Paragraf 3: Pandangan akademisi menyatakan bahwa penetapan batas usia minimum 40 tahun untuk kandidat presiden dan wakil presiden dapat menghambat potensi kepemimpinan generasi muda dalam aras negara. 13 18 32 Paragraf

4: Tuntutan ini diajukan oleh seorang individu yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum di Universitas Surakarta (Unsa) yang bernama Almas Tsaqibbirru. Dalam petisi tersebut, penggugat menyebut figur Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai figur yang memberikan inspirasi. Paragraf 5: Pemohon berpendapat bahwa Gibran Rakabuming Raka sepatutnya dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Paragraf 6: Pemohon menyatakan bahwa ketidakmungkinan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai presiden dianggap inkonstitusional, mengingat potensi besar Gibran dalam memajukan Kota Solo. Paragraf 7: Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak tiga permohonan uji materi yang serupa mengenai ketentuan usia minimum untuk calon presiden 85 dan wakil presiden, yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan beberapa kepala daerah. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Fokus pemberitaan pada artikel ini adalah perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan mengenai batasan usia minimal bagi individu yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di Indonesia. Resolusi ini mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala pemerintahan daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui proses pemilihan rakyat. Resolusi ini efektif pada Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024. Foto yang diperlihatkan pada sampul berita ini menampilkan gambar ruang sidang, khususnya meja yang digunakan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang didekorasi dengan lambang burung Garuda. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun dengan menggunakan struktur yang informatif dan kronologis untuk menjelaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta latar belakang dan implikasinya. Terdapat beberapa point dalam penyusunan berita ini, mengenai pengantar atau Lead yang menyampaikan informasi utama terkait MK yang mengabulkan guggatan, lalu ada penjelasan detail putusan di

paragraph kedua, ada juga latar belakang gugatan dan argumentasu gugatan, di akhir paragraph terdapat penolakan gugatan Secara keseluruhan, berita ini menekankan perubahan signifikan dalam persyaratan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan membuka peluang bagi calon pemimpin yang lebih muda dan memiliki pengalaman dalam jabatan terpilih. 86 2. Struktur Skrip Alur penulisan berita ini mengikuti urutan kronologis yang logis, dimulai dari pengantar yang memberikan gambaran umum, dilanjutkan dengan penjelasan detail putusan MK, latar belakang gugatan, serta argumen dan pertimbangan terkait kasus-kasus spesifik yang menjadi dasar perubahan tersebut. 3. Sktruktur Tematik Topik yang didiskusikan dalam laporan ini adalah transformasi persyaratan usia terendah bagi kandidat presiden dan wakil presiden di Indonesia yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), beserta dampaknya terhadap keterlibatan politik kaum muda dan individu yang memiliki potensi dalam proses pemilihan umum. Melalui penulisan ini, tema perubahan persyaratan usia dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dipaparkan dengan jelas dan didukung oleh informasi yang relevan, seperti keputusan MK, alasan perubahan, dan kasus-kasus konkret yang menunjukkan pentingnya perubahan tersebut dalam memfasilitasi partisipasi politik yang lebih inklusif. 4. Struktur Retoris Secara keseluruhan, berita ini menggunakan bahasa formal dan memanfaatkan perangkat bahasa yang tepat untuk menyajikan informasi dengan jelas, akurat, dan obyektif. Penggunaan Kata Baku dan Istilah Hukum, Dalam berita ini, digunakan kata- kata baku dan istilah hukum yang sesuai dengan konteks, seperti "Mahkamah Konstitusi", "capres", "cawapres", dan "gugatan perkar ". Pemilihan Kata yang Netral, Penggunaan kata-kata yang netral dan tidak memihak menunjukkan objektivitas berita ini dalam menyampaikan informasi. Berita ini disusun secara kronologis, mulai dari pengantar, penjelasan putusan MK, latar belakang gugatan, hingga argumen dan pertimbangan yang mendukung perubahan aturan usia minimal.

. Analisis Artikel Berita Judul : MK Dinilai Lampaui Kewenangan,

REPORT #22148071

Menyimpang dari Konstitusi SebabUbah Syarat Capres-Cawapres. Sumber : Kompas.com

Tanggal : 17 Oktober 2023 87 Ringkasan : Ketua Dewan Nasional Setara Institue, Hendradi menilai bahwa MK telah melampaui kewenangannya dengan mengubah syarat usia capres-cawapres, seharusnya menjadi kewenangan presiden dan DPR. Kritik juga dilayangkan terhadap inkonsistensi MK dalam menegakkan konstitusi RI. Sebelumnya, MK menolak uji materi terkait hal serupa, tetapi kini mengubah pandangan. Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Mk Dinilai Lampau Kewenangan, Menyimpang dari Konstitusi SebabUbah Syarat Capres-Cawapres Lead Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah melampaui batas wewengannya dalam memutuskan mengenai persyaratan usia yang berlaku bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Latar Informasi Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap telah melampaui kewenangannya dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden. Kritik tersebut mencakup pendapat bahwa MK seharusnya tidak memiliki wewenang untuk mengubah syarat tersebut, melainkan kewenangan tersebut seharusnya menjadi milik presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang. Kutipan Sumber Hendaridi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, mempertimbangkan bahwa penetapan batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden seharusnya merupakan prerogatif presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif, bukan Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak peduli apa alasan yang digunakan, MK telah melewati wewenang yang diberikan padanya " Hendaridi menyatakan kepada Kompas.com pada hari Selasa, 17 Oktober 2023. MK telah menyalahi batas wewenang DPR dan presiden, kedua lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang, karena dengan keputusan mereka untuk menerima dan memodifikasi isi 88 pasal tersebut, berarti MK telah berperan sebagai legislator positif " imbuhnya. Pernyataan kritik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap telah melampaui kewenangannya dengan mengubah syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selain itu, juga ada kritik terhadap

inkonsistensi dalam putusan MK serta pandangan bahwa MK telah menafsirkan ketentuan open legal policy sesuai dengan keinginan penguasa. Akhirnya, pernyataan ini juga mencela bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dituduh bermaksud untuk memfasilitasi keturunan presiden agar dapat meneruskan pemerintahan orang tuanya serta memperkokoh hegemoni politik keluarga tertentu. Struktur Skrip What Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah melanggar batas kewenangannya dengan melakukan perubahan terhadap persyaratan usia yang berlaku bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Where Jakarta, tempat berlangsungnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). When Senin, 16 Oktober 2023. Who Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendaridi Why Pertimbangan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah dianggap melanggar batas kewenangannya dengan memodifikasi ketentuan tentang batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden, padahal secara konstitusional 89 wewenang semacam itu seharusnya menjadi prerogatif presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). How Mahkamah Konstitusi memperbolehkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mengajukan diri sebagai kandidat presiden atau wakil presiden, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala pemerintahan lokal atau posisi lain yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Artikel ini mencakup berbagai perspektif, termasuk pendapat dari Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendaridi, serta pemikiran terkait implikasi politik dan konstitusional dari keputusan tersebut. Pendapat Hendaridi yang menyatakan bahwa MK telah melampaui kewenangannya dalam mengubah syarat usia capres-cawapres, yang seharusnya menjadi kewenangan presiden dan DPR. Kritik terhadap inkonsistensi MK dalam menegakkan konstitusi, dengan menyoroti perbedaan pendekatan dalam putusan sebelumnya. Implikasi politik dari keputusan MK terhadap kontestasi politik, termasuk kemungkinan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Persepsi

bahwa keputusan MK ini mencerminkan judisialisasi politik otoritarianisme dan mendukung dinasti politik tertentu. Struktur Kata, idiom, gambar Penekanan dalam berita ini adalah pada kritik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap melampaui kewenangannya dalam mengubah syarat usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kritik ini Retoris Foto, grafis 90 disampaikan oleh Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, yang menegaskan bahwa perubahan syarat usia capres-cawapres seharusnya menjadi kewenan Selain itu, artikel ini juga menyoroti inkonsistensi dalam penegakan konstitusi oleh MK, dengan menunjukkan perbedaan pendekatan dalam putusan sebelumnya. gan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan MK. Gambar yang digunakan dalam cover berita ini adalah foto ruangan sidang, tepatnya foto meja hakim MK dan adalambing burung Garuda. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Artikel ini tersusun secara analitis untuk menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan usia bagi calon presiden dan wakil presiden, serta tanggapan terhadap keputusan tersebut. Berita ini disusun untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang kritik terhadap keputusan MK dan implikasinya dalam konteks politik dan hukum di Indonesia. Tedapat pendahuluan yang disusul dengan pernyataan Hendrardi Tentang Kewenangan MK, Inkonsistensi MK dalam penegakan Konstitusi, Implikasi Politik, Perbandingan dengan putusan sebelumnya, pernyataan MK dan detail putusan lalu ditutup dengan menyimpulkan tanggapan terhadap Keputusan MK dan menyoroti dampak serta implikasinya dalam konteks politik dan penegakan hukum di Indonesia. Berita ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kritik terhadap keputusan MK dan implikasinya dalam konteks politik dan hukum di Indonesia. 2. Struktrur Skrip Alur penulisan berita ini mengikuti urutan kronologis yang logis, dimulai dari pengenalan isu, pembahasan kritik, penjelasan inkonsistensi, analisis implikasi politik, hingga penutup yang merangkum keseluruhan artikel.

Laporan diawali dengan pengenalan permasalahan inti, yakni kritik terhadap keputusan yang diambil oleh 91 Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ketentuan usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, berita menyajikan pernyataan dari Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, yang mengkritik keputusan MK karena dianggap melampaui kewenangan. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai inkonsistensi dalam penegakan konstitusi oleh MK, dengan menyoroti perbedaan pendekatan antara putusan sebelumnya dan putusan terkait syarat usia capres-cawapres. Berita menyoroti implikasi politik dari keputusan MK, termasuk kemungkinan kandidasi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024 dan persepsi terhadap dukungan MK terhadap dinasti politik tertentu.

3. Struktur Tematik Topik yang dibahas dalam artikel ini adalah kritik yang ditujukan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai modifikasi ketentuan usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Tema ini ditulis dalam berita dengan memberikan penekanan pada Kritik terhadap Kewenangan MK. Inkonsistensi dalam Penegakan Konstitusi. Implikasi Politik dan Detail Putusan MK Oleh karena itu, substansi kritik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden diuraikan dalam artikel ini dengan fokus yang ditekankan pada dimensi kewenangan, ketidakkonsistenan, dampak politik, serta rincian keputusan MK.

4. Struktur Retoris Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini antara lain Berita ini menggunakan kutipan langsung dari narasumber, seperti Hendardi dan pernyataan dari Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memberikan informasi yang akurat dan mendukung argumen yang disampaikan. Digunakan istilah hukum dan terminologi yang khusus, seperti Mahkamah Konstitusi", "capres", "cawapres", "undang-undang", dan "putusan M ", untuk menggambarkan isu yang dibahas dengan tepat. Berita ini menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan standar penulisan berita. Frasa yang baku dan struktur kalimat yang baik digunakan untuk menjaga keprofesionalan dan keakuratan dalam penyampaian informasi.

Penggunaan kata-kata khusus yang tepat, seperti "inkonsistensi", "implikasi politik", dan "kewenanga ", untuk memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari isu yang dibahas. 92 Secara keseluruhan, berita ini menggunakan bahasa formal dan memanfaatkan perangkat bahasa yang tepat untuk menyampaikan informasi dengan jelas, akurat, dan obyektif. J .

Analisis Artikel Berita Judul : Saat Siasat Anwar Usman Ubah Putusan

MK 180 Derajat Diungkap... Sumber : Kompas.com Tanggal : 17 Oktober

2023 Ringkasan : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan

Nomor 90/PUU- XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan

calon wakil presiden (capres- cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilu mengejutkan, terutama karena adanya perubahan sikap hakim konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut. 19 47 Terdapat

dissenting opinion dari dua hakim, Saldi Isra dan Arief Hidayat. 19 Saldi

mengungkap bahwa terdapat belasan permohonan uji materi terkait syarat

usia capres- cawapres, namun hanya beberapa yang diperiksa melalui sidang pleno.

Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi

Judul Saat Siasat Anwar Usman Ubah Putusan MK 180 Derajat Diungkap...

Lead Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengajuan perkara Nomor

90/PUU-XXI/2023 terkait batasan usia bagi calon presiden dan calon

wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

menimbulkan kejutan. Latar Informasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

mengenai gugatan terkait ketentuan usia minimum untuk calon presiden

dan calon wakil presiden dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu. Berita ini menyoroti perubahan sikap hakim konstitusi

dalam memutuskan perkara tersebut, serta adanya kejanggalan dalam proses

pembahasan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kutipan

Sumber Saldi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Mahkamah 93

Konstitusi (MK) yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40

tahun untuk mengajukan diri sebagai kandidat presiden atau wakil

presiden, asalkan mereka telah memiliki pengalaman dalam memimpin suatu

wilayah administratif atau jabatan yang dipilih melalui proses pemilihan

umum. Pernyataan Pernyataan di dalam berita ini adalah kutipan dari pernyataan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat, yang termuat dalam dissenting opinion mereka saat membacakan amar putusan terkait perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi (MK).. Pernyataan kritik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap telah melampaui kewenangannya dengan mengubah syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selain itu, juga ada kritik terhadap inkonsistensi dalam putusan MK serta pandangan bahwa MK telah menafsirkan ketentuan open legal policy sesuai dengan keinginan penguasa. Terakhir, pernyataan ini juga mengkritik bahwa putusan MK tersebut diduga bertujuan untuk mempermudah anak presiden untuk melanjutkan kepemimpinan sang ayah dan meneguhkan dinasti politik tertentu. Struktur Skrip What Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyoroti batas usia minimum untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, serta modifikasi dalam mekanisme penegakan keputusan MK. Where Putusan dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat. When Senin, 16 Oktober 2023. 94 Who Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat, dan narasumber lainnya Why Putusan ini menjadi sorotan karena mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden, serta kontroversi yang terjadi selama proses pembahasan di MK. How Putusan ini dibuat setelah proses sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH) di Mahkamah Konstitusi, dengan adanya dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi yang turut mengungkapkan pandangan berbeda. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Paragraf tersebut membicarakan putusan yang diambil oleh MK terkait dengan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Sidang Putusan tersebut diumumkan dalam sebuah sidang di Gedung MK yang berlokasi di Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober

2023. Terdapat kritik terhadap putusan MK yang dianggap kontroversial oleh sejumlah pihak, yang menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat, terutama terkait dengan kewenangan MK dalam mengambil keputusan semacam itu. Beberapa hakim konstitusi, seperti Saldi Isra dan Arief Hidayat, menyampaikan dissenting opinion mereka terhadap putusan tersebut, yang menunjukkan ketidaksetujuan atau pandangan berbeda terhadap keputusan mayoritas yang diambil oleh MK. 95 Paragraf juga membahas proses pengambilan keputusan di MK, termasuk rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dihadiri oleh beberapa hakim konstitusi, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Proses ini mencakup pembahasan dan pertimbangan yang dilakukan sebelum putusan akhir diumumkan. Ada keterlibatan yang menarik perhatian terkait dengan keterlibatan Ketua MK Anwar Usman dalam proses pengambilan keputusan, yang menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Penekanan dalam berita ini lebih kepada kontroversi dan proses di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Berita ini menyoroti berbagai pandangan dan kritik terhadap keputusan MK, termasuk dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi serta masalah potensi konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman. Foto yang ditampilkan dalam sampul berita ini menampilkan gambar Anwar Usman, yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sedang memberikan pidato menggunakan mikrofon.

Analisis : 1. Struktur Sintaksis Laporan ini dipaparkan sesuai urutan waktu yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Struktur beritanya dimulai dengan pengumuman putusan MK dalam sidang di Gedung MK, dilanjutkan dengan pembahasan kontroversi dan proses di balik putusan tersebut, termasuk dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi dan masalah potensi konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman. Data yang disoroti dalam laporan ini mencakup Keputusan Mahkamah Konstitusi 96 mengenai batasan usia minimal bagi

kandidat presiden dan wakil presiden, polemik yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut yang mendapat pendapat minoritas dari sejumlah hakim konstitusi, prosedur pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, termasuk pertemuan para hakim untuk membahas dan mengadili kasus (RPH), serta peran Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dan evaluasi terhadap proses perbincangan dan penentuan keputusan di Mahkamah Konstitusi, termasuk isu potensial mengenai konflik kepentingan.

2. Struktur Skrip Alur berita ini mengikuti kronologi peristiwa seputar putusan MK dan reaksi yang muncul setelahnya. Berita dimulai dengan pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada tanggal 16 Oktober 2023, terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian, berita menyoroti kontroversi dan kritik yang muncul setelah pengumuman putusan tersebut, terutama terkait kewenangan MK dalam mengambil keputusan semacam itu. Paragraf selanjutnya membahas dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi, seperti Saldi Isra dan Arief Hidayat, yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan mayoritas yang diambil oleh MK. Berita kemudian menjelaskan proses pengambilan keputusan di MK, termasuk rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan keterlibatan Ketua MK Anwar Usman dalam proses tersebut. Paragraf terakhir menyoroti keterlibatan yang menarik perhatian terkait dengan Ketua MK Anwar Usman dalam proses pengambilan keputusan, yang menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan. 3. Struktur Tematik Topik yang diangkat dalam laporan ini mencakup polemik serta tahapan-tahapan yang terjadi di belakang keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia minimum bagi kandidat presiden dan wakil presiden. terkait keputusan MK, baik dari perspektif hukum maupun etika. Berita ini juga menyoroti proses pengambilan keputusan di MK, termasuk dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi dan potensi konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman. Dengan demikian, berita ini tidak hanya memberikan

informasi tentang putusan MK itu sendiri, 97 tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan kontroversi yang terjadi di balik layar dalam proses hukum tersebut. 4. Struktur Retoris Berita ini menggunakan bahasa formal karena mengacu pada keputusan resmi Mahkamah Konstitusi dan melibatkan argumen hukum yang serius. Gaya penulisan yang formal digunakan untuk memberikan kesan keprofesionalan dan keakuratan dalam penyampaian informasi yang bersifat legal dan politis. Penggunaan istilah "dissenting opinio" adalah salah satu contoh perangkat bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pandangan yang berbeda dari beberapa hakim konstitusi terhadap putusan mayoritas. Beberapa pertanyaan retorik digunakan untuk menimbulkan refleksi atau memancing pemikiran pembaca, terutama terkait dengan kritik terhadap proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. K. Analisis Artikel Berita Judul : Babak Baru Polemik Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Polisi Kini terlibat. Sumber : Kompas.com Tanggal : 18 Oktober 2023 Ringkasan : Polri sedang menyelidiki kasus tersebut setelah informasi RPH yang seharusnya rahasia bocor dan diberitakan oleh salah satu media massa. 10 13 18 Putusan MK tersebut memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Kontroversi muncul karena MK sebelumnya telah menolak tiga putusan mengenai usia minimal calon presiden dan wakil presiden. 13 18 45 Dalam putusan tersebut, empat hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). 10 23 31 Ada juga dugaan bahwa keputusan ini melanggengkan politik dinasti dengan membuka peluang bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Pada saat yang sama, terjadi dugaan kebocoran informasi RPH, yang menyebabkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegur sembilan hakim konstitusi karena melanggar kode etik. 12 98 Polri sedang menyelidiki lebih lanjut kasus kebocoran informasi tersebut dengan mengklarifikasi lima orang saksi. Perangkat Framing Unit

Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Babak Baru Polemik Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Polisi Kini terlibat. Lead Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia kelayakan calon presiden dan calon wakil presiden, yang berdampak pada pemecatan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, kini memasuki tahap selanjutnya. Latar Informasi Menyoroti imbas Putusan MK yang mengubah batas usia minimal Capres dan Wapres dari 40 tahun menjadi lebih renda, serta kriteria pengalaman menjadi kepala daerah sebagai syarat pencalonan, ada dugaan kebocoran informasi RPH MK terakit putusan mengenai kasus tersebut, sehingga kepolisian ikut turun tangan. [12](#) Kutipan Sumber Pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yang diutarakan oleh Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, adalah sebagai berikut:

[2](#) Pernyataan tersebut diucapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, ketika dikonfirmasi pada Jumat (17/11/2023), menyatakan bahwa laporan telah diterima dan saat ini sedang dilakukan investigasi. Saat ini, Polri telah memulai penyelidikan dengan memeriksa lima orang saksi. Namun, belum ada informasi yang pasti mengenai identitas saksi-saksi yang telah diperiksa di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia [2](#) [5](#) [13](#) " Pernyataan "Para hakim terlapor secara bersama-sama telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sesuai dengan 99 prinsip Sapta Karsa Utama mengenai kesopanan dan kepantasan [10](#) [12](#) [17](#) [23](#) [44](#) " ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, saat mengumumkan keputusan. Struktur Skrip What Proses laporan terkait dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK Where Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat When Laporan Polri tertanggal 8 November 2023. Who Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman Kepolisian (Polri) Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Pur Why Terkait kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK How Proses laporan dan penyelidikan oleh Polri terkait dugaan kebocoran informasi RPH MK Sidang pengucapan putusan oleh MKMK terhadap pelanggaran etik

oleh hakim MK. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Paragraf 1: Polisi kini terlibat dalam penyelidikan terkait dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK. **12** Paragraf 2: Pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung terkait kebocoran informasi RPH MK. Paragraf 3: Penjelasan tentang latar belakang putusan MK terkait batas usia capres- cawapres dalam UU Nomor 7 100 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diskusi seputar perubahan dalam putusan MK yang menuai kontroversi. Paragraf 4: Tanggapan dari hakim konstitusi, khususnya Saldi Isra, terkait keputusan MK yang dianggapnya bertentangan dengan putusan sebelumnya. Paragraf 5: Ungkapan perasaan Arief Hidayat terkait keganjilan dalam penjadwalan sidang dan proses hukum terkait batas usia capres-cawapres. Paragraf 6: Pembahasan tentang dugaan kebocoran informasi RPH yang menjadi sorotan setelah penerbitan laporan Majalah Tempo. Paragraf 7: Pengumuman dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai sanksi terhadap sembilan hakim konstitusi yang dianggap melanggar kode etik terkait kebocoran informasi. Paragraf 8: Proses penyelidikan oleh Polri terkait kebocoran informasi RPH MK, termasuk klarifikasi yang telah dilakukan terhadap beberapa saksi. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Penekanan utama dalam berita ini adalah: Perdebatan yang muncul akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan usia untuk kandidat presiden dan wakil presiden (calon presiden dan wakil presiden), yang kemudian menghasilkan pemecatan Anwar Usman sebagai Pimpinan MK. Partisipasi aparat kepolisian dalam investigasi terkait asumsi pelanggaran kerahasiaan dalam Sidang Konsultasi Hakim 101 Mahkamah Konstitusi (RPH MK), yang mencuat ke permukaan masyarakat menyusul terbitnya artikel oleh Majalah Tempo. Proses penyelidikan oleh Polri terkait kebocoran informasi RPH MK, termasuk klarifikasi yang telah dilakukan terhadap beberapa saksi. Penekanan tersebut menggarisbawahi kompleksitas dan dampak signifikan dari putusan MK serta

dugaan pelanggaran etika yang terkait dengan proses hukum tersebut. Gambar yang digunakan dalam cover berita ini adalah foto berlangsungnya sidang MK di ruangan sidang MK Analisis : 1. Struktur Sintaksis Laporan ini tersusun sesuai dengan urutan waktu kejadian, dimulai dari pengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia kelayakan untuk calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), sampai melibatkan aparat kepolisian dalam penyelidikan terkait dugaan peretasan informasi rapat perundingan hakim (RPH) MK. Informasi yang berusaha ditekankan dalam berita ini adalah putusan MK yang kontroversial tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, Keterlibatan polisi dalam penyelidikan terkait kebocoran informasi RPH MK, Kontroversi yang timbul seputar putusan MK dan perdebatan yang muncul di masyarakat, Dampak politik dari putusan MK, termasuk pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan dugaan melanggengkan politik dinasti dan langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. 2. Struktur Skrip Kronologi peristiwa dimulai dengan pengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia yang berlaku bagi calon presiden dan calon wakil presiden. 102 Kemudian, fokus perhatian bergeser pada keterlibatan aparat kepolisian dalam penyelidikan terkait dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK. Kontroversi muncul seiring dengan adanya perdebatan di masyarakat terkait putusan MK dan implikasinya. Setelah itu, penulis menjelaskan dampak politik dari putusan MK, seperti pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan dugaan melanggengkan politik dinasti dan langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Dengan urutan ini, pembaca dapat mengikuti perkembangan peristiwa sesuai dengan rentang waktu yang terjadi. 3. Struktur Tematik Fokus topik yang diperbincangkan dalam laporan ini adalah perdebatan dan kontroversi

mengenai keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia yang dibutuhkan bagi calon presiden dan calon wakil presiden, bersamaan dengan keterlibatan aparat kepolisian dalam penyelidikan terkait dugaan pelanggaran kerahasiaan informasi yang terjadi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK. Tema ini ditulis dengan memberikan penekanan pada pertentangan pendapat di antara hakim konstitusi, dampak politik dari putusan MK, seperti pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK, dan upaya penegakan kode etik dalam lembaga peradilan tersebut. Selain itu, tema ini juga dibahas dalam konteks respons publik dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang dalam menanggapi peristiwa tersebut. 4. Struktur Retoris Berita ini menggunakan beragam perangkat bahasa untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Beberapa perangkat bahasa yang digunakan antara lain berita ini disusun secara kronologis, dimulai dari penjelasan putusan MK hingga pengembangan peristiwa terkini yang melibatkan polisi. 19 Pada beberapa bagian, berita ini mengutip pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim konstitusi, seperti Saldi Isra dan Arief Hidayat, untuk memberikan sudut pandang yang beragam terhadap putusan MK. Dalam berita ini, terdapat penggunaan istilah hukum dan politik yang 103 khusus, seperti "Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)", "kode etik", dan "politik dinast ". Dengan menggunakan berbagai perangkat bahasa ini, berita ini berhasil menyampaikan informasi dengan jelas dan memenuhi kebutuhan pembaca yang ingin memahami kontroversi dan perkembangan terkait putusan MK tersebut.

L . Analisis Artikel Berita Judul : Putusan MK soal Batas Usia

Capres dan Cawapres Dianggap Mengacu ke Syarat Pimpinan KPK. 10 Sumber : Kompas.com Tanggal : 19 November 2023 Ringkasan : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) selama memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. 35 Putusan ini dikaitkan dengan putusan sebelumnya, yaitu Nomor 112/PUU/XX/2022, yang berkaitan dengan syarat menjadi

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Putusan MK soal Batas Usia Capres dan Cawapres Dianggap Mengacu ke Syarat Pimpinan KPK. Lead Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 90/PUU- XXI/2023, yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai kandidat presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dengan syarat telah memiliki pengalaman kepemimpinan di tingkat daerah, merujuk pada keputusan MK nomor 112/PUU/XX/2022. Latar Informasi Menelusuri implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan peluang bagi individu di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dengan catatan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Keputusan ini dipandang memiliki relevansi dengan putusan sebelumnya, yakni Nomor 112/PUU/XX/2022, yang berfokus pada kriteria kepemimpinan dalam Konteks Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kutipan Sumber Feri Amsari, seorang ahli dalam bidang hukum konstitusi dari Universitas Andalas, yang memberikan analisis mengenai keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (Ini menjadi acuan bagi MK dalam memutuskan untuk mengizinkan persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden tetap berada pada 40 tahun, namun dengan catatan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Pernyataan tersebut menjadi rujukan utama dalam penetapan Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 " seperti yang disampaikan oleh Feri Amsari dalam segmen Gaspol! di Kompas.com pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023. Pernyataan Menurut Feri, MK memperhatikan adanya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi terhadap gugatan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut. Apabila terdapat suatu regulasi yang mengizinkan terjadinya pelanggaran serius, Mahkamah Konstitusi menegaskan ketidakinginan untuk mengembalikan keputusan kepada lembaga pembuat undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi akan mengambil langkah penyelesaiannya berdasarkan 105 pertimbangan tersebut " ujar Feri.

Struktur Skrip What Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pembatasan usia untuk kandidat presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), serta hubungannya dengan keputusan MK sebelumnya, yakni Nomor 112/PUU/XX/2022, yang mengatur persyaratan untuk menjabat sebagai kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Where Jakarta When Waktu di mana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikeluarkan, yaitu pada Rabu (18/10/2023), seperti yang disebutkan dalam kutipan dari Feri Amsari dalam program Gaspol! Kompas.com Who Gugatan Nomor 112/PUU/XX/2022 diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Feri Amsari, seorang ahli dalam bidang hukum tata negara dari Universitas Andalas, memberikan klarifikasi mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi. Why Utusan MK dikabarkanmengacu pada putusan sebelumnya Nomor 112/PUU/XX/2022 tentang syarat menjadi pimpinan KPK. Terjadi peninjauan terhadap syarat usia calon presiden dan wakil presiden berdasarkan argumen intolerable in justice. How Penjelasan yang diberikan oleh ahli hukum tata negara, Feri Amsari, mengenai landasan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, merujuk pada keputusan Nomor 106 112/PUU/XX/2022 mengenai kriteria menjadi kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Pengantar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa individu yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden apabila memiliki pengalaman dalam memimpin suatu wilayah administratif. Paragraf kedua: Mengungkapkan pihak yang mengajukan tuntutan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden serta dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Paragraf ketiga: Menjelaskan dasar putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengacu pada putusan sebelumnya, yaitu Nomor 112/PUU/XX/2022 tentang syarat menjadi pimpinan KPK. Paragraf keempat: Mendeskripsikan alasan MK dalam mengabulkan syarat usia minimal

calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pertimbangan intolerable in justice. Paragraf kelima: Menyampaikan reaksi dan komentar dari pakar hukum tata negara Feri Amsari terkait dengan putusan MK. Paragraf keenam: Menyebutkan terminologi intolerable in justice dan menjelaskan bagaimana hal ini berkaitan dengan putusan MK. 107 Paragraf ketujuh: Mengutip pendapat hakim Anwar Usman dalam sidang putusan MK. Paragraf kedelapan: Mendeskripsikan substansi putusan kasus nomor 90/PUU- XXI/2023 yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala pemerintahan daerah. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Fokus utama dalam laporan ini adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Berita ini juga menyoroti dasar hukum dan pertimbangan yang melatarbelakangi putusan tersebut, serta tanggapan dari para ahli hukum terkait implikasinya.

16 22

Selain itu, berita ini juga mencakup konteks terkait gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang juga diajukan kepada MK. Foto yang dipilih sebagai ilustrasi pada sampul berita ini merupakan gambar yang menampilkan proses persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi tersebut. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun dengan struktur yang rapi dan terorganisir, dimulai dengan pengantar yang menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya, berita 108 menyajikan informasi mengenai latar belakang gugatan yang diajukan oleh mahasiswa dan Wakil Ketua KPK, serta penjelasan dari ahli hukum mengenai dasar hukum putusan MK tersebut. Pada bagian berikutnya, berita mengungkapkan alasan dan pertimbangan MK dalam mengabulkan gugatan tersebut, yang mengacu pada

putusan sebelumnya terkait syarat menjadi pimpinan KPK. Terdapat juga pembahasan mengenai konsep "intolerable injustice" yang menjadi landasan bagi MK dalam memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya, berita menampilkan pandangan dari kuasa hukum Partai Buruh terkait implikasi putusan MK ini dan menyoroti bagaimana putusan ini mempengaruhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Informasi yang ditekankan dalam berita ini adalah mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, latar belakang gugatan yang diajukan oleh mahasiswa dan Wakil Ketua KPK, dasar hukum dan pertimbangan MK dalam mengabulkan gugatan tersebut. Konsep "intolerable injustice" yang menjadi landasan bagi MK, pandangan dari kuasa hukum Partai Buruh terkait implikasi putusan MK, pengaruh putusan MK terhadap syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 2. Struktur Skrip Berita diawali dengan pengenalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Laporan berlanjut dengan penjelasan mengenai tuntutan hukum yang diajukan terkait batasan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta merujuk pada keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan kriteria menjadi pimpinan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dilanjutkan dengan penjelasan dari ahli hukum mengenai alasan dan pertimbangan MK dalam mengabulkan gugatan tersebut, termasuk konsep "intolerable injustice" yang menjadi pertimbangan penting. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan dari kuasa hukum Partai Buruh mengenai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi ini, serta dampaknya terhadap 109 ketentuan syarat pencalonan calon presiden dan wakil presiden

REPORT #22148071

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berita selanjutnya mengumumkan secara terperinci isi Pasal 169 subyek q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang telah diubah setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. 3. Sktruktur Tematik Topik yang disorot dalam laporan ini adalah determinasi Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia bagi kandidat presiden dan wakil presiden. Fokus tulisan ini tertuju pada pengenalan Keputusan MK: Laporan dimulai dengan memberikan ikhtisar mengenai keputusan MK yang memungkinkan individu yang belum mencapai usia 4 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dilanjutkan dengan penguraian tentang gugatan yang diajukan terkait usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam undang-undang, serta merujuk pada putusan sebelumnya terkait syarat menjadi pimpinan KPK. Berita menghadirkan pandangan dari ahli hukum dan kuasa hukum terkait implikasi putusan MK ini, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Berita mengakhiri dengan pengumuman isi Pasal yang terkait, yang telah mengalami perubahan setelah putusan MK. 4. Struktur Retoris Berita ini menggunakan beragam perangkat bahasa, termasuk Penggunaan frasa baku Seperti "Putusan Mahkamah Konstitusi" dan "Undang-Undang Nomo ". Berita memberikan penjelasan teknis tentang proses hukum dan argumen- argumen yang digunakan dalam putusan MK. Menampilkan kutipan langsung dari ahli hukum dan kuasa hukum yang terlibat. Istilah hukum Seperti "syarat minimal", "gugatan", "pengujian materi", dan "undang-undan ". Penggunaan istilah resmi Seperti "Mahkamah Konstitusi" dan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi ". Berita ini menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan konteksnya sebagai berita hukum. Gaya bahasanya jelas, padat, dan menggunakan istilah-istilah resmi yang relevan dengan topik yang dibahas. 110 M . Analisis Artikel Berita Judul : MK: Anwar Usman Tak Ikut Putus "Gugatan Ulang" Usia Capres-Cawapres. Sumber : Kompas.com Tanggal : 21 November 2023 Ringkasan : Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa Anwar Usman tidak terlibat dalam pembahasan gugatan ulang terkait



syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. **2 14 28 46** Gugatan ini diajukan oleh Brahma Aryana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Meskipun pembahasan belum selesai, Brahma berharap MK bisa memutuskan perkara ini dengan cepat. Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul MK: Anwar Usman Tak Ikut Putus “Gugatan Ulang” Usia Capres-Cawapres Lead Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan eks Ketua MK, Anwar Usman, kali ini tidak terlibat dalam perkara pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres. Latar Informasi Pembahasan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengujian ulang syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden, serta keterlibatan Anwar Usman dalam pembahasan tersebut. **2 14 28** Gugatan ini diajukan oleh Brahma Aryana dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) sebagai tanggapan terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023. Berita juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara hakim konstitusi mengenai syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden, yang memunculkan ketidakpastian hukum. Selain itu, berita juga menyebutkan tentang keputusan MKMK yang merekomendasikan agar Anwar Usman tidak terlibat dalam mengadili perkara ini, karena terlibat dalam pelanggaran etika berat. **1** 111 [Kutipan Sumber **22** Yang Mulia Pak Anwar tidak ikut membahas, sesuai dengan perintah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi **1** " kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih kepada Kompas.com, Selasa (21/11/2023). Pernyataan Pernyataan dalam berita ini adalah pernyataan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih terkait keterlibatan Anwar Usman dalam perkara pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres. **1** “RPH tadi membahas berbagai perkara, salah satunya adalah perkara 141, namun belum selesai karena ada agenda persidangan sehingga masih berlanjut,” ucapnya. Struktur Skrip What Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa Anwar Usman tidak terlibat dalam perkara pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres. Where Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta When Selasa (21/11/2023). Who

Anwar Usman, eks Ketua MK. Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih. Why Anwar Usman tidak dilibatkan karena ada pelanggaran etika berat yang melibatkan dirinya dalam putusan sebelumnya, sesuai dengan rekomendasi MKMK. How Mahasiswa Brahma Aryana mengajukan gugatan karena merasa bahwa putusan sebelumnya (Nomor 90/PUU- XXI/2023) melibatkan pelanggaran etika dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Paragraf 1: MK memastikan bahwa Anwar Usman, mantan Ketua MK, tidak terlibat dalam 112 pengujian ulang syarat usia minimum capres-cawapres. **1** Paragraf 2: Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa Anwar Usman tidak terlibat sesuai perintah Putusan Majelis Kehormatan MK. Paragraf 3: Pembahasan perkara tersebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) belum rampung karena ada agenda persidangan lain. **38** Paragraf 4: Mahasiswa Fakultas Hukum Unusia, Brahma Aryana, mengajukan gugatan ulang terkait syarat usia minimum capres-cawapres. **1** Paragraf 5: Gugatan diajukan karena putusan sebelumnya melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman. Paragraf 6: MKMK merekomendasikan agar Anwar Usman tidak dilibatkan dalam perkara tersebut. **1**

14 Paragraf 7: Brahma berharap MK bisa memutus perkara ini dengan cepat karena sudah jelas dan telah diperiksa melalui gugatan-gugatan sebelumnya. Paragraf 8: Brahma menjelaskan ketidakbulatan pandangan di antara hakim konstitusi dalam putusan sebelumnya. Paragraf 9: Brahma mengkhawatirkan ketidakpastian hukum karena perbedaan pemaknaan di antara hakim-hakim tersebut . Paragraf 10: Putusan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai 113 cawapres lahir dari 3 suara hakim dari 5 yang dibutuhkan. **1** Paragraf 11: Brahma menegaskan bahwa frasa baru dalam putusan tersebut seharusnya inkonstitusional. **1 11** Paragraf 12: Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memungkinkan Gibran maju sebagai cawapres pada usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo. **1 2 11 13 17** Paragraf 13: Gibran disepakati sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sejak 22 Oktober. **1 11** Paragraf 14: Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai capres- cawapres dan memperoleh nomor urut oleh KPU

RI pada 13-14 November lalu Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Penekanan berita dalam artikel tersebut adalah tentang klarifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak terlibat dalam pengujian ulang syarat usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Berita ini menyoroti proses hukum dan etika yang sedang berlangsung serta ketidakpastian hukum akibat perbedaan pandangan di antara hakim konstitusi dalam putusan sebelumnya, yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. Selain itu, berita ini menekankan pada konteks politik dan hukum terkait putusan MK yang kontroversial dan pelanggaran etika yang melibatkan Anwar Usman. Foto yang digunakan dalam cover artikel ini yaitu adalah 114 foto Anwar Usman dengan gestur kedua tangan yang terangkat. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun dengan Menyampaikan informasi utama bahwa Anwar Usman, mantan Ketua MK, tidak terlibat dalam pengujian ulang syarat usia minimum capres- cawapres. Konfirmasi dari hakim konstitusi Enny Nurbaningsih tentang ketidakterlibatan Anwar sesuai perintah MKMK. Menyebutkan bahwa MK sedang menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas perkara ini, namun pembahasannya belum selesai. 2 Latar belakang mengenai tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana, berkenaan dengan keputusan sebelumnya yang terkait dengan pelanggaran prinsip moral yang dilakukan oleh Anwar Usman. Menjelaskan bahwa MKMK telah merekomendasikan agar Anwar Usman tidak dilibatkan dalam pengadilan perkara tersebut. Brahma Aryana berharap MK bisa memutus perkara ini dengan cepat. Membahas pandangan Brahma Aryana tentang perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi dalam putusan sebelumnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum 1 2 Menyebutkan bahwa hanya 3 dari 5 hakim yang setuju mengubah syarat usia minimum capres-cawapres untuk tingkat di bawah gubernur. Menganalisis keputusan sebelumnya yang mengizinkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. 36 Gibran dengan suara

bulat disetujui sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan susunan ini, berita berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang situasi hukum dan etika di seputar putusan MK dan implikasinya pada dinamika politik Indonesia. 2. Struktur Skrip Berita dimulai dengan judul yang menyebutkan bahwa Anwar Usman tidak ikut dalam pembahasan "Gugatan Ulang" terkait usia calon presiden dan wakil presiden. Diberikan informasi bahwa ini terkait dengan pengujian ulang syarat usia minimum capres- cawapres.

1 Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan konfirmasi bahwa Anwar Usman tidak terlibat dalam pembahasan tersebut sesuai dengan perintah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.. 2 Dengan latar belakang bahwa tuntutan ini disampaikan oleh Brahma Aryana, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dinyatakan bahwa Brahma merasa perlu untuk mengajukan tuntutan karena dugaan pelanggaran etika berat yang terlibat dalam putusan sebelumnya oleh Anwar Usman.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merekomendasikan agar Anwar Usman tidak terlibat dalam memeriksa kasus tersebut. mengenai persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Dari lima hakim, hanya tiga yang sepakat bahwa anggota lembaga legislatif atau kepala pemerintahan daerah di semua tingkatan berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, sementara dua hakim lainnya hanya setuju bahwa hanya kepala pemerintahan daerah di tingkat gubernur yang berhak melakukannya. Brahma menganggap frasa baru dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sebagai tidak konstitusional karena hanya didasarkan pada tiga suara hakim dari lima yang diperlukan.

1 17 Diberikan informasi bahwa keputusan tersebut memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, keponakan dari Anwar Usman dan putra sulung dari Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 dengan status Wali Kota Solo yang baru saja diembannya selama 3 tahun. Disimpulkan bahwa Prabowo-Gibran telah diumumkan sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 3. Struktur

Tematik Tema yang diangkat dalam berita ini adalah polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden serta implikasinya terhadap kasus-kasus spesifik yang terkait dengan putusan tersebut. Tema ini ditulis dengan cara berita mengangkat perdebatan antara hakim konstitusi mengenai interpretasi dan aplikasi hukum terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Berita menyebutkan bahwa gugatan ini diajukan karena dugaan pelanggaran etika berat oleh salah satu hakim konstitusi dalam pembuatan putusan sebelumnya. Berita menyoroti implikasi politik dari putusan MK tersebut, terutama terkait kemungkinan kandidat tertentu untuk maju dalam Pilpres 2024. Berita mencatat kritik yang dilontarkan terhadap putusan MK, termasuk argumentasi bahwa putusan tersebut 116 tidak memenuhi persyaratan konstitusional karena hanya didasarkan pada suara mayoritas hakim yang tidak mencapai kuorum. 2 14 Diberikan ruang bagi pendapat dari pihak yang mengajukan gugatan, dalam hal ini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana. Melalui cara ini, tema utama tentang polemik hukum dan politik terkait dengan putusan MK dipaparkan dengan menyajikan berbagai sudut pandang dan argumen yang terlibat dalam kasus tersebut. 4. Struktur Retoris Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini mencakup Bahasa yang digunakan dalam berita ini tergolong formal. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata yang khas dalam konteks hukum dan keputusan lembaga- lembaga resmi seperti "Mahkamah Konstitusi", "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi", dan "Rapat Permusyawaratan Hakim". Selain itu, penggunaan struktur kalimat yang teratur dan penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteksnya juga menunjukkan sifat formal dari bahasa yang digunakan. Berita ini menggunakan kutipan langsung dari narasumber, seperti hakim konstitusi dan pihak yang mengajukan gugatan. Kutipan langsung ini memberikan informasi yang akurat dan meyakinkan kepada pembaca tentang fakta-fakta yang disampaikan. Berita ini menggunakan tata bahasa yang

tepat dan sesuai dengan aturan tata bahasa standar, termasuk penggunaan subjek, predikat, objek, dan penggunaan tanda baca yang sesuai. 42 Bahasa yang digunakan cenderung mudah dipahami oleh pembaca yang memiliki pemahaman umum tentang hukum dan politik. Meskipun topiknya kompleks, penulis berusaha menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengorbankan akurasi informasi. Jadi, meskipun berita ini menggunakan bahasa formal, tetapi penyampaiannya tetap terasa mudah dipahami dan sesuai dengan standar jurnalisme berita.

N. Analisis Artikel Berita Judul : Syarat Usia Digugat Lagi ke MK, Pemohon Minta Pilpres Tanpa Prabowo-Gibran. Sumber : Kompas.com Tanggal : 19 November 2023 117 Ringkasan : Penggugat, Saiful Salim, mengajukan gugatan untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dari Pilpres 2024. Saiful mengklaim bahwa putusan tersebut melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman, eks Ketua MK, dan menyebabkan kecacatan hukum. Saiful meminta agar MK mengembalikan proses pemilu ke kondisi sebelum Prabowo-Gibran mendaftar, sehingga pasangan Anies- Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menjadi capres dan cawapres.

Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Syarat Usia Digugat Lagi ke MK, Pemohon Minta Pilpres Tanpa Prabowo-Gibran. Lead Persyaratan usia minimal kandidat presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang telah mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90) tengah menghadapi gugatan kembali di MK. Latar Informasi Gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Saiful Salim terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres- cawapres) yang diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU- XXI/2023. Saiful Salim meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024 karena melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman, eks Ketua MK, dan putusan tersebut dinilai menciptakan kecacatan hukum. Kutipan Sumber Saiful Salim, seorang mahasiswa yang menjadi penggugat dalam gugatan terhadap syarat usia minimum calon presiden dan wakil

presiden (capres-cawapres) yang diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. **3 5 9** "Karena itu, pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mengembalikan proses pemilihan umum atau mengembalikan kondisi daftar calon presiden dan calon wakil 118 presiden yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke kondisi semula sebelum Prabowo-Gibran mendaftar " Pernyataan Saiful mengajukan permohonan agar hakim konstitusi Anwar Usman dianggap tidak memiliki kewenangan untuk turut serta dalam proses pemeriksaan, peradilan, dan penyelesaian perkara ini. **3** Ia juga meminta agar keputusan ini diambil dalam waktu 14 hari dan berlaku untuk Pemilu 2024. Struktur Skrip What Gugatan ini berkaitan dengan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90). **4** Saiful Salim meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024 karena dianggap "lahir dari proses kecacatan hukum". Where Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan ini dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Indonesia. **3 9 15 20** When Gugatan ini diregistrasi sebagai perkara 159/PUU-XXI/2023 dan disidang pada Selasa, 19 Desember 2023 Who seorang mahasiswa bernama Saiful Salim. Why Gugatan ini diajukan karena penggugat merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Putusan 90 yang melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman. Saiful Salim berpendapat bahwa jika Anwar Usman tidak terlibat dalam pembuatan putusan tersebut, maka putusan MK akan berubah. **3 4 5 9** How Saiful Salim meminta agar Mahkamah Konstitusi mengembalikan proses pemilu atau mengembalikan keadaan daftar capres-cawapres ke 119 kondisi sebelum Prabowo- Gibran mendaftar. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Paragraf ini memperkenalkan pembaca pada gugatan yang diajukan terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres- cawapres) yang diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU- XXI/2023. Paragraf ini memberikan informasi tentang penggugat, yaitu Saiful Salim, dan menyampaikan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan tersebut dilaksanakan pada tanggal

19 Desember 2023. **3 4 5 15 20** Paragraf ini menjelaskan alasan di balik gugatan yang diajukan oleh Saiful Salim, yaitu bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena dihadapkan pada salah satu pasangan capres-cawapres yang dianggap "lahir dari proses kecacatan hukum". Paragraf ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan gugatan Saiful Salim, yaitu melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman dalam pembuatan Putusan 90.

3 4 Paragraf ini menjelaskan bahwa Putusan 90 memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto meskipun belum memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Paragraf ini merangkum permintaan Saiful Salim kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk meminta agar proses pemilu dikembalikan ke kondisi sebelum Prabowo-Gibran mendaftar dan dua jenis petitum yang diajukan. 120 Paragraf ini menyebutkan bahwa gugatan serupa telah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia (Unusia), tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan kepastian hukum atas Putusan 90 yang sudah diputus sebelumnya. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Penekanan dalam penulisan berita ini adalah berita ini menekankan pentingnya isu hukum terkait dengan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ini mencerminkan kekhawatiran akan konstitusionalitas putusan tersebut. Berita ini menggarisbawahi kontroversi yang terkait dengan Putusan 90, terutama dalam hal melibatkan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman, eks Ketua MK, dalam pembuatannya. Hal ini menyoroti pertanyaan etis dan legalitas putusan tersebut. Penekanan juga diberikan pada implikasi politik dari Putusan 90, khususnya terkait dengan kemungkinan kandidat tertentu untuk maju dalam Pilpres 2024, seperti Gibran Rakabuming Raka yang menjadi fokus gugatan ini. Berita ini menyoroti tuntutan penggugat, Saiful Salim, yang meminta agar Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab secara etis dan moral terhadap bangsa dan negara terkait dengan konsekuensi dari Putusan 90. Terdapat penekanan pada kritik terhadap Putusan 90

yang disampaikan oleh penggugat, termasuk argumen bahwa putusan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan memengaruhi proses pemilu. Analisis :

121 1. Struktur Sintaksis Berita dimulai dengan pengantar singkat tentang gugatan terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah pengantar, berita menyebutkan identitas penggugat, yaitu Saiful Salim, dan menunjukkan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan tersebut telah dilaksanakan. Berita menjelaskan alasan di balik gugatan yang diajukan oleh Saiful Salim, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman dalam pembuatan Putusan 90. Berita memberikan informasi tentang implikasi dari Putusan 90, termasuk kemungkinan kandidat tertentu untuk maju dalam Pilpres 2024 yang dibuka oleh putusan tersebut. 4 Terdapat penjelasan tentang permintaan yang diajukan oleh Saiful Salim kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk permintaan untuk mengembalikan proses pemilu ke keadaan sebelum Prabowo- Gibran mendaftar. 15 Berita menyebutkan bahwa gugatan serupa telah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia (Unusia), tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, berita ini mencoba memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang isu yang sedang dibahas dan konflik yang terkait. 2. Struktur Skrip Laporan dimulai dengan konteks bahwa syarat usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK), mengacu pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berita mengidentifikasi penggugat, yaitu Saiful Salim, dan menyampaikan bahwa sidang pendahuluan gugatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023. 5 Berita menjelaskan alasan di balik gugatan yang diajukan oleh Saiful Salim, yaitu merasa dirugikan secara konstitusional karena dihadapkan pada salah satu pasangan capres-cawapres yang dianggap berasal dari proses hukum yang cacat. Berita kemudian membahas implikasi dari Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023, khususnya terkait dengan kelayakan Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar Usman dan putra sulung Jokowi, untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto

4 5 9 Terdapat penjelasan tentang permintaan yang diajukan oleh Saiful Salim kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk permintaan untuk mengembalikan proses pemilu ke keadaan sebelum Prabowo-Gibran mendaftar. 122 Berita juga menyebutkan bahwa gugatan serupa telah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia (Unusia), tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan kepastian hukum atas Putusan 90 yang sudah diputus sebelumnya. Dengan demikian, alur berita dimulai dengan pengantar masalah, diikuti oleh identifikasi penggugat dan sidang, kemudian menjelaskan alasan gugatan, implikasi Putusan 90, permintaan penggugat, dan penolakan gugatan sebelumnya. Ini memberikan gambaran yang kronologis tentang perkembangan kasus dan konteks di sekitarnya.

3. Sktruktur Tematik Tema yang diperbincangkan dalam laporan ini adalah kontroversi serta diskusi mengenai persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden (capres- cawapres) yang mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berita ini mengenalkan pembaca pada isu hukum yang sedang diperdebatkan, yaitu persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yang telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

4. Struktur Retoris Perangkat bahasa yang digunakan dalam berita ini termasuk perbandingan untuk menunjukkan perbedaan antara gugatan yang diajukan oleh Saiful Salim dengan gugatan serupa yang diajukan sebelumnya oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia (Unusia). Terdapat penggunaan keterangan waktu seperti "Selasa (19/12/2023)" untuk memberikan informasi tentang tanggal sidang. Berita ini menggunakan kutipan langsung dari penggugat, Saiful Salim, untuk memberikan informasi tentang alasan gugatan dan tuntutan yang diajukan. Berita ini menggunakan istilah-istilah hukum seperti "syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden", "Putusan Mahkamah Konstitusi", dan "sidang pendahuluan gugatan" untuk menggambarkan konteks hukum dari isu yang dibahas. Berita ini memberikan deskripsi faktual tentang kasus, termasuk identifikasi

penggugat, sidang pendahuluan, dan permintaan yang diajukan oleh penggugat. Secara keseluruhan, berita ini menggunakan bahasa formal yang umumnya 123 digunakan dalam laporan berita untuk menunjukkan profesionalisme dan keakuratan informasi yang disampaikan. O . Analisis Artikel Berita Judul : Pertimbangan MK Nyatakan Putusan Usia Cawapres Tak Cacat formil walau Langgar Etik. Sumber : Kompas.com Tanggal : 16 Januari 2024 Ringkasan : MK menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pelanggaran syarat usia calon presiden dan wakil presiden tidak mengandung cacat formil, meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya. MK menolak langkah progresif dalam hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Perangkat Framing Unit Pengamatan Hasil Pengamatan Struktur Sintaksi Judul Pertimbangan MK Nyatakan Putusan Usia Cawapres Tak Cacat formil walau Langgar Etik. Lead Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penilaian formal terhadap keputusan MK merupakan suatu hal yang tidak konvensional dan tidak dikenal dalam kerangka hukum Indonesia. Latar Informasi Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai putusan terkait pelanggaran syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang diubah melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berita tersebut menjelaskan pertimbangan MK dalam menyatakan bahwa meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya, putusan tersebut tidak mengandung cacat formil dan tetap berlaku secara hukum. Kutipan Sumber Mahkamah tidak mungkin menyamakan proses pembentukan undang-undang dengan proses pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim ketika memutuskan untuk menilai konstitusionalitas norma yang pada dasarnya merupakan 124 bagian materi dari suatu undang-undang," ujar hakim konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PUU- XXI/2023, pada Selasa (16/1/2024). Pernyataan "Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mengakui keberadaan keputusan yang tidak sah, meskipun dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para hakim konstitusi terbukti bahwa salah satu



hakim yang terlibat dalam memutuskan perkara tersebut melanggar etika. Hal ini tidak secara otomatis menyebabkan keputusan tersebut menjadi tidak sah atau batal," ungkapnya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah melalui Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum. Struktur Skrip What Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres- cawapres). Where 16 Januari 2024. When Mahkamah Konstitusi. Who Mahkamah Konstitusi (MK), hakim konstitusi Guntur Hamzah, penggugat perkara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, serta putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, disebut dalam berita ini. Why Berita ini menjelaskan mengapa Mahkamah Konstitusi menilai Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 tidak mengandung cacat formil meskipun terdapat 125 pelanggaran etik dalam proses penyusunannya. How Bagaimana Mahkamah Konstitusi mengambil pertimbangan terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada proses hukum dan politik di Indonesia, termasuk keterlibatan Gibran Rakabuming dalam Pilpres2024. Struktur Tematik Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat Paragraf ini memperkenalkan pembaca pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). MK menegaskan bahwa meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya, putusan tersebut tidak mengandung cacat formil. Paragraf ini memberikan kutipan dari hakim konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PUU- XXI/2023, di mana Mahkamah menegaskan kesahihannya terhadap Putusan 90. **7** Paragraf ini menginformasikan bahwa penggugat, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, menyadari bahwa uji formil tidak lazim dalam sistem hukum Indonesia, namun mereka berharap MK dapat membuat terobosan hukum dalam kasus ini. Paragraf ini menjelaskan bahwa MK tidak dapat melakukan langkah

progresif sebagaimana diharapkan oleh penggugat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Paragraf ini menegaskan bahwa Putusan MK tidak dapat dikenakan konsekuensi yang diatur pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 126 Kekuasaan Kehakiman, serta bahwa putusan tersebut tetap sah meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya. Paragraf ini menyebutkan bahwa berkat Putusan 90, Gibran Rakabuming dapat menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, meskipun paman Gibran, Anwar Usman, dinyatakan melanggar etik dalam proses pengambilan putusan tersebut. Struktur Retoris Kata, idiom, gambar Foto, grafis Paragraf ini memperkenalkan pembaca pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). MK menegaskan bahwa meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya, putusan tersebut tidak mengandung cacat formil. Paragraf ini memberikan kutipan dari hakim konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PUU- XXI/2023, di mana Mahkamah menegaskan kesahihannya terhadap Putusan 90.

7 Paragraf ini menginformasikan bahwa penggugat, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, menyadari bahwa uji formil tidak lazim dalam sistem hukum Indonesia, namun mereka berharap MK dapat membuat terobosan hukum dalam kasus ini. Paragraf ini menjelaskan bahwa MK tidak dapat melakukan langkah progresif sebagaimana diharapkan oleh penggugat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Paragraf ini menegaskan bahwa Putusan MK tidak dapat 127 dikenakan konsekuensi yang diatur pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahwa putusan tersebut tetap sah meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya. Paragraf ini menyebutkan bahwa berkat Putusan 90, Gibran Rakabuming dapat menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, meskipun paman Gibran, Anwar Usman, dinyatakan melanggar etik dalam proses pengambilan putusan tersebut. Gambar yang digunakan dalam cover artikel berita ini menggambarkan tentang suasana Hakim

konstitusi baru yaitu Suhartoyo yang dilantik menggantikan Anwar Usman, di daam ruangan siding MK. Analisis : 1. Struktur Sintaksis Berita ini disusun secara kronologis dengan memperkenalkan pembaca pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kemudian, berita tersebut menguraikan kutipan dari hakim konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 untuk menegaskan kesahihannya terhadap Putusan 90. Selanjutnya, berita memberikan informasi tentang kesadaran penggugat, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, tentang langkah hukum yang mereka ajukan dan harapan mereka terhadap MK untuk membuat terobosan hukum dalam kasus ini. Paragraf selanjutnya menjelaskan mengapa MK tidak dapat melakukan langkah progresif sesuai harapan penggugat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Berita kemudian menegaskan bahwa Putusan MK tidak dapat dikenakan konsekuensi yang diatur dalam Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahwa putusan tersebut tetap sah meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya. Terakhir, berita ini mencatat implikasi politik dari Putusan 90 terhadap Pilpres 2024, dengan menyebutkan bahwa berkat putusan itu, Gibran Rakabuming dapat menjadi calon wakil 128 presiden, meskipun pamannya, Anwar Usman, dinyatakan melanggar etik dalam prosesnya. Berita menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan kesahihan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan pelanggaran syarat usia calon presiden dan wakil presiden, meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya.

2. Struktrur Skrip Berita dimulai dengan pengenalan masalah, yaitu pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres- cawapres). Dilanjutkan dengan kutipan dari hakim konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 145/ -XXI/2023 untuk menegaskan kesahihannya terhadap Putusan 90. **7** Berita kemudian PUU menyampaikan pandangan penggugat, Denny Indrayana dan

Zainal Arifin Mochtar, yang menyadari ketidaklaziman uji formil dalam sistem hukum Indonesia, namun tetap berharap pada terobosan hukum dari MK. Paragraf berikutnya menjelaskan pembatasan kemampuan MK untuk melakukan langkah progresif sesuai harapan penggugat karena potensi ketidakpastian hukum baru yang dapat timbul. Berita menegaskan bahwa Putusan MK tetap sah dan tidak dapat dikenakan konsekuensi yang diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya. Berita kemudian mencatat implikasi politik dari Putusan 90 terhadap Pilpres 2024, khususnya terkait dengan keterlibatan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, walaupun pamannya, Anwar Usman, dinyatakan melanggar etik dalam proses tersebut. Dengan demikian, berita ini mengikuti urutan alur yang kronologis, dimulai dari pengenalan masalah, pengumuman dari MK, pendapat penggugat, pembatasan kemampuan MK, penegasan kesahihan putusan MK, dan implikasi politik dari putusan tersebut.

3. Sktruktur Tematik Tema ini ditulis dengan fokus pada analisis hukum terhadap putusan MK serta dampaknya terhadap konteks politik di Indonesia. Pertama, tema ini ditulis dengan 129 memberikan gambaran tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berita memberikan informasi tentang bagaimana MK menilai kesahihan putusan tersebut meskipun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya. Kemudian, tema ini juga ditulis dengan membahas implikasi politik dari putusan MK tersebut. Berita menguraikan bagaimana putusan ini mempengaruhi konteks politik, khususnya terkait dengan partisipasi Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024 dan reaksi dari pihak-pihak terkait.

7 Selain itu, tema ini ditulis dengan memperkenalkan pandangan dari penggugat, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, yang menyadari ketidaklaziman uji formil dalam sistem hukum Indonesia, namun tetap berharap pada terobosan hukum dari MK. Hal ini memberikan dimensi tambahan dalam pembahasan tema, yaitu perspektif para pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Dengan demikian, tema ini ditulis dengan memberikan analisis yang komprehensif terhadap

aspek-aspek hukum dan politik dari putusan MK terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. 4. Struktur Retoris Dalam berita ini, beberapa perangkat bahasa yang digunakan antara lain, berita ini menggunakan kutipan langsung dari pernyataan hakim konstitusi dan penggugat, seperti yang disampaikan oleh Guntur Hamzah. Kutipan langsung digunakan untuk memberikan kejelasan dan autentisitas pada informasi yang disampaikan. Berita ini menyajikan analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan implikasi politik dari putusan tersebut. Teks analisis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang dibahas. Berita ini menggunakan kata-kata teknis hukum seperti "Putusan MK", "Undang-undang Kekuasaan Kehakiman", dan "terobosan hukum". Penggunaan kata-kata ini menunjukkan tingkat keahlian dan pemahaman tentang konteks hukum yang sedang dibahas. Kata sambung seperti "namun", "tetapi", dan "akan tetapi" digunakan untuk menghubungkan antara pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan atau kontras, sehingga menyampaikan informasi dengan lebih jelas. Beberapa kata keterangan waktu seperti "Selasa (16/1/2024)" dan "Pilpres 2024" digunakan untuk memberikan konteks kronologis dan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang dibahas dalam berita. Berita ini menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan konteksnya, mengingat topiknya 130 untuk memahami bagaimana media membingkai isu-isu. 16 21 22 24 29 30 34 Model mereka mengidentifikasi empat struktur utama dalam framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris (Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, 2017). Kembali kepada tujuan awal penelitian, dalam hasil perbandingan ini, peneliti juga memperhatikan Nilai berita yang terkandung kedalam berita yang sudah dibandingkan, terbagai menjadi 4 point yaitu adalah Aktualitas, Objektivitas, Konteks dan Kedalaman Relevansi (Khoirul Muslimin, 2019). Ketika mengaitkan analisis framing Pan dan Kosicki dengan teori jurnalisme online, beberapa aspek penting dapat diperhatikan, yaitu adalah Jurnalisme online ditandai dengan kecepatan tinggi dalam penyampaian informasi. Struktur sintaksis dan tematik

menjadi sangat penting karena berita harus disampaikan dengan cepat dan jelas untuk menarik perhatian pembaca yang terbatas waktu. Dengan menggunakan kerangka analisis Pan dan Kosicki dalam konteks jurnalisme online, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana berita disusun dan disampaikan di era digital, serta bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi dan keterlibatan publik. Berita yang relevan adalah berita yang penting atau bermanfaat bagi adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari proses hukum resmi. Penggunaan kata-kata teknis hukum, analisis yang mendalam, serta kutipan langsung dari sumber-sumber yang terkait menunjukkan bahwa berita ini menggunakan bahasa formal.

4.3 Hasil Analisis Framing Pemberitaan Media di Okezone.com & Kompas.com

Model analisis framing yang menekankan struktur berita sebagai dasar pembaca. Teori nilai berita dapat meningkat jika informasi yang disajikan dalam berita tersebut memiliki implikasi langsung atau relevan dengan kehidupan sehari-hari atau isu yang sedang terjadi ingin mengetahui Framing pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perubahan Peraturan Usia Minimal Capres & Cawapres pada dua media berita, yaitu Okezone.com dan Kompas.com, yang Dimana isu yang diangkat ialah terkait Putusan siding Perubahan peraturan Usia Minimal Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Berdasarkan hal tersebut, hasil analisis data yang telah ditremuka dari kedua media memperlihatkan pola yang cukup berbeda dalam membingkai setiap peristiwa yang salama, dalam struktur sintaksis, skrip dan juga retorik. Berita untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana berita disusun, diprioritaskan, dan disajikan kepada publik. Teori nilai berita, atau news values, membantu menjelaskan mengapa beberapa peristiwa atau isu diangkat menjadi berita dan bagaimana media menentukan relevansi atau pentingnya suatu berita. Perangkat framing Okezone.com Kompas.com Struktur Sintaksis Penulisan Judul lebih beragam dengan beberapa judul yang netral hingga kritis, namun tidak seintens

Kompas.com. Penulisan judul cenderung lebih kritis terhadap putusan MK, menekankan pada potensi penyimpangan konstitusional dan kewenangan MK. Lead yang digunakan cenderung menggunakan penjelasan singkat latar belakang sidang MK, lalu dilanjutkan dengan informasi sesuai judul. Lead yang digunakan ditulis langsung kepada inti dari point informasi. Latar informasi Okezone.com lebih mengandalkan laporan langsung dari peristiwa lapangan dan reaksi publik. Mereka menyoroti protes, demo dan pernyataan dari tokoh politik serta Masyarakat. Latar informasi menggunakan sumber-sumber internal dan investigatif yang mendalam. Mereka mengangkat isu dari berbagai sudut pandang, termasuk dari segi konstitusi dan hukum. Okezone.com menggunakan kutipan sumber Reaksi publik, mahasiswa, aktivis dan tokoh publik, dengan focus dampak social, politik, dan reaksi langsung dari Masyarakat. Kompas.com menggunakan kutipan sumber Ahli hukum, pakar konstitusi dan sumber internal dari MK, dengan fokus legalitas, 132 konstitusionalis, dan kritik sumber internal dari MK. Okezone.com menggunakan Kompas.com menyajikan pernyataan yang langsung, pernyataan dengan terstruktur, spontan, dengan penekanan logis, dengan kritik tersirat pada reaksi dan emosi. melalui analisis mendalam. Penutup cenderung berisikan Penutup cenderung berisikan tentang penekanan pada reaksi tentang ringkasan analitis, emosi, aksi protes dan ajakan pernyataan dari Ahli, arah dan untuk bertindak. Tindakan selanjutnya atau Langkah-langkah hukum berikutnya atau proses yang akan terjadi. Struktur Skrip Penulis lebih menekankan unsur "How" dalam artikel beritanya. Penulis menjelaskan pada analisis peristiwa dengan melengkapi unsur 5W+1H dengan menekankan unsur "What" dalam artikel berita. Struktur Tematik Artikel berita cenderung Artikel berita cenderung membahas tentang menyoroti membahas tentang analisis reaksi public dan politik yang mendalam tentang terhadap Putusan MK.. Putusan MK, mereka menyoroti perubahan dalam syarat kualifikasi Capres dan Cawapres serta perbedatan politik seputar hal ini. Struktur Retoris Menggunakan kata

yang lebih berwarna, dan dramatis, terutama dalam menyoroti reaksi dan publik, penggunaan kata-kata yang menunjukkan ketegasa dan emosi. Lebih cenderung menggunakan bahas ayang lebih provokatif dalam melaporkan isu ini. Menggunakan kata yang lebih formal, akademis dan netral, terutama dalam analisis hukum dan konstitusional, dengan gaya baahasa yang lebih netral dan berimbang. Cenderung menggunakan foto berlatar belakang halaman Gedung Mahkamah Konstitusi. Cenderung menggunakan foto kegiatan suasana ruangan inti sidang putusan MK. Hasil dari analisis diatas terdapat beberapa perbedaan, dimana hal ini dapat menjadikan temuan bagi peneliti. Pada pembingkaiian media berita Okezone.com, dalam judul menggunakan kata-kata yang memperlihatkan bahwasanya Okezone.com cenderung lebih beragam dalam dalam pemberitaan dengan beberapa 133 judul yang netral hingga kritis, namun tidak seintens Kompas.com. Untuk substansi dan detail dalam penulisan judul, okezone.com lebih banyak berfokus pada reaksi dan implikasi social-politik dari Keputusan MK. Banyak judul yang mencerminkan suara Masyarakat, khususnya mahasiswa, yang menolak putusan tersebut. Penyampaian kritik dalam penulisan judul Okezone.com lebih melalui reaksi pihak ketiga seperti mahasiswa dan tokoh politik. Kesimpulannya dalam penulisan judul, Okezone.com lebih beragam dalam pendekatannya, dengan penekanan pada reaksi Masyarakat dengan gaya dinamis, langsung dan berfokus pada reaksi lapangan. Pernyataan yang ditekankan oleh Okezone.com dalam setiap artikelnya juga hanya menyoroti reaksi publik, aksi protes dan ketidakpuasan yang memberikan perspektif social-politik dan berfokus kepada dinamika social dan politik yang berkembang sebagai respon terhadap Keputusan MK. Dalam teori etika Jurnalisme online, teori ini menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan transparansi dalam penggunaan sumber dalam pemberitaan. Jurnalisme yang baik memastikan 134 public dan implikasi social-politik, serta menyertakan pernyataan dari berbagai pihak terkait. Secara teoretis, Lead berita dapat dikaitkan dengan beberapa konsep dalam jurnalisme, dengan demikian, Lead berita merupakan aplikasi

langsung dari konsep- konsep teoritis dalam praktik jurnalisme yang mempengaruhi cara informasi disajikan dan diterima oleh masyarakat. Lead berita yang ditulis oleh Okezone.com juga seringkali menekankan kontroversi seputar Keputusan MK dalam lead mereka. Ini bisa mencakup demonstrasi, pernyataan tokoh politik atau respon emosional dari Masyarakat. Lead seringkali menyoroti aksi dan respon yang terjadi segera setelah Keputusan MK tersebut disahkan, seperti proses atau pernyataan dari tokoh-tokoh terkemuka. Kesimpulan dari Lead yang ditulis Okezone.com adalah mengenaireaksi public, kontroversi, nada provokatif, emosional dan lebih focus pada aksi dan respson. Latar informasi Okezone.com tampaknya lebih mengandankan laporan langsung dari peristiwa lapangan dan reaksi public, mereka menyoroti protes, demo dan pernyataan dari tokoh politik serta Masyarakat. Dalam kutipan sumber, Okezone.com cenderung sering mengutp reaksi langsung dari Masyarakat, mahasiswa dan aktivis yang melakukan proters terhadap Putusan MK, yang berfokus pada dampak social, politik, dan reaksi langsung dari pembaca untuk memperhatikan isu ini lebih lanjut dan berpartisipasi dalam perkembangan selanjutnya. Pada Struktur Skrip dalam analisis berita Okezone.com, penulis lebih menekankan unsur “How” dalam artikel beritanya . Okezone.com banyak menjelaskan bagaimana reaksi terjadi, termasuk deskripsi tentang bagaimana demonstrasi berlangsung dan bagaimana tokoh politik menanggapi Keputusan, contohnya adalah menggambarkan jalannya protes, termasuk jumlah peserta, metode demonstrasi dan tanggapan pihak berwenang. Dalam penelitian mengenai framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan usia minimal capres dan cawapres, teori framing Pan dan Kosicki sangat relevan untuk menganalisis bagaimana Okezone.com dan Kompas.com memilih dan mengorganisir informasi dalam beritanya. Memahami bagaimana penyajian berita oleh kedua media mempengaruhi cara publik memahami keputusan MK tersebut. Menilai perbedaan dalam framing berita antara kedua media dan dampaknya terhadap persepsi dan opini publik. Dengan demikian,

teori framing Pan dan Kosicki memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis bagaimana media massa mempengaruhi interpretasi masyarakat terhadap isu-isu penting dalam konteks politik dan sosial, hal ini masuk kedalam bagian dalam beberapa point analisis, yaitu adalah Strukturt Sintaksi, kutipan sumber digunakan dengan benar dan tidak mengubah konteks aslinya. Dengan memahami teori-teori ini, praktik penggunaan kutipan sumber dalam berita dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konteks, keakuratan, dan dampaknya terhadap pembaca serta masyarakat pada umumnya. Dalam penutup, media Okezone.com dalam isu terkait Putusan MK ini lebih memilih menutup dengan penekanan pada informasi terkait aksi protes yang sedang berlangsung atau yang akan datang, reaksi emosional dari Masyarakat dan mengajak. Struktur Skrip, Tematik dan Struktur Retoris. Pada Struktur tematik, Okezone.com memfokuskan pembahasan tema pada reaksi publik dan politik, aspek emosional dan sensasional, lalu dengan pendekatan subjektif. Pendekatan dalam menulis berita lebih reaktif dan memperlihatkan pendapat atau opini yang kuat, seringkali mengambil sudut pandang yang lebih politis. Dalam Struktur Retoris, Okezone.com menggunakan kata-kata yang lebih berwarna dan dramatis, terutama dalam menyoroiti reaksi public dan politik, penekanan pada reaksi public yang kuat dengan 135 penggunaan kata kata yang menunjukkan ketegasan dan emosi. Okezone.com cenderung lebih menggunakan kata-kata yang dramatis dan kontroversial. Perbedaan timbul dalam segi cara memberitakan terkait isu Putusan MK ini, dalam berita Kompas.com terlihat banyak perbedaan dari semua segi, termasuk tujuan Kompas.com dalam menulis berita terkait Putusan MK dalam kasus batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Kompas.com dalam penulisan judulnya cenderung lebih kritis terhadap putusan MK, menekankan potensi penyimpangan konstitusional dan kewenangan MK, judul-judul seperti "MK dinilai lampau kewenangan, menyimpang dari konstitusi sebab ubah syarat capres-cawapres" dan "Saat siasat Anwar Usman ubah putusan MK 180 derajat diungkap..." menunjukkan kritik

tajam terhadap proses dan keputusan tersebut. Kesimpulannya, Kompas.com lebih menekankan pada kritik terhadap proses dan Keputusan MK dengan judul yang cenderung lebih investigatif dan mengungkap kontroversi hukum serta politik. Dalam Lead yang ditulis, Kompas.com menggunakan lead terkait informasi utama dengan konteks dan detail, serta nada netral dan formal. Menyajikan fakta-fakta dan analisis secara objektif serta mandala. Berbeda dengan Okezone.com yang lebih menekankan pada daya tarik emosional dan provokatif untuk memicu keterlibatan pembaca. Dalam latar informasi, Kompas.com cenderung lebih fokus pada analisis mendalam dan investigasi terkait implikasi hukum dan konstitusional dari Putusan MK, Mereka cenderung mengangkat kritik terhadap proses dan Keputusan MK dengan penekanan pada aspek hukum dan politik yang lebih kompleks Kompas.com memakai kutipan sumber seperti Ahli hukum, pakar konstitusi dan sumber internal dari MK, fokus dalam pemilihan kutipan sumber yaitu untuk legalitas, konstitusionalitas, dan kritik terhadap proses pengambilan Keputusan dengan gaya penulisan yang analitis, mendalam dan investigatif. Kompas.com juga menggunakan struktur pernyataan yang logis, seringkali diikuti oleh argument atau bukti yang mendukung. Kritik yang disampaikan secara tersirat melalui analisis mendalam dan pertanyaan kritis tentang proses dan Keputusan. Dalam penutup di pembingkai Kompas.com dalam isu ini, Kompas.com lebih banyak menutup dengan ringkasan analisis yang menyoroti implikasi hukum dan konstitusional, seringkali menutup dengan menggunakan kutipan dari ahli hukum atau pakar untuk menegaskan argumen. Memberikan Gambaran tentang langkah-langkah hukum berikutnya atau proses yang akan terjadi. Dalam Struktur Skrip, Penulis menjelaskan pada analisis peristiwa dengan melengkapi unsur 5W+1H dengan menekankan unsur "What" dalam artikel berita. Kompas.com lebih menekankan kepada rincian dan analisis Putusan MK, mencakup latar belakang, proses, dan konsekuensi hukum dari Keputusan tersebut. Dalam Struktur Tematik, Kompas.com menyajikan informasi dengan mendalam, analitis dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari

pakar dan pengamat, menggunakan analisis hukum, kritik dan evaluasi kritis serta implikasi jangka Panjang dari putusan MK. Kompas.com berusaha memberikan pemahaman yang mendalam dan analitis kepada para pembaca. Pada Struktur Retoris, Kompas.com menggunakan perangkat kata-kata yang lebih formal dan akademis, khususnya dalam analisis hukum dan konstitusional, dan menggunakan istilah teknis hukum, frasa yang terkait proses pengadilan. Kata-kata yang ditulis juga tidak terlalu emosional, berbeda dengan Okezone.com yang lebih emosional. BAB V PENUTUPAN 5.1 Kesimpulan Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis mendalam terhadap pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan peraturan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori framing dan beberapa teori berita yang relevan untuk menggali cara media massa mempengaruhi persepsi publik terhadap keputusan tersebut. Pada akhirnya, analisis menggunakan kerangka teori ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pemberitaan media mempengaruhi pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap keputusan politik yang krusial. Hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat relevansi teori- teori berita dalam konteks media online saat ini, tetapi juga mengungkapkan kompleksitas dalam proses penyebaran informasi dan pembentukan opini publik di era digital. Teori framing ini secara umum digunakan dalam analisis media untuk memahami bagaimana penyajian berita dapat mempengaruhi persepsi dan respons masyarakat terhadap isu-isu penting. Mereka memberikan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana media membentuk realitas sosial melalui seleksi, penonjolan, dan penyajian informasi . (Zhongdang Pan & Gerald M Kosicki, 2017). Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para peneliti, simpulan dari penelitian ini adalah bahwa tujuan awal, yakni mengungkapkan hasil pembentukan media dan preferensi terhadap isu yang disajikan, dapat diperhatikan. kepada keuda media yaitu Okezone.com dan Kompas.com dalam kasus pemberitaan yang kontriversial, yaitu perihal kasus Pemberitaan Putusan

Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia Capres dan Cawapres pada Peraturan Undang-Undang NO 7 Tahun 2017. 4 12 Peneliti dalam hal ini melakukan analisis dengan menggunakan kerangka kerja model framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki, yang memuat empat komponen, yakni Struktur Sintaksis, Struktur Skrip, Struktur Tematik, dan Struktur Retoris. 138

Kedua media Okezone.com dan Kompas.com dipilih oleh peneliti karena keduanya merupakan media yang memiliki audiens yang luas di Indonesia. Faktor lainnya yaitu adalah peneliti menggunakan kedua media tersebut dikarenakan Okezone.com dan Kompas.com memiliki perhatian yang cukup besar mengenai isu Putusan MK terkait kasus perubahan peraturan Batasan usia minimal Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024. Jika dilihat dari artikel berita Okezone.com sendiri, pembingkai yang dilakukan bersifat kontra dalam penulisannya, dikarenakan Okezone.com banyak menekankan reaksi negative, protes, kekhawatiran terhadap dinasti politik, dan pernyataan tokoh yang skeptis terhadap Keputusan tersebut. Kurangnya liputan yang mendukung putusan MK menunjukkan bahwa Okezone.com cenderung membangun narasi yang kritis dan skeptis terhadap Keputusan tersebut. Memperkuat pandangan bahwa putusan ini memiliki banyak aspek negative dan kontroversial. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kompas.com dalam segi pembingkai berita atau penulisan berita terkait isu Putusan MK ini, Kompas.com menyajikan informasi secara lebih netral dan berimbang. Mereka menampilkan baik aspek pro maupun kontra dari isu Putusan MK ini. Kompas.com menunjukkan pro melalui analisis hukum yang rinci, pandangan ahli hukum, dan nada pemberitaan yang netral. Lalu, Kompas.com menunjukkan kontra terhadap isu ini dengan melaporkan kritik, protes, dan polemic yang muncul. Laporan yang disajikan oleh media Okezone.com dan Kompas.com mengandung unsur 5W+1H. Namun, perbedaan terlihat antara keduanya, di mana Okezone.com lebih menyoroti unsur 'Bagaimana' atau 'How', dimana Okezone.com menjelaskan cenderung membahas perihal Bagaimana jalannya protes imbas Putusan MK disahkan, dan bagaimana tanggapan-tanggapan

terkait Putusan MK tentang perubahan batas usia minimal Capres dan Cawapres tersebut. Berbeda dengan Kompas.com yang lebih menekankan unsur 'What' atau 'Apa', dimana pada artikel berita Kompas.com lebih menjelaskan terkait kritik dan analisis Putusan MK terkait perubahan batasan usia minimal Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Dalam pemberitaan yang diterbitkan oleh Okezone.com dan Kompas.com, terdapat laporan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan batasan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden 139 dalam Pemilihan Presiden 2024. Artikel-artikel tersebut menampilkan nilai berita yang meliputi aspek respon masyarakat, dampak, konflik, pengaruh, pentingnya, dan ketokohan. Artikel di Okezone.com membahas tanggapan dan dampak langsung pada masyarakat yang ditimbulkan oleh para mahasiswa dan tokoh politik yang menentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan yang signifikan dapat diamati dalam publikasi berita antara media Kompas.com dan publikasi lainnya, sebagaimana tercermin dalam aspek ini. Pro terhadap isu melalui analisis hukum yang rinci, pandangan ahli hukum, dan data pemberitaan yang netral. Kompas.com cenderung menunjukkan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang sah dan beralasan. Kontra terhadap isu dengan melaporkan kritik, protes dan polemik yang muncul. Kompas.com juga memberikan ruang bagi pandangan yang menentang keputusan MK, menunjukkan bahwa keputusan ini kontroversial dan diperdebatkan 140 nilai berita yang dijelaskan melalui model dampak (Impact), konflik (Conflict), pengaruh (Magnitude), penting (Significance), serta ketokohan (Prominence). Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Kompas.com, konten berita menghadirkan informasi yang lebih mendalam terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan batas usia minimal bagi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dalam teori Konstruksi Realitas, kedua media memiliki tujuan dalam mengkomunikasikan informasi yang berbeda, di mana pada artikel Okezone.com tentang Putusan MK terkait batas usia calon

presiden dan wakil presiden, Okezone.com lebih banyak menyoroti sudut pandang yang menentang isu tersebut. Mereka menekankan reaksi negatif, protes, kekhawatiran terhadap dinasti politik, dan pernyataan tokoh yang skeptis terhadap keputusan tersebut. Okezone.com cenderung membangun narasi yang kritis dan skeptis terhadap keputusan tersebut, memperkuat pandangan bahwa putusan ini memiliki banyak aspek negatif dan kontroversial. Berbeda dengan Kompas.com dalam teori Kontruksi Realitas, dimana pada artikel Kompas.com dalam isu Putusan MK mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, Kompas.com lebih banyak menyajikan informasi secara lebih netral dan berimbang. Mereka menampilkan baik aspek pro maupun kontra dari keputusan.

5.2 Saran Berdasarkan penemuan yang dilakukan oleh peneliti, hasil temuan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada kedua media, yakni Okezone.com dan Kompas.com. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada judul, pernyataan awal, fokus isi, serta pengutipan sumber. Di platform Okezone.com, terdapat dukungan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan peraturan mengenai batas usia minimal untuk Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Berbeda halnya dengan Kompas.com yang dimana pada media tersebut, artikel berita ditulis dengan netral dan berimbang, yang disesuaikan dengan penulisan pro dan kontra terhadap isu tersebut. Tentunya dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, maka dari itu perlukan penelitian lanjutan, berikut saran yang dapat diberikan terkait saran akademik dan saran praktis:

5.2.1 Saran Akademis Saran yang dapat peneliti berikan secara akademik adalah terkait penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan memanfaatkan metode yang dapat digunakan untuk menganalisis wacana baik lisan maupun tulisan terkait topik Perubahan kebijakan batas usia minimal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

5.2.2 Saran Praktis Saran yang dapat diberikan peneliti secara praktis adalah rekomendasi yang

REPORT #22148071

disampaikan kepada lembaga media, di mana diharapkan lembaga tersebut mampu menyajikan artikel dengan objektivitas dan netralitas, serta menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat provokatif



REPORT #22148071

Results

Sources that matched your submitted document.

● IDENTICAL ● CHANGED TEXT

INTERNET SOURCE		
1.	0.25% daerah.sindonews.com	●
	https://daerah.sindonews.com/read/1234257/174/dinasti-politik-rusak-demokra..	
INTERNET SOURCE		
2.	0.18% nasional.kompas.com	●
	https://nasional.kompas.com/read/2023/11/17/14263001/bareskrim-usut-keboc...	
INTERNET SOURCE		
3.	0.17% www.beritainfo.com	●
	https://www.beritainfo.com/2023/07/kupas-tuntas-perbedaan-berita-dengan.ht...	
INTERNET SOURCE		
4.	0.17% ettheses.iainponorogo.ac.id	●
	https://etheses.iainponorogo.ac.id/20932/1/Viky%20Ardinza%20-%20302180126..	
INTERNET SOURCE		
5.	0.17% nasional.kompas.com	●
	https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/12550831/mahfud-md-kepesert...	
INTERNET SOURCE		
6.	0.15% nasional.kompas.com	●
	https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/13213031/sinyal-persetujuan-an...	
INTERNET SOURCE		
7.	0.12% news.okezone.com	●
	https://news.okezone.com/read/2023/10/24/340/2907583/serbu-gedung-dprd-a...	
INTERNET SOURCE		
8.	0.11% www.gelora.co	●
	https://www.gelora.co/2023/10/khawatir-terbentuk-dinasti-politik.html	
INTERNET SOURCE		
9.	0.11% repository.uinsaizu.ac.id	●
	https://repository.uinsaizu.ac.id/9457/2/TAHRIFUDIN_ANALISIS%20FRAMING%2...	



REPORT #22148071

INTERNET SOURCE		
10.	0.1% ms.wikipedia.org https://ms.wikipedia.org/wiki/Okezone.com	●
INTERNET SOURCE		
11.	0.09% www.bbc.com https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo	●
INTERNET SOURCE		
12.	0.09% repository.radenfatah.ac.id https://repository.radenfatah.ac.id/10387/3/Skripsi%20Ali%20Akbar%20Bab%20...	●
INTERNET SOURCE		
13.	0.08% www.bbc.com https://www.bbc.com/indonesia/articles/cekpgng2vjdo	●
INTERNET SOURCE		
14.	0.08% ugm.ac.id https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-bat...	●
INTERNET SOURCE		
15.	0.08% www.detik.com https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6380414/teks-berita-pengertian-ciri-ciri-...	●
INTERNET SOURCE		
16.	0.08% erepository.uwks.ac.id https://erepository.uwks.ac.id/17290/2/BAB%20I.pdf	●
INTERNET SOURCE		
17.	0.08% repository.uinsaizu.ac.id https://repository.uinsaizu.ac.id/7388/2/SRI%20ROIJAH_TABAYYUN%20TERHAD...	●
INTERNET SOURCE		
18.	0.07% jayapanguspress.penerbit.org https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/download/1259...	●
INTERNET SOURCE		
19.	0.06% perludem.org https://perludem.org/2024/06/15/dinasti-politik-perludem-ungkap-bahaya-pem...	●
INTERNET SOURCE		
20.	0.06% jurnal-umbuton.ac.id https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Medialog/article/download/4965/2582/...	●



REPORT #22148071

INTERNET SOURCE		
21.	0.05% rmol.id	●
	https://rmol.id/politik/read/2023/10/24/594527/khawatir-terbentuk-dinasti-poli...	
INTERNET SOURCE		
22.	0.04% nasional.kompas.com	●
	https://nasional.kompas.com/read/2023/11/21/20281521/mk-anwar-usman-tak...	
INTERNET SOURCE		
23.	0.04% kc.umn.ac.id	●
	https://kc.umn.ac.id/297/4/BAB%20III.pdf	
INTERNET SOURCE		
24.	0.04% repository.ar-raniry.ac.id	●
	https://repository.ar-raniry.ac.id/16418/1/Raudhatul%20Hikmah%2C%20160401..	
INTERNET SOURCE		
25.	0.04% ijsoc.goacademica.com	●
	https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/1109	
INTERNET SOURCE		
26.	0.03% pemilukita.republika.co.id	●
	https://pemilukita.republika.co.id/berita/s5k6p0409/tanya-perasaan-prabowo-p..	
INTERNET SOURCE		
27.	0.03% repository.uinjkt.ac.id	●
	https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76380/1/AUDI%20K...	
INTERNET SOURCE		
28.	0.01% repository.radenfatah.ac.id	●
	https://repository.radenfatah.ac.id/16808/2/3.%20BAB%20II_DEA%20AL%20SYA..	

● QUOTES

INTERNET SOURCE		
1.	0.87% nasional.kompas.com	
	https://nasional.kompas.com/read/2023/11/21/20281521/mk-anwar-usman-tak...	
INTERNET SOURCE		
2.	0.5% nasional.kompas.com	
	https://nasional.kompas.com/read/2023/11/30/15104401/kandasnya-gugatan-s...	



REPORT #22148071

INTERNET SOURCE

3. **0.48%** nasional.kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/15250561/syarat-usia-digugat-la...>

INTERNET SOURCE

4. **0.47%** www.rubicnews.com
<https://www.rubicnews.com/dalam-negeri/45311280968/topik-khusus-detail.ht...>

INTERNET SOURCE

5. **0.46%** fomomedia.id
<https://fomomedia.id/syarat-usia-capres-cawapres-digugat-lagi-ke-mk/>

INTERNET SOURCE

6. **0.39%** jurnal.peneliti.net
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/4403/3252/>

INTERNET SOURCE

7. **0.37%** www.voaindonesia.com
<https://www.voaindonesia.com/a/ketua-mahkamah-konstitusi-diminta-mundur...>

INTERNET SOURCE

8. **0.34%** jurnal.univrab.ac.id
<https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/download/4392/1784/>

INTERNET SOURCE

9. **0.34%** www.merdeka.com
<https://www.merdeka.com/peristiwa/mahasiswa-gugat-lagi-batas-usia-capres-c...>

INTERNET SOURCE

10. **0.3%** nasional.kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/12550831/mahfud-md-kepesert...>

INTERNET SOURCE

11. **0.28%** nasional.kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/12/21241041/tanya-ke-prabowo-an...>

INTERNET SOURCE

12. **0.23%** nasional.kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/17/14263001/bareskrim-usut-keboc...>

INTERNET SOURCE

13. **0.23%** nasional.kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/05150011/ketika-mk-dianggap-j...>



REPORT #22148071

INTERNET SOURCE

14. **0.23%** nasional.kompas.com

<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/09/07152571/anwar-usman-yang-m...>

INTERNET SOURCE

15. **0.21%** realtime.co.id

<https://realtime.co.id/hukum/putusan-batas-usia-capres-cawapres-kembali-dip...>

INTERNET SOURCE

16. **0.2%** repository.uinsaizu.ac.id

https://repository.uinsaizu.ac.id/7922/3/M.%20SHANDIKA%20AL%20KAFI_POLIT..

INTERNET SOURCE

17. **0.19%** nasional.kompas.com

<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/19564921/diberhentikan-dari-ke...>

INTERNET SOURCE

18. **0.17%** nasional.kompas.com

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/13213031/sinyal-persetujuan-an...>

INTERNET SOURCE

19. **0.17%** nasional.kompas.com

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/09463791/rangkuman-dissenting..>

INTERNET SOURCE

20. **0.16%** www.lihatjambi.com

<https://www.lihatjambi.com/hukum/57411273975/polemik-syarat-usia-capres-c...>

INTERNET SOURCE

21. **0.16%** repository.iainpare.ac.id

<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4386/1/16.3100.002.pdf>

INTERNET SOURCE

22. **0.14%** repository.uinjkt.ac.id

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62633/1/HASYIFA%...>

INTERNET SOURCE

23. **0.11%** www.bbc.com

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1pyd1x14qo>

INTERNET SOURCE

24. **0.11%** repository.uinsaizu.ac.id

https://repository.uinsaizu.ac.id/21141/1/ZALFA%20HAROSTA_PEMBERITAAN%2..



REPORT #22148071

INTERNET SOURCE

25. **0.11%** repositori.untidar.ac.id

<https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=38241&bid=14241>

INTERNET SOURCE

26. **0.1%** www.academia.edu

https://www.academia.edu/120903083/Peningkatan_Berita_Media_Online_Te...

INTERNET SOURCE

27. **0.1%** news.okezone.com

<https://news.okezone.com/read/2023/10/24/340/2907583/serbu-gedung-dprd-a...>

INTERNET SOURCE

28. **0.1%** www.suara.com

<https://www.suara.com/news/2023/11/20/180814/batas-usia-capres-cawapres-...>

INTERNET SOURCE

29. **0.1%** repository.upi-yai.ac.id

<http://repository.upi-yai.ac.id/9852/1/Laporan%20Akhir%20Penelitian%20Bingk..>

INTERNET SOURCE

30. **0.1%** eprints.upj.ac.id

<https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/2924/9/9.%20BAB%20II.pdf>

INTERNET SOURCE

31. **0.07%** www.kompas.id

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/09/ketika-demokrasi-dan-politik-...>

INTERNET SOURCE

32. **0.07%** news.detik.com

<https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting...>

INTERNET SOURCE

33. **0.07%** eskripsi.usm.ac.id

<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2019/G.311.19.0081/G.311.19.0081-...>

INTERNET SOURCE

34. **0.06%** journal.unhas.ac.id

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/1883/1048/3286>

INTERNET SOURCE

35. **0.06%** www.kompas.id

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/09/mengepung-mk-demi-batas-u...>



REPORT #22148071

INTERNET SOURCE

36. **0.05%** www.bbc.com

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgxkkqgzg8qo>

INTERNET SOURCE

37. **0.05%** jptam.org

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/2538/2204/4989>

INTERNET SOURCE

38. **0.05%** www.kompas.id

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/08/anwar-usman-dicopot-syarat-...>

INTERNET SOURCE

39. **0.05%** journal.appisi.or.id

<https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/download/252/422/1438>

INTERNET SOURCE

40. **0.04%** journal.universitaspahlawan.ac.id

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/138...>

INTERNET SOURCE

41. **0.04%** jicnusanantara.com

<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/download/474/536/2666>

INTERNET SOURCE

42. **0.04%** www.gramedia.com

<https://www.gramedia.com/literasi/unsur-berita/>

INTERNET SOURCE

43. **0.04%** jurnal.unmer.ac.id

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/download/1483/946>

INTERNET SOURCE

44. **0.03%** www.bbc.com

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cekpgng2vjdo>

INTERNET SOURCE

45. **0.03%** www.kompas.id

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/21/mk-umumkan-pembentukan-...>

INTERNET SOURCE

46. **0.03%** kumparan.com

<https://kumparan.com/kumparannews/habis-habisan-tabrak-etik-demi-gibran-...>



REPORT #22148071

INTERNET SOURCE

47. **0.02%** www.detik.com

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7305619/apa-itu-dissenti...>

INTERNET SOURCE

48. **0.02%** pemilukita.republika.co.id

<https://pemilukita.republika.co.id/berita/s5k6p0409/tanya-perasaan-prabowo-p..>

INTERNET SOURCE

49. **0.01%** eprints.untirta.ac.id

<https://eprints.untirta.ac.id/531/1/Budaya%20Organisasi%20KOMPAS%20TV%2...>